

Katalog/ *Catalog* : 1105014.15

STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI JAMBI

*VILLAGE POTENTIAL STATISTICS
OF JAMBI PROVINCE*

2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**
BPS-Statistics of Jambi Province

STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI JAMBI

*VILLAGE POTENTIAL STATISTICS
OF JAMBI PROVINCE*

2018



Statistik Potensi Desa Provinsi Jambi 2018

Village Potential Statistics of Jambi Province 2018

ISBN: -

No. Publikasi/*Publication Number: 15520.1815*

Katalog/*Catalogue: 1105014.15*

Ukuran Buku/*Book Size: 19 Cm x 27 Cm*

Jumlah Halaman/*Number of Pages: xviii + 200 Halaman/Pages*

Naskah/*Manuscript:*

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Jambi/

Social Statistics Division

Penyunting/*Editor:*

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Jambi/

Social Statistics Division

Gambar Kulit/*Cover Design:*

Sub Direktorat Statistik Ketahanan Wilayah BPS/

BPS-Sub Directorate of Region Resilience Statistics

Diterbitkan oleh/*Published by:*

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi/

BPS-Statistics of Jambi Province

Dicetak oleh/*Printed by*

CV Salim Media Indonesia

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik/**

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose
without permission from BPS-Statistics Indonesia*

KATA PENGANTAR

Statistik Potensi Desa Indonesia 2018 merupakan seri publikasi BPS yang terbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018. Bagi Provinsi Jambi, publikasi yang disusun adalah “Statistik Potensi Desa Provinsi Jambi 2018”. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Indonesia menurut ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah tersebut.

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam bagian-bagian sebagai berikut: keterangan umum desa, kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup,antisipasi dan kejadian bencana alam, pendidikan dan kesehatan, sosial dan budaya, hiburan dan olah raga, angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, otonomi desa dan program pemberdayaan masyarakat, serta keterangan pemerintah desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat nasional merupakan agregasi data tingkat provinsi. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akedemisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan Podes 2018 hingga tersusunnya publikasi ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi di masa mendatang.

Jambi, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jambi



(Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si).

PREFACE

Village Potential Statistics of Indonesia 2018 is a BPS publication series that is published three times in ten years which presents the results of the 2018 Village Potential Data Collection (Podes). For the Province of Jambi, the published publication is “Village Potential Statistics of Jambi Province 2018”. This publication provides an overview of village-level government administration areas throughout Indonesia according to the availability of infrastructure and other potential owned by each region.

The data and information presented in this publication are classified into: general information of village, demography and employment, settlement and environment, anticipation and incidence of natural disasters, education and health, social and culture, entertainment and sports, transportation, communication and information, economy, security, village autonomy and community empowerment programs, and information of village government. Data and information presented at the national level are provincial level data aggregation. Meanwhile, a similar publication at provincial level is also made which presents the aggregation of data at regency/ municipality level.

This publication is expected to be a reference for data and information of infrastructure and regional potential for development policy makers at the central and regional level, researchers, academics, and other various data users. Early detection and phenomenon of infrastructure availability and potential among regions are captured in the various tables presented in this publication.

We thank all those who have contributed in the success of completing the Podes 2018 publication. We welcome constructive criticism and suggestions from users of this publication to improve future editions of this publication.

Jambi, December 2018

Chief of BPS-Statistics of Jambi Province



(Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si).

DAFTAR ISI – CONTENTS

	Halaman
	<i>Page</i>
Kata Pengantar / <i>Preface</i>	iii
Daftar Isi / <i>Contents</i>	v
Daftar Tabel / <i>List of Tables</i>	vi
Riangan Eksekutif / <i>Executive Summary</i>	xiv
Penjelasan Umum Pendataan Potensi Desa 2018 / <i>General Explanation of Village Potential Census 2018</i>	1
Penjelasan Teknis / <i>Technical Notes</i> :	
1. Keterangan Umum Desa / <i>General Information of The Village</i>	5
2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan / <i>Demography and Employment</i>	21
3. Perumahan dan Lingkungan Hidup / <i>Settlement and Environment</i>	33
4. Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam / <i>Anticipation and Incidence of Natural</i>	55
5. Pendidikan dan Kesehatan / <i>Education and Health</i>	63
6. Sosial dan Budaya / <i>Social and Cultural</i>	87
7. Hiburan dan Olahraga / <i>Entertainment and Sport</i>	99
8. Angkutan, Komunikasi dan Informasi / <i>Transportation, Communication, and Information</i>	107
9. Ekonomi / <i>Economy</i>	121
10. Keamanan / <i>Security</i>	139
11. Otonomi Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat / <i>Village Autonomy and Community Empowerment Programs</i>	153
12. Keterangan Pemerintah Desa / <i>Information of Village Government</i>	167
Lampiran / <i>Appendix</i>	179
Kuesioner Podes 2018 / <i>Questionnaires of Village Potential Census 2018</i>	181

DAFTAR TABEL - LIST OF TABLES

	Halaman <i>Page</i>
1. Keterangan Umum Desa / General Information of The Village	
01.1 Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan di Provinsi Jambi <i>Number of Governmental Administrative Regions in Province of Jambi</i>	11
01.2 Banyaknya Desa/Kelurahan, 2011-2018 <i>Number of Villages/Sub-Districts, 2011- 2018</i>	12
01.3 Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Klasifikasi Pemerintahan <i>Number of The Lowest Governmental Administrative Regions by Governmental Classification</i>	13
01.4 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Kantor Kepala Desa/Lurah <i>Number of Villages/Sub-Districts by Presence of Village/Sub-District Head Office.....</i>	14
01.5 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kepemilikan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan <i>Number of Villages/Sub-Districts by Village Consultative Board/Sub-District Consultative Board Ownership</i>	16
01.6 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Topografi Wilayah <i>Number of Villages/Sub-Districts by Topography of Area</i>	17
01.7 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Desa Terhadap Laut <i>Number of Villages/Sub-Districts by Location of Village toward The Sea</i>	18
01.8 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan dan Keberadaan Tanaman Mangrove <i>Number of Villages/Sub-Districts by Location of Forest Area and Availability of Mangrove</i>	19
2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan / Demography and Employment	
02.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk <i>Number of Villages/Sub-Districts by Main Income Source of The Majority of Population..</i>	27
02.2 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Sebagian Besar Penduduknya Bekerja pada Sektor Pertanian Menurut Sub Sektor <i>Number of Villages/Sub-Districts That The Majority of Population Work in</i>	

	<i>Agricultural Sector by Sub-Sector</i>	28
02.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia dan Agen Pengerah Tenaga Kerja Indonesia <i>Number of Villages/Sub-Districts by Presence and Agent of Indonesian Overseas Worker</i>	31
3.	Perumahan dan Lingkungan Hidup / <i>Settlement and Environment</i>	
03.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Sumber Penerangan Jalan Utama Desa <i>Number of Villages/Sub-Districts by Presence of Family of Electric Consumer and Source of Main Street Illumination</i>	39
03.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan oleh Sebagian Besar Keluarga dan Keberadaan Agen/ Penjual Bahan Bakar <i>Number of Villages/Sub-Districts by Type of Cooking Fuel Used by Majority of Families and Availability of Agent/Seller of Fuel</i>	40
03.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Tempat Pembuangan Sampah dan Ketersediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) <i>Number of Villages/Sub-Districts by Type of Garbage Disposal Unit and Availability of Temporary Garbage Disposal Unit</i>	41
03.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga <i>Number of Villages/Sub-Districts by Sources of Drinking Water of Majority of The Families</i>	42
03.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga <i>Number of Villages/Sub-Districts by Toilet Facility Usage of Majority of Families</i>	44
03.6	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sungai, Saluran Irigasi, Danau/Waduk/Situ/Bendungan, Embung, dan Mata Air <i>Number of Villages/Sub-Districts by Availability of River, Irrigation Channel, Lake/Dam/Reservoir, Embung, and Spring</i>	45
03.7	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Dilalui Saluran Irigasi Menurut Jenis Penggunaan Saluran Irigasi <i>Number of Villages/Sub-Districts Are Traversed by Irrigation Channel by Usage of Irrigation Channel</i>	46
03.8	Banyaknya Desa ¹ /Kelurahan Menurut Jenis Penggunaan Embung	

	<i>Number of Villages¹ / Sub-Districts by Usage of Embung</i>	48
03.9	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mempunyai Sungai Menurut Keberadaan Pabrik/Industri/Rumah Tangga/Lainnya yang Membuang Limbah ke Sungai <i>Number of Villages/Sub-Districts With River by Availability of Manufactories/ Industries/Household/ Others That Waste Disposal Into River</i>	50
03.10	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup <i>Number of Villages/Sub-Districts by Type of Environmental Pollution</i>	51
03.11	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis dan Sumber Utama Pencemaran Lingkungan Hidup <i>Number of Villages/Sub-Districts by Type and Main Source of Environmental Pollution</i>	52
03.12	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kegiatan Pelestarian Lingkungan dan Pengolahan Sampah <i>Number Villages/Sub-Districts by Activity Environmental Conservation and Processing Waste</i>	53
03.13	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kebiasaan Masyarakat Membakar Ladang/Kebun dan Keberadaan Penggalan Golongan C <i>Number of Villages/Sub-Districts by Existence of Burning Plant/Land Tenure and Availability of C-Class Mining Field</i>	54

4. Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam / *Anticipation and Incidence of Natural Disaster*

04.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam <i>Number of Villages/Sub-Districts by Effort in Anticipation/Mitigation of Natural Disaster</i>	59
04.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Bencana Alam dalam Tiga Tahun Terakhir <i>Number of Villages/Sub-Districts by Type of Natural Disaster within Last Three Years</i>	60

5. Pendidikan dan Kesehatan / *Education and Health*

05.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Lembaga Keterampilan <i>Number of Villages/Sub-Districts by Availability of Skills Courses</i>	75
05.2	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mempunyai Sekolah <i>Number of Villages/Sub-Districts with School</i>	76
05.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Kegiatan Pemberantasan	

	Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional, Kegiatan Pendidikan Paket A/B/C, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Pendidikan Al-Quran, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	
	<i>Number of Villages/Sub-Districts By Availability of Functional Literacy, A/B/C Educational Package, Playgroup, Child Daycare, Al-Quran Learning Center, and Communal Library</i>	78
05.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Kesehatan	
	<i>Number of Villages/Sub-Districts by Availability of Health Facility</i>	79
05.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kegiatan Posyandu dan Posbindu	
	<i>Number of Villages/Sub-Districts by the Activity of Integrated Health Post and Integrated Counseling Post</i>	81
05.6	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Tenaga Kesehatan dan Dukun Bayi yang Tinggal di Desa	
	<i>Number of Villages/Sub-Districts by Availability of Health Worker and Traditional Birth Attendant Who Live in Village</i>	82
05.7	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah Penyakit Selama Setahun Terakhir	
	<i>Number of Villages/Sub-Districts by Type of Epidemic Within Last Year</i>	83
05.8	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penderita Gizi Buruk dan Orang yang Dipasung	
	<i>Number of Villages/Sub-Districts by Presence of Malnutrition and Deprived People</i>	84
05.9	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Warga Penerima BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)/Jamkesda dan Warga Penerima Surat Keterangan Tidak Mampu pada Tahun 2017	
	<i>Number of Villages/Sub-Districts by Presence of People who Received Social Security Agency/ -Contribution Assistance Recipient- (The BPJS PBI)/Regional Health Insurance and People who Received Poor Certificate in 2017</i>	85

6. Sosial dan Budaya / Social and Cultural

06.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keragaman Agama, Suku/Etnis dan Bahasa	
	<i>Number of Villages/Sub-Districts by Diversity of Religion, Ethnic, and Language</i>	93
06.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Tempat Ibadah	
	<i>Number of Villages/Sub-Districts by Availability of Place of Worship</i>	94
06.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat	
	<i>Number of Villages/Sub-Districts by Presence of The Disabled</i>	95
06.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Korban Bunuh Diri, Lokasi	

Berkumpul Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pekerja Seks Komersial (PSK) <i>Number of Villages/Sub-Districts by Existence of Suicide Victims, Street Children, Homeless, and Commercial Sex Workers</i>	97
---	----

7. Hiburan dan Olah Raga / *Entertainment and Sport*

07.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Ruang Publik Terbuka, Pub/Diskotek/Karaoke, dan Pusat Kebugaran <i>Number of Villages/Sub-Districts by Availability of Open Public Space, Pub/ Discotheque/Karaoke, and Fitness Center</i>	103
07.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas/Lapangan Olahraga <i>Number of Villages/Sub-Districts by Availability of Sports Facility/Field</i>	104

8. Angkutan, Komunikasi, dan Informasi / *Transportation, Communication, and Information*

08.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi dan Ketersediaan Angkutan Umum <i>Number of Villages/Sub-Districts by Type of Transportation Infrastructure and Availability of Public Transportation</i>	113
08.2 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat atau Darat dan Air Menurut Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas <i>Number of Villages/Sub-Districts Used Land or Land and Water Transportation Infrastructure by Type of The Widest Road Surface</i>	114
08.3 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat atau Darat dan Air Menurut Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat <i>Number of Villages/Sub-Districts Used Land or Land and Water Transportation Infrastructure by Availability of Road Which Can Be Passed by Four Wheel Vehicle</i>	115
08.4 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS), Sinyal Telepon Seluler, dan Sinyal Internet GSM atau CDMA <i>Number of Villages/Sub-Districts by Existence of Base Transceiver Station (BTS), Cellular Phone Signal, and GSM or CDMA Internet Signal</i>	116
08.5 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Program Televisi dan Radio yang dapat Diterima Warga <i>Number of Villages/Sub-Districts by Television and Radio Program That can be</i>	

	<i>Received by People</i>	118
08.6	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Komunikasi <i>Number of Villages/Sub-Districts by Availability of Communication Facility</i>	120
 9. Ekonomi / Economy		
09.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Koperasi <i>Number of Villages/Sub-Districts by Availability of Cooperative</i>	129
09.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Perdagangan dan Akomodasi <i>Number of Villages/Sub-Districts by Availability of Trading and Accomodation Facility</i>	130
09.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Kelompok Pertokoan, Pasar, dan Kios Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) <i>Number of Villages/Sub-Districts by Availability of Shopping Complex, Market, and Agricultural Production Stall</i>	132
09.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Fasilitas Perkreditan Selama Setahun Terakhir <i>Number of Villages/Sub-Districts by Availability of Credit Facility Within Last Year</i>	134
09.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan dan Jenis Industri Kecil dan Mikro <i>Number of Villages/Sub-Districts by Availability and Type of Small and Micro Industry</i>	135
09.6	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Bank <i>Number of Villages/Sub-Districts by Availability of Bank</i>	136
09.7	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Penunjang Ekonomi <i>Number of Villages/Sub-Districts by Availability of Economic Supporting Facilities</i>	137
 10. Keamanan / Security		
10.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi Selama Setahun Terakhir <i>Number of Villages/Sub-Districts by Type of Massive Fighting Incident Within Last Year</i>	143
10.2	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Kategori Korban <i>Number of Villages/Sub-Districts with Massive Fighting Incident and Type of Victim</i> ...	144

10.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Setahun Terakhir <i>Number of Villages/Sub-Districts by Initiator/Mediator of Massive Fighting Incident That Most Often Occur Within Last Year</i>	145
10.4	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Tindak Kejahatan <i>Number of Villages/Sub-Districts with Incidence of Crime Within Last Year by Type of Criminal Offense</i>	146
10.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kejadian Tindak Kejahatan yang Paling Sering Terjadi Selama Setahun Terakhir <i>Number of Villages/Sub-Districts by Type of Incidence of Crime That Most Often Occur Within Last Year</i>	148
10.6	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Selama Setahun Terakhir <i>Number of Villages/Sub-Districts by Type of Citizen's Effort to Secure Community Within Last Year.....</i>	150
10.7	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat <i>Number of Villages/Sub-Districts by Existence of Police Station and Easy Access to Nearest Police Station</i>	151

11. Otonomi Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat / Village Autonomy and Community Empowerment Programs

11.1	Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Sistem Informasi Desa dan Sistem Keuangan Desa <i>Number of Villages by Availability of Village Information System and Village Financial System</i>	159
11.2	Banyaknya Desa Menurut Sumber Pendapatan Desa Tahun 2017 <i>Number of Villages by The Source of Village's Budget in 2017</i>	160
11.3	Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa 2018, dan Peraturan Kepala Desa 2017 <i>Number of Villages by Availability of Village Medium-Term Development Plan (RPJM), Village Government Work Plan 2018, and Headman Regulation 2017</i>	162
11.4	Banyaknya Desa Menurut Kepemilikan Badan Usaha dan Aset Desa <i>Number of Villages by Ownership of Business Entity and Village Asset</i>	163
11.5	Banyaknya Desa Menurut Penggunaan Dana Desa Tahun 2017	

	<i>Number of Villages by The Use of Village Funds in 2017</i>	164
11.6	Banyaknya Desa Menurut Permasalahan yang Dihadapi dalam Penggunaan Dana Desa Selama Tahun 2017 <i>Number of Villages by The Problems Faced in The Use of The Village Funds During 2017</i>	165
11.7	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Program/Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan yang Selain Bersumber dari Dana Desa Selama Tahun 2015 - 2017 <i>Number of Villages/Sub-Districts by The Availability of Infrastructure Development and Empowerment Program/Activity That Funded Apart From Village Fund in 2015 - 2017</i>	166
12.	Keterangan Pemerintah Desa / <i>Information of Village Government</i>	
12.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pemerintah Desa/Kelurahan <i>Number of Villages/Sub-Districts by Existence of Village/Sub-District Government ...</i>	171
12.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Kelurahan <i>Number of Villages/Sub-Districts by Sex of Village Head/Sub-District Head and Village Secretary/Sub-District Secretary</i>	172
12.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kelompok Umur Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Kelurahan <i>Number of Villages/Sub-Districts by Age Group of Village Head/Sub-District Head and Village Secretary/Sub-District Secretary</i>	173
12.4	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Desa/Lurah <i>Number of Villages/Sub-Districts by Education Attainment of Village Head/Sub-District Head</i>	174
12.5	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Sekretaris Desa/Lurah <i>Number of Villages/Sub-Districts by Education Attainment of Village Secretary/Sub-District Secretary</i>	176

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pusat Statistik telah melaksanakan pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 pada bulan Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (wilayah administrasi setingkat desa yang dimaksud, yaitu: desa, kelurahan, nagari di Sumatera Barat, Unit Permukiman Transmigrasi (UPI), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

Hasil pendataan Podes 2018 merupakan pendataan terhadap ketersediaan infrastruktur, potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki administrasi setingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hasil pendataan di Provinsi Jambi mencatat bahwa 1.562 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 1.399 desa, dan 163 kelurahan. Selain itu diketahui pula jumlah kecamatan sebanyak 141 dan kabupaten/kota sebanyak 11. Selain informasi terkait cakupan wilayah administrasi, Podes 2018 juga menyajikan berbagai informasi terkait ketersediaan infrastruktur penunjang berbasis kewilayahan di Provinsi Jambi.

Pada bidang pendidikan, diketahui bahwa 1.464 desa/kelurahan telah mempunyai SD/MI. Lebih lanjut terdapat 752 desa/kelurahan yang telah terdapat SMP/MTs dan 332 desa/kelurahan yang telah terdapat SMU/MA.

Untuk infrastruktur kesehatan, hasil Podes 2018 menunjukkan bahwa 231 desa/kelurahan telah memiliki puskesmas, baik puskesmas dengan rawat inap maupun tanpa rawat inap. Selain itu terdapat 654 desa/kelurahan yang terdapat puskesmas pembantu (pustu). Terkait ketersediaan tenaga kesehatan yang tinggal di desa, telah terdapat 221 desa/kelurahan yang terdapat dokter umum/spesialis pria dan 224 desa/kelurahan yang terdapat dokter umum/spesialis wanita yang tinggal di desa.

Pada bidang perekonomian, diketahui bahwa terdapat 398 desa/kelurahan sudah memiliki pasar dengan bangunan, baik bangunan permanen maupun semi permanen. Ada sebanyak 235 desa/kelurahan dengan keberadaan pasar tanpa bangunan. Terkait sarana perdagangan yang lainnya, diketahui bahwa hampir semua desa/kelurahan di Provinsi Jambi (1.541 desa/kelurahan) terdapat toko/warung kelontong. Untuk keberadaan industri kecil dan mikro diketahui bahwa terdapat 720 desa/kelurahan yang memiliki industri dari kayu. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan jumlah desa/kelurahan yang memiliki industri makanan dan minuman, yakni sebanyak 443 desa/kelurahan.

Terkait dengan tingkat elektrisitas, diketahui bahwa sebanyak 1.462 desa/kelurahan telah terdapat keluarga pengguna listrik PLN. Untuk infrastruktur transportasi diketahui bahwa 1.371 desa/kelurahan yang menggunakan sarana transportasi darat. Lebih lanjut diketahui bahwa 575 desa/kelurahan sudah tersedia angkutan umum dengan trayek tetap.

Bidang Perumahan dan lingkungan hidup, diketahui bahwa 1.078 desa/kelurahan sebagian besar keluarga di wilayah tersebut menggunakan LPG 3 kg sebagai bahan bakarnya untuk memasak. Selain itu diketahui pula bahwa ternyata masih cukup banyak desa/kelurahan yang masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga (209 desa/kelurahan). Dilihat dari sumber air minum sebagian besar keluarga, ternyata mayoritas desa/kelurahan di Provinsi Jambi (670) masih menggunakan sumur sebagai sumber air minumnya. Pada bidang sanitasi tersisa 106 desa/kelurahan yang fasilitas tempat buang air besar keluarganya bukan jamban, sedangkan mayoritas yakni sebanyak 1.389 desa/kelurahan telah menggunakan jamban sendiri sebagai fasilitas tempat buang air besarnya.

Pemerintah telah memprioritaskan pembangunan nasional mulai dari pinggiran, yaitu pembangunan desa. Dari hasil Potensi Desa tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis kewilayahan terkait potensi ekonomi, sosial dan sarana/prasarana wilayah. Selain itu juga dapat digunakan dalam evaluasi program dan digunakan dalam penyusunan kebijakan/strategi berbasis kewilayahan.

EXECUTIVE SUMMARY

Statistics Indonesia has carried out Village Potential data census (Podes) 2018 in all regencies/ municipalities, districts, and the village level government administration areas (such as villages, sub-districts, nagari in West Sumatra, the Transmigration Settlement Unit (UPT), and Entity of Transmigration Settlement (SPT) which is still being fostered by the relevant ministries.

The results of this census are data about the availability of infrastructure, social and economic potential owned by village/sub-district, district, regency/ municipality level throughout Indonesia. The results of the data collection in Jambi Province noted that there are 1,562 village level government administration areas consisting of 1,399 villages, and 163 sub-districts. In addition, it is known that there are 141 districts and 11 regencies/ municipalities. Beside the information related to administrative area coverage, Podes 2018 also provides various information about the availability of territorial-based supporting infrastructure in Jambi Province.

In the education sector, it is known that 1,464 villages/sub-districts have elementary school. Furthermore, there are 752 villages/sub-districts that have junior high school and 332 villages/sub-districts that have senior high school.

For health infrastructure, Podes 2018 data show that 231 villages/sub-districts have health centers, both puskesmas with and without inpatient care. In addition there are 654 villages/sub-districts have auxiliary health centers (puskesmas pembantu). Regarding the availability of health workers living in the village, there are 221 villages/sub-districts that have male general practitioners/specialists and 224 villages/sub-districts that have female general practitioners/specialists.

In the economic field, it is known that there are 398 villages/sub-districts that already have markets with building, both permanent and semi-permanent building. There are 235 villages/sub-districts owned market without building. Regarding other trade facilities, it is known that almost all villages/sub-districts in Jambi Province (1,541 villages/sub-districts) have grocery stores. For the existence of small and micro industries it is known that there are 720 villages/sub-districts that have wood industries. This number is higher than the number of villages/sub-districts that have a food and beverage industry, which is only 443 villages/sub-districts.

Related to the level of electricity, it is known that 1,462 villages/sub-districts have a family of PLN electricity users. For transportation infrastructure, it is known that 1,371 villages/sub-districts use land transportation facilities. Furthermore it is known that 575 villages/sub-districts have public transportation with fixed routes.

For the field of housing and environment, it is known that 1,078 villages/sub-districts are mostly using 3 kg LPG as fuel for cooking. In addition, it is also known that there are still a small number of villages/sub-districts that still use firewood as cooking (209 villages/sub-districts).

Viewed from the source of drinking water, it turns out that the majority of villages/sub-districts in Jambi Province (670 villages/sub-districts) still use wells as a source of drinking water. In the remaining sanitation field, 106 villages/sub-districts whose toilet facilities are part of their families are not latrines, while the majority of which are 1,389 villages/sub-districts have used their own latrines as defecation facilities.

The government has prioritized national development starting from the periphery, namely village development. The results of Podes 2018 can be used as material for regional analysis regarding economic, social and regional infrastructure/facilities. In addition, it can also be used in program evaluations and used in regional-based policy/strategy preparation.

<https://jambi.bps.go.id>

<https://jambi.bps.go.id>

Penjelasan Umum Pendataan Potensi Desa 2018

1. Data pada publikasi ini berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa yang dilakukan pada 2-31 Mei 2018. Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu sepuluh tahun, sebagai bagian dari siklus sepuluh tahunan kegiatan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun berakhiran '1', pendataan Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Pertanian yaitu identifikasi wilayah konsentrasi usaha pertanian menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhiran '4', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Ekonomi dalam rangka identifikasi usaha menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhiran '8', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Penduduk yaitu untuk identifikasi wilayah permukiman baru.
2. Pendataan Podes 2018 dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 1) menyediakan data yang mendukung perencanaan kegiatan sensus penduduk 2020, (2) sebagai sarana untuk pemutakhiran Master File Desa (MFD), (3) menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi: sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah, (4) menyediakan data bagi keperluan pemutakhiran klasifikasi/tipologi desa, misalnya perkotaan-perdesaan, pesisir non pesisir, dan sebagainya, (5) sebagai sumber

General Explanation of Village Potential Census 2018

1. Data on this publication according to Village Potential Census conducted at 2nd-31st May 2018. Village Potential Census (Podes) has been implemented since 1980. Podes data collection is carried out three times in a period of ten years, as part of the ten-year cycle of census activities conducted by BPS-Statistics Indonesia. Podes is carried out two years before the census to support it. In the year ending with '1', Podes is carried out to support the Agricultural Census, to identify the concentration area of agricultural businesses according to the sector and subsector. In the year ending with '4', Podes is implemented to support the Economic Census in order to identify businesses according to sectors and sub-sectors. In the year ending with '8', Podes is implemented to support the Population Census, to identify new residential areas.
2. The Podes 2018 is carried out to achieve the following objectives: (1) to provide data to supports of planning of population census 2020 activities, (2) to serve as data source to update the BPS "Master File Desa" (Village Master File), (3) to provide the data on existence, and development of potential owned by of each governmental administrative region which includes social, economy, and facilities and infrastructures aspect, (4) to provide the data used to update classification/typology of region (such as: urban-rural, coastal areas – non-coastal areas and so on), (5) to serve as a data source for updating statistical area map, (6) to provide main data for compilation

data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik,(6) menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil (7)menyediakan data bagi penyusunan berbagai analisis seperti identifikasi dan penentuan desa tertinggal, variabel konteks dalam PMT, identifikasi desa rawan bencana, dan identifikasi desa yang mempunyai kesulitan geografis, (8) menyediakan data bagi penghitungan indikator-indikator pembangunan/kemajuan desa.

3. Podes 2018 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (wilayah administrasi setingkat desa yang dimaksud, yaitu: desa, kelurahan, nagari dan jorong di Sumatera Barat, Unit Permukiman Transmigrasi atau UPT, dan Satuan Permukiman Transmigrasi atau SPT yang masih dibina oleh kementerian terkait). UPT/SPT di Indonesia menurut Podes 2018 terdapat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
4. Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki batas wilayah yang jelas, (2) memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya, dan (3) memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.

of small area statistics, (7) to provide data for compilation of various analyses such as identification and determining lagging regions, context variabel in the PMT, identification of disaster prone village, and identification of the village with geographical complexity, (8) to provide the data used for calculating the village development/progress index.

3. *Podes 2018 implemented as a census of the entire regency/city, district, and the lowest governmental administrative region equivalent to village (the village level administration areas referred to are village, sub-district, nagari and jorong in West Sumatera, Transmigration Settlement Unit or UPT, and Entity of Transmigration Settlement or SPT which is still fostered by the relevant ministries). According to Podes 2018 UPT / SPT in Indonesia are found in Aceh, North Sumatra, Bengkulu, Lampung, West Nusa Tenggara, Central Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, Gorontalo, West Sulawesi, Maluku and North Maluku provinces.*
4. *A governmental administrative region is decided as the target location of the data collection if the region has been declared as a definitive and operational area with the following criterias: (1) having jurisdiction with clear boundaries, (2) has a population residing permanently in its territory, and (3) has a legitimate and sovereign government.*

5. Instrumen Podes 2018 yang digunakan sebanyak tiga jenis kuesioner sesuai dengan jenjang wilayah pencacahan, yaitu: kabupaten/kota (PODES2018-KAB/KOTA), kecamatan (PODES2018-KEC) dan desa (PODES2018-DESA). Perbedaan ini dilakukan untuk menjaga kelengkapan dan akurasi data. Sementara itu, referensi waktu bagi setiap data merujuk pada periode pencacahan yaitu Mei 2018, kecuali bagi beberapa data tertentu yang dinyatakan memiliki referensi waktu yang berbeda misalnya satu atau tiga tahun sebelum periode pencacahan.
 6. Data yang merujuk satu tahun sebelum periode pencacahan atau merujuk tahun 2017, terdapat pada Tabel: 05.7; 05.9; 09.4; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.2; 11.5; dan 11.6. Data yang merujuk tiga tahun sebelum periode pencacahan terdapat pada Tabel 04.2 dan 11.7.
 7. Pengumpulan data Podes 2018 dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan di wilayah pencacahan serta penelusuran dokumen terkait. Petugas wawancara adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus pelatihan pendataan Podes 2018. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap wilayah target pencacahan. Kemajuan pendataan dilaporkan dan dipantau secara langsung melalui web.
 8. Pengolahan data Podes 2018 dilaksanakan di BPS Kabupaten/Kota
5. *The instruments of Podes 2018 consists of three types of questionnaires according to the levels of enumeration areas, namely: regency/municipality (PODES2018-KAB/KOTA), district (PODES2018-KEC) and village (PODES2018-DESA) levels. This distinction is decided to maintain the completeness and accuracy of data. Meanwhile, the time reference for each data refers to the period of enumeration that is May 2018, in exception for some specific data which is declared have different time references such as one or three years before the period of enumeration.*
 6. *Data referring to one year before the enumeration period or referring to 2017 are in The Table: 05.7; 05.9; 09.4; 10.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.2; 11.5; and 11.6. While data referring to three years before the enumeration period are in Tables 04.2 and 11.7.*
 7. *Data collection of Podes 2018 carried out through direct interviews by trained personnel with relevant respondents in the enumeration area and searches related documents. The interviewers are BPS Regency/Municipality personnel or partners that have passed Podes enumeration training. Meanwhile, the selected respondents are several people who have the knowledge, authority, and responsibility towards the target area of enumeration. The progress of data collection is reported and monitored directly through are presented in real-time on the websites.*
 8. *Data processing of Podes 2018 held at BPS Regency/Municipality*

dengan maksud untuk mempercepat waktu penyelesaian dan pertimbangan kemudahan untuk validasi data, karena pusat pengolahan data dekat dengan sumber data. Petugas pengolah adalah staf BPS Kabupaten/Kota atau mitra yang ditunjuk yang telah dinyatakan lulus pelatihan petugas pengolah Podes 2018. Dalam rangka menjamin kualitas data maka aplikasi pengolahan data dilengkapi menu *query tools, report*, dan tabulasi untuk mengevaluasi data hasil Podes 2018. Selain itu, penjaminan kualitas data juga dilakukan melalui pemeriksaan data secara bertingkat baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sampai dengan tingkat BPS Pusat. Dilakukan pula rekonsiliasi di tingkat BPS Provinsi dalam rangka penjaminan kualitas.

9. Diseminasi hasil pendataan Podes 2018 disusun ke dalam beberapa jenis publikasi yang utama yaitu: Statistik Potensi Desa Indonesia 2018, Statistik Infrastruktur Indonesia 2018, dan Ringkasan Eksekutif Hasil Pendataan Potensi Desa Indonesia 2018. Publikasi Statistik Potensi Desa Indonesia 2018 dibuat dalam dua cakupan data yaitu publikasi nasional (dirinci menurut provinsi) dan publikasi provinsi (dirinci menurut kabupaten/kota). Sementara, Publikasi Statistik Infrastruktur Indonesia 2018, Statistik Evaluasi Dana Desa 2018, dan Ringkasan Eksekutif Hasil Pendataan Potensi Desa 2018, disusun dalam level nasional. Disusun pula publikasi terkait evaluasi Dana Desa dari hasil pendataan Podes 2018 dengan cakupan nasional dan provinsi.

in order to speed up the turn around time of data processing and consideration of the easier validation data, because data processing center close to the source of data. The data processor officers are BPS Regency/Municipality personnel or selected BPS's partner that have passed Podes 2018 data processing training. In order to ensure the quality of data, hence, the data processing application is equipped with tabulation program to evaluate data of Podes 2018. In addition to, data quality assurance is also carried out through the multilevel data examination in the district and provincial level, even up to central BPS. Reconciliation was also carried out at the provincial level in order to guarantee the quality.

9. *The dissemination of Podes 2014 is prepared into some main publications namely: Village Potential Statistics of Indonesia 2018, Infrastructure Statistics of Indonesia 2018, and Executive Summary of Village Potential Statistics of Indonesia 2018. The book of Village Potential Statistics of Indonesia 2018 is drafted in two types of data i.e. national publications (specified by province) and provincial publications (elaborated by regency/municipality). Meanwhile, the book of Infrastructure Statistics of Indonesia 2018, Village Fund Statistics 2018 and Executive Summary of Village Potential Statistics of Indonesia 2018, all of them prepared in the national coverage. Publications related to Village Fund evaluation from Podes 2018 data collection with national and provincial coverage were also prepared.*

1

KETERANGAN UMUM DESA

GENERAL INFORMATION OF THE VILLAGE



<https://jambi.bps.go.id>

Penjelasan Teknis Keterangan Umum Desa

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
2. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)
3. Unit Permukiman Transmigrasi (UPI) adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat. Organisasi UPI merupakan kelembagaan yang bersifat sementara dibentuk sekurang-kurangnya

Technical Notes General Information of The Village

1. *Village is village and custom village or that is called by other terms, hereinafter referred to as the village is the unity of the legal community who have territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, the interest of local communities based on community initiatives, the origin and local customs that are acknowledged and respected within the unitary System of Government Republic of Indonesia (Law No. 6 Year 2014 about Village).*
2. *Sub-District is division of administrative areas in Indonesia under the district. Subdistrict is led by a subdistrict head (Lurah) as an apparatus of regency and or city and responsible to the district head. The Lurah inaugurated by regent/mayor head as suggestion by region secretary from civil servants who qualified according regulation (Law No. 23 Year 2014 about Local Governmental).*
3. *Transmigration Settlement Unit (UPT) is entity of transmigration settlement that serves as a residence and place of business for migrants that is planned to form a village or join the local village. Organizational of transmigration settlement unit is a temporary institution established for at least 2 months before the migrants are placed and maximum of 5 years (Regulation of the Minister of Manpower*

2 bulan sebelum transmigran ditempatkan dan paling lama 5 tahun (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.22/MEN/IX/2007).

4. Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigasi).
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (PP Nomor 72 Tahun 2005). Satu nagari terdiri dari beberapa Jorong/Korong. Orang yang memimpin Jorong/Korong disebut sebagai Kepala Jorong atau Wali Korong. Catatan: nagari dapat dilihat datanya pada publikasi nasional dan publikasi Provinsi Sumatera Barat.
6. Kantor Kepala Desa/Lurah adalah bangunan yang dikuasai oleh desa/kelurahan yang diperuntukkan secara khusus untuk kegiatan operasional pemerintah desa/kelurahan baik merupakan aset

and Transmigration No. PER.22/MEN/IX/2007).

4. *Entity of Transmigration Settlement (SPT) is potential settlement unit that designed as transmigration settlements to support the economic growth centers in the region that already exist or are being developed accordance with the spatial plans (Decision of the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. 246 Year 2003 concerning Procedures and Criteria for Preparation of Settlement Location Transmigasi).*
5. *Nagari is customary law community units that have certain territorial boundaries, and are authorized to regulate and manage the interests of its own local community based on the Minangkabau traditional philosophy (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) or based on local origins and customs in the West Sumatra Province (Government Regulation No. 72 of 2005). A Nagari consists of several Jorong/Korong. The person who leads Jorong/Korong is referred to as the Head of Jorong or Wali Korong. Note: the data of nagari is found in the national publications and the publication of Province of Sumatra Barat.*
6. *Village Head Office/Sub-District Office is building that owned by village/sub-district for providing specifically to the operations of village/sub-district government as village asset or not.*

desa maupun bukan aset desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
 8. Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Anggota LMK adalah satu orang perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih secara demokratis pada tingkat RW (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010).
 9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007).
 10. Topografi adalah keadaan muka bumi pada suatu kawasan atau daerah
 - a. Lereng/puncak adalah bagian dari gunung/bukit yang terletak di antara puncak sampai lembah. Lereng yang dimaksud juga mencakup punggung bukit dan puncak (bagian paling atas dari gunung).
 - b. Lembah adalah daerah rendah di antara dua gunung/pegunungan atau daerah yang mempunyai
7. *Village Consultative Board is a institution that carry out governmental function which is the members of Village Consultative Board are representatives of the resident based on representation of regions and defined by democratic (Regulation of Government No 6 Year 2014 About Village).*
 8. *Sub-District Consultative Board is consultative institutions in sub-district to accommodate aspiration and to increase participation and community empowerment. The members of Sub-District Consultative Institutions are representatives of community leaders that are elected democratically in RW level (Provincial Regulation of Jakarta No. 5 Year 2010).*
 9. *Nagari Consultative Board is institution which serves as the embodiment of democracy in nagari governance as an element of nagari governance as an element of nagari administration (Provincial Regulation of West Sumatera No. 2 Year 2007).*
 10. *Topography is the state of the earth in a certain area or region.*
 - a. *Slope/Peak is part of the mount/mountain/hill which lies between the peak to the valley. Slope is include the ridge and the peak (the highest of mountain).*
 - b. *Valley is a low area between two mounts/mountains or area that have a position lower than the surrounding areas. Valley in*

kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Lembah di daerah pegunungan lipatan sering disebut sinklin. Lembah di daerah pegunungan patahan disebut graben atau slenk. Sedangkan lembah di daerah yang bergunung-gunung disebut lembah antar pegunungan.

- c. Dataran adalah bagian atau sisi bidang tanah yang tampak datar, rata, dan membentang.

11. Desa Tepi Laut adalah desa yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang.

12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

13. Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan, dibedakan menjadi:

- a. Di Dalam Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya terletak di tengah/dikelilingi hutan.
- b. Di Tepi/Sekitar Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan, atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam hutan.
- c. Di Luar Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan hutan.

mountainous area is often called syncline. Valley in a mountainous area is called graben fault or slenk. While the valley in the mountainous area is called the valley between the mountains.

- c. *Flat is a part or side of parcels of land that looked plane, flat, and stretches.*

11. *Coastal Village is a village which some areas are intersect/directly adjacent to the sea, either gently sloping/flat beach or cliffs/reef.*

12. *Forest is the unit of ecosystem in the form of lands comprising biological resources that are dominated by trees in their natural environment that can not be separated (Law No. 41 Year 1999).*

13. *Village Location of the Forest Area, divided into:*

- a. *Inside the Forest Area is the village/sub-district whose all territory is located in the middle or surrounded by forests.*
- b. *Around the Forest Area is the village/sub-district whose territory is adjacent to forest areas or parts of villages located in forest.*
- c. *Outside the Forest Area is the village/sub-district whose territory is not directly adjacent to the forest.*

TABEL : 01.1 **BANYAKNYA WILAYAH ADMINISTRASI**
PEMERINTAHAN DI PROVINSI JAMBI
TABLE : 01.1 **NUMBER OF GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE**
REGIONS IN JAMBI PROVINCE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kecamatan <i>District</i>	Desa/Kelurahan <i>Village / Sub-District</i>
(1)	(2)	(3)
Kerinci	16	287
Merangin	24	215
Sarolangun	10	158
Batang Hari	8	124
Muaro Jambi	11	155
Tanjung Jabung Timur	11	93
Tanjung Jabung Barat	13	134
Tebo	12	112
Bungo	17	153
Kota Jambi	11	62
Kota Sungai Penuh	8	69
JAMBI	141	1 562

TABEL : 01.2 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN, 2011-2018
TABLE : 01.2 NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS, 2011-2018

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tahun/ <i>Year</i>		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	208	287	287
Merangin	212	215	215
Sarolangun	142	158	158
Batang Hari	113	113	124
Muaro Jambi	151	155	155
Tanjung Jabung Timur	93	93	93
Tanjung Jabung Barat	70	134	134
Tebo	106	112	112
Bungo	146	153	153
Kota Jambi	62	62	62
Kota Sungai Penuh	69	69	69
JAMBI	1 372	1 551	1 562

TABEL : 01. 3 **BANYAKNYA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERENDAH**
TABLE : 01. 3 **MENURUT KLASIFIKASI PEMERINTAHAN**
NUMBER OF THE LOWEST GOVERNMENTAL ADMINISTRATIVE REGIONS
BY GOVERNMENTAL CLASSIFICATION

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Desa <i>Village</i>	Kelurahan <i>Sub-District</i>	UPT/SPT <i>Transmigration Settlement Unit/ Entity of Transmigration Settlement</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	285	2	-	287
Merangin	205	10	-	215
Sarolangun	149	9	-	158
Batang Hari	110	14	-	124
Muaro Jambi	150	5	-	155
Tanjung Jabung Timur	73	20	-	93
Tanjung Jabung Barat	114	20	-	134
Tebo	107	5	-	112
Bungo	141	12	-	153
Kota Jambi	-	62	-	62
Kota Sungai Penuh	65	4	-	69
JAMBI	1 399	163	-	1 562

TABEL
TABEL : 01.4 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN KANTOR KEPALA DESA/LURAH**
NUMBER OF VILLAGES/SUB-DISTRICTS BY PRESENCE OF VILLAGE/SUB-DISTRICT HEAD OFFICE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Keberadaan Kantor Kepala Desa / <i>The Village Head Office Presence</i>				Jumlah <i>Total</i>
	Di Dalam Wilayah Desa <i>Inside The Village</i>	Di Luar Wilayah Desa <i>Outside The Village</i>	Tidak Ada Kantor <i>No Office</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	
Kerinci	255	2	28	285	
Merangin	205	-	-	205	
Sarolangun	149	-	-	149	
Batang Hari	106	1	3	110	
Muaro Jambi	150	-	-	150	
Tanjung Jabung Timur	73	-	-	73	
Tanjung Jabung Barat	113	1	-	114	
Tebo	107	-	-	107	
Bungo	141	-	-	141	
Kota Jambi	-	-	-	-	
Kota Sungai Penuh	65	-	-	65	
JAMBI	1 364	4	31	1 399	

TABEL
TABLE : 01.4 (Sambungan - Continuation)

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Keberadaan Kantor Lurah / <i>The Sub-District Office Presence</i>			Jumlah <i>Total</i>
	Di Dalam Wilayah Kelurahan <i>Inside The Sub-District</i>	Di Luar Wilayah Kelurahan <i>Outside The Sub-District</i>	Tidak Ada Kantor <i>No Office</i>	
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kerinci	2	-	-	2
Merangin	10	-	-	10
Sarolangun	9	-	-	9
Batang Hari	14	-	-	14
Muaro Jambi	5	-	-	5
Tanjung Jabung Timur	20	-	-	20
Tanjung Jabung Barat	20	-	-	20
Tebo	5	-	-	5
Bungo	12	-	-	12
Kota Jambi	61	1	-	62
Kota Sungai Penuh	4	-	-	4
JAMBI	162	1	-	163

TABEL
TABLE : 01.5

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEPEMILIKAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA/LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN**
NUMBER OF VILLAGES/SUB-DISTRICTS BY VILLAGE CONSULTATIVE
BOARD/SUB-DISTRICT CONSULTATIVE BOARD OWNERSHIP

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Badan Permusyawaratan Desa <i>Village Consultative Board</i>		Lembaga Musyawarah Kelurahan <i>Sub-District Consultative Board</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	285	-	2	-	287
Merangin	205	-	3	7	215
Sarolangun	149	-	7	2	158
Batang Hari	110	-	8	6	124
Muaro Jambi	150	-	1	4	155
Tanjung Jabung Timur	73	-	7	13	93
Tanjung Jabung Barat	114	-	9	11	134
Tebo	107	-	2	3	112
Bungo	141	-	12	-	153
Kota Jambi	-	-	62	-	62
Kota Sungai Penuh	65	-	3	1	69
JAMBI	1 399	-	116	47	1 562

TABEL : 01.6 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT TOPOGRAFI WILAYAH**
TABLE : 01.6 **NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY TOPOGRAPHY OF AREA**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Lereng/Puncak <i>Slope/Peak</i>	Lembah <i>Valley</i>	Dataran <i>Flat</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	57	26	204	287
Merangin	21	19	175	215
Sarolangun	29	-	129	158
Batang Hari	-	-	124	124
Muaro Jambi	-	-	155	155
Tanjung Jabung Timur	-	-	93	93
Tanjung Jabung Barat	-	-	134	134
Tebo	-	-	112	112
Bungo	-	-	153	153
Kota Jambi	-	-	62	62
Kota Sungai Penuh	6	1	62	69
JAMBI	113	46	1 403	1 562

TABEL : 01.7 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT LOKASI DESA TERHADAP LAUT
NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY LOCATION OF VILLAGE TOWARD THE SEA

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tepi Laut <i>Coastal Area</i>	Bukan Tepi Laut <i>Non-Coastal Area</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	-	287	287
Merangin	-	215	215
Sarolangun	-	158	158
Batang Hari	-	124	124
Muaro Jambi	-	155	155
Tanjung Jabung Timur	25	68	93
Tanjung Jabung Barat	3	131	134
Tebo	-	112	112
Bungo	-	153	153
Kota Jambi	-	62	62
Kota Sungai Penuh	-	69	69
JAMBI	28	1 534	1 562

TABEL : 01.8 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT LOKASI DESA TERHADAP KAWASAN HUTAN DAN KEBERADAAN TANAMAN MANGROVE**
TABLE : 01.8 **NUMBER OF VILLAGES / SUB-DISTRICTS BY VILLAGE LOCATION TO FOREST AREA AND AVAILABILITY OF MANGROVE**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Lokasi Desa/Kelurahan Village/Sub-District Location			Jumlah Total	Keberadaan Tanaman Mangrove Availability of Mangrove
	Dalam Hutan Inside Forest Area	Tepi/Sekitar Hutan Edge/Around Forest Area	Luar Hutan Outside Forest Area		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	4	76	207	287	-
Merangin	1	53	161	215	-
Sarolangun	-	63	95	158	-
Batang Hari	1	14	109	124	-
Muaro Jambi	-	11	144	155	-
Tanjung Jabung Timur	-	19	74	93	20
Tanjung Jabung Barat	3	41	90	134	3
Tebo	-	10	102	112	-
Bungo	-	4	149	153	-
Kota Jambi	-	-	62	62	-
Kota Sungai Penuh	-	4	65	69	-
JAMBI	9	295	1 258	1 562	23

<https://jambi.bps.go.id>

2

KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

DEMOGRAPHY AND EMPLOYMENT



<https://jambi.bps.go.id>

Penjelasan Teknis Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1. Penduduk desa/kelurahan yang dicatat pada Podes 2018 adalah jumlah penduduk yang tercatat pada buku administrasi kependudukan desa/kelurahan berdasarkan laporan desa/kelurahan atau banyaknya penduduk desa/kelurahan yang diketahui oleh aparat desa/kelurahan. Referensi waktu pencatatan adalah kondisi Desember 2017.
2. Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk adalah lapangan usaha sebagian besar penduduk desa/kelurahan memperoleh penghasilan/pendapatan. Sumber penghasilan penduduk meliputi:
 - a. Sektor Pertanian adalah lapangan usaha yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan jasa pertanian.
 - b. Sektor Pertambangan dan Penggalian adalah lapangan usaha di bidang pertambangan dan penggalian antara lain: pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, biji logam, penggalian batu-batuan, tanah liat, pasir, garam, mineral bahan kimia dan bahan pupuk, penambangan gips, aspal, dan sebagainya.
 - c. Sektor Industri Pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar (barang mentah) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan atau barang lain yang memiliki nilai lebih tinggi.

Technical Notes Demography and Employment

1. *The village/sub-district population recorded in Podes 2018 is the total population recorded in the village / sub-district population administration book based on the village / sub-district report or the number of village / sub-district residents acknowledged or recorded by village / sub-district officials. Reference time for the recording is the condition of December 2017.*
2. *Main Income Source of the Majority of Population is field of business where most residents earn revenue/income, main income population including:*
 - a. *Agriculture Sector is field of business which include food crops, horticulture, plantation, animal husbandry, forestry, fisheries, and agricultural services.*
 - b. *Mining and Quarrying Sector is field of business in mining and quarrying, among others: mining of coal, oil and gas or metal ore, quarrying of stone, clay, sand, salt or minerals of chemicals and fertilizers, mining of gypsum, asphalt, etc.*
 - c. *Manufacture Sector is an economic activity that changes the basic goods (raw materials) into semi-finished goods or finished goods, and or other items that have higher values.*

- d. Sektor Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan adalah kegiatan jual beli barang (baru/bekas), termasuk usaha restoran, rumah makan dan minuman, katering, restorasi, kafetaria, kantin, warung, dan sebagainya.
- e. Sektor Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, meliputi:
- i. Angkutan adalah kegiatan usaha penyediaan sarana angkutan penumpang atau barang/ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan sistem berjadwal, baik melalui darat, air maupun udara.
 - ii. Pergudangan adalah kegiatan usaha penyimpanan barang-barang sementara (bukan stok) sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial.
 - iii. Komunikasi adalah kegiatan usaha telekomunikasi, penyajian penerbitan, pos, dan giro.
- f. Sektor Jasa adalah kegiatan layanan atau penyediaan jasa, meliputi: pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, serta pemerintahan dan perorangan.
- g. Sektor Lainnya adalah kegiatan usaha yang bidang usaha atau sektornya tidak termasuk pada rincian di atas, seperti air, gas, listrik, konstruksi/bangunan, perbankan, dan sebagainya.
3. Jenis Komoditi/Subsektor Pertanian, meliputi:
- a. Palawija terdiri dari: jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, talas, dan sebagainya.
 - b. Hortikultura adalah kegiatan pertanian tanaman hortikultura meliputi buah-buahan, sayuran, tanaman hi-
- d. *Sector of Trade/Retail and Restaurant are the activity of selling goods (new/used), including the business of restaurant, food and beverage, catering, lounges, cafeterias, canteens, cafes, etc.*
- e. *Sector of Transportation, Warehousing, and Communication, include:*
- i. *Transportation is a business activity in providing transportation facilities of passengers or goods/livestock from one place to another with a scheduled system, either by land, water, or air.*
 - ii. *Warehousing is a business activity in storing the temporary goods (not stock) before the goods are delivered to its final destination with commercial purposes.*
 - iii. *Communication is a business activities in telecommunications, the presentation of publications, postal, and giro.*
- f. *Sector of Services is a service activity or the provision of services, include: education, health, civic, and government and individuals.*
- g. *Sector of Others is a business activity that the business areas or sectors are not classified in a specific sector, such as: water, gas, electricity, construction, banking, etc.*
3. *The Type of Commodity/ Agriculture Subsector, includes:*
- a. *Secondary Crops, include: corn, soybeans, peanuts, green beans, cassava, sweet potato, taro, etc.*
 - b. *Horticulture is the agriculture activities of horticulture plants, include: fruits, vegetables, ornamental plants, and medicinal*

- as, dan tanaman obat-obatan.
- c. Peternakan adalah kegiatan peternakan yang mencakup baik ternak besar (sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain), ternak kecil (kambing, domba, babi, kelinci, dan lain-lain), maupun unggas (ayam, itik, burung, dan lain-lain). Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti telur, susu, madu, bulu, dan sebagainya.
 - d. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk menangkap dan mengumpulkan ikan (pisces) ataupun biota laut lain (misalnya rumput laut, mollusca, udang-udangan) yang hidup secara alamiah dengan alat ataupun cara apapun.
 - e. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan atau biota perairan laut lain (misalnya rumput laut) serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Termasuk kegiatan memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangan-gani, mengolah, dan atau mengawet-kan ikan atau biota perairan lain.
 - f. Budi Daya Tanaman Kehutanan adalah kegiatan kehutanan yang meng-hasilkan produk tanaman kehutan-an (kayu, daun, getah, dan lain-lain) termasuk usaha pembibitan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas resiko usaha.
 - g. Pemungutan Hasil Hutan adalah ke-giatan mengambil benda-benda haya-ti hutan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atas resiko usaha. Jenis hasil hutan yang biasa dipungut, seperti kayu bakar, bambu, rotan, buah-buahan, jamur, lumut, madu, sarang burung,
- plants.*
- c. *Animal Husbandry is the Animal Hus-bandry activities, include: large livestock (cattles, buffaloes, horses, etc.), small live-stock (goats, sheeps, pigs, rabbits, etc.), and poultry (chickens, ducks, birds, etc.). Includ-ing the cultivation of animal to take the results such as: eg gs, milk, honey, feathers, etc.*
 - d. *Caught Fisbery is the business activities to capture and collect the fish or other marine biota (i.e. seaweed, mollusk, crustaceans) that live naturally with tools or in any way.*
 - e. *Cultivated Fisbery is the business activities in maintaining, raising, and or breeding the fish or other aquatic biota as well as harvest-ing the results in a controlled environment. Including business activities in transporting, storing, cooling, handling, processing , and or preserving the fish or other aquatic biota.*
 - f. *Forest Crops Cultivation/Forest Farm-ing is an activity to cultivate of forest crop products (logs, woods, leaves, sap, etc.) in-cluding the crop breeding. The products then are wholly or partially sold or exchanged on business risk basis.*
 - g. *Forest Product Collection is activity to take forest biological objects, with the purpose to be partially or wholly sold or exchanged on business risk basis. Some examples of the products are fire-wood, bamboo, rattan, fruits, mushrooms, milden, honey, birdnest, egg, bird waste, and others.*

- telur, kotoran burung, dan lain-lain.
- h. Penangkapan Satwa Liar adalah kegiatan yang meliputi perburuan binatang, seperti berburu babi hutan, rusa, dan sebagainya, dengan menggunakan perlengkapan, seperti senapan, panah, dan tombak.
 - i. Penangkapan Satwa/Tumbuhan Liar adalah kegiatan perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran satwa/tumbuhan liar dengan tetap memperhatikan kemurnian jenisnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di dalam maupun di luar habitat dengan tujuan untuk kelestarian satwa/tumbuhan liar maupun komersil, seperti arwana, anggrek, kera ekor panjang, buaya, dan lain-lain
 - j. Jasa Pertanian meliputi jasa penunjang produksi pertanian dan pasca panen seperti: pengelolaan bibit tanaman untuk pengembangbiakan, pembibitan tanaman hias, persewaan traktor, jasa penggilingan padi, dan sebagainya.
4. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
 5. Agen Pengerahan TKI ke Luar Negeri adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan mencari, merekrut, menampung, dan menyalurkan TKI untuk bekerja di luar negeri.
- b. *Wild Animal Capturing is an activity that includes animal-hunting such as hunting of wild boar, deer, and so on, by using capturing equipment such as rifles, arrows, and spears.*
 - i. *Wildlife Conserving is an activity to increase the wildlife/wildplants population through breeding and raising with the concern on purity of species. The activity may be carried out inside or outside of the habitat for preserving the wildlife/wildplant or for commercial purpose. Some commodities are arowana fish, orchids, long-tailed macaques, crocodiles, etc.*
 - j. *Agricultural Service is the business activities in providing the services of agricultural business support and postharvest agricultural production such as: managing plant seeds for breeding, nursery plants, leasing tractors, rice milling services, etc.*
4. *Indonesian Overseas Worker is an Indonesian citizen who are qualified for working abroad for a certain period to get the income (wages).*
 5. *Indonesian Migrant Worker Agent is a person or group of persons who perform activities of searching, recruiting, accomodating and channeling the Indonesian overseas workers or women overseas workers.*

TABEL : 02.1 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT SUMBER PENGHASILAN UTAMA SEBAGIAN BESAR PENDUDUK
TABLE : 02.1 NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY MAIN INCOME SOURCE OF THE MAJORITY OF POPULATION

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pertanian <i>Agriculture</i>	Pertam- bangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	Industri Pengolahan <i>Industry/ Manufacture</i>	Perdagangan Besar / Eceran <i>Trade/ Retail</i>	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi <i>Transportation, Warehousing, Communication</i>	Jasa <i>Service</i>	Lainnya <i>Others</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kerinci	282	-	1	2	-	1	1	287
Merangin	208	3	-	2	-	2	-	215
Sarolangun	150	3	-	5	-	-	-	158
Batang Hari	120	-	1	1	-	1	1	124
Muaro Jambi	141	-	4	5	-	5	-	155
Tanjung Jabung Timur	93	-	-	-	-	-	-	93
Tanjung Jabung Barat	128	1	1	4	-	-	-	134
Tebo	111	-	-	1	-	-	-	112
Bungo	144	-	-	7	-	2	-	153
Kota Jambi	5	-	3	18	-	35	1	62
Kota Sungai Penuh	48	-	1	16	-	4	-	69
JAMBI	1 430	7	11	61	-	50	3	1 562

TABEL : 02.2 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG SEBAGIAN BESAR PENDUDUKNYA BEKERJA PADA SEKTOR PERTANIAN MENURUT SUB SEKTOR
TABLE NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS THAT THE MAJORITY OF POPULATION WORK IN AGRICULTURAL SECTOR BY SUB-SECTOR

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Padi <i>Paddy</i>	Palawija <i>Secondary Crop</i>	Hortikultura <i>Horticultural</i>	Karet <i>Rubber</i>	Kelapa Sawit <i>Oil Palm</i>	Kopi <i>Coffee</i>	Kakao <i>Cacao</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kerinci	185	-	67	4	-	21	-
Merangin	7	-	-	120	45	36	-
Sarolangun	33	-	-	99	18	-	-
Batang Hari	5	1	-	84	30	-	-
Muaro Jambi	22	6	6	34	64	-	2
Tanjung Jabung Timur	5	-	2	2	44	-	-
Tanjung Jabung Barat	3	-	2	6	64	1	-
Tebo	1	-	-	90	20	-	-
Bungo	4	-	1	105	34	-	-
Kota Jambi	3	1	1	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	44	-	3	-	-	1	-
JAMBI	312	8	82	544	319	59	2

TABEL : 02.2 (Sambungan - Continuation)
 TABLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kelapa <i>Coconut</i>	Lada <i>Pepper</i>	Cengkeh <i>Clove</i>	Tembakau <i>Tobacco</i>	Tebu <i>Sugarcane</i>	Peternakan <i>Animal Husbandry</i>	Perikanan Tangkap <i>Caught Fishery</i>	Perikanan Budidaya <i>Cultivated Fishery</i>
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kerinci	-	-	-	-	1	-	-	-
Merangin	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarolangun	-	-	-	-	-	-	-	-
Batang Hari	-	-	-	-	-	-	-	-
Muaro Jambi	-	-	-	-	-	-	4	3
Tanjung Jabung Timur	35	-	-	-	-	-	5	-
Tanjung Jabung Barat	46	-	-	-	-	-	3	-
Tebo	-	-	-	-	-	-	-	-
Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	-	-	-	-
JAMBI	81	-	-	-	1	-	12	3

TABEL : 02.2 (Sambungan - Continuation)
 TABLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Budidaya Tanaman Kehutanan <i>Forest Crops Cultivation/ Forest Farming</i>	Pemungutan Hasil Hutan <i>Forest Product Collection</i>	Penangkapan Satwa Liar <i>Wild Animal Capturing</i>	Penangkaran satwa/ tumbuhan liar <i>Wildlife Conserving</i>	Jasa Pertanian <i>Agriculture Service</i>	Lainnya <i>Others</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Kerinci	-	-	-	-	4	-	282
Merangin	-	-	-	-	-	-	208
Sarolangun	-	-	-	-	-	-	150
Batang Hari	-	-	-	-	-	-	120
Muaro Jambi	-	-	-	-	-	-	141
Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-	-	-	93
Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-	3	128
Tebo	-	-	-	-	-	-	111
Bungo	-	-	-	-	-	-	144
Kota Jambi	-	-	-	-	-	-	5
Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	-	-	48
JAMBI	-	-	-	-	4	3	1 430

TABEL : 02.3 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN TENAGA KERJA INDONESIA DAN AGEN PENERAH TENAGA KERJA INDONESIA
TABLE NUMBER OF VILLAGES/SUB-DISTRICTS BY PRESENCE OF INDONESIAN OVERSEAS WORKER AND AGENT OF INDONESIAN OVERSEAS WORKER

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tenaga Kerja Indonesia <i>Indonesian Overseas Worker</i>		Agen Pengerahan TKI ke Luar Negeri <i>Indonesians Migrant Workers Agent</i>	
	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	214	52	17	270
Merangin	74	123	4	211
Sarolangun	47	95	3	155
Batang Hari	30	73	1	123
Muaro Jambi	22	115	-	155
Tanjung Jabung Timur	22	53	-	93
Tanjung Jabung Barat	32	84	3	131
Tebo	19	78	-	112
Bungo	28	102	-	153
Kota Jambi	10	37	-	62
Kota Sungai Penuh	49	12	5	64
JAMBI	547	824	33	1 529

<https://jambi.bps.go.id>

3

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

SETTLEMENT AND ENVIRONMENT



<https://jambi.bps.go.id>

Penjelasan Teknis Perumahan dan Lingkungan Hidup

1. Keluarga Pengguna Listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN.
2. Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat.
3. Keluarga Bukan Pengguna Listrik adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah.
4. Jalan Utama Desa adalah jalan yang dianggap oleh sebagian besar penduduk desa/kelurahan setempat sebagai jalan yang paling penting atau paling sering digunakan untuk arus transportasi dari/menjuu kantor camat terdekat.
5. Sumber Penerangan Jalan Utama adalah jenis penerangan dan sumber pembiayaan penerangan yang ada di jalan utama desa. Dikelompokkan menjadi: listrik diusahakan oleh pemerintah, listrik non-pemerintah, dan non-listrik.
6. Bahan Bakar adalah jenis bahan yang digunakan untuk memasak oleh mayoritas keluarga di desa/kelurahan.
7. Tempat Pembuangan Sampah mencakup

Technical Notes Settlement and Environment

1. Family of PLN (State Electricity Company) Electric Consumer is user family/customer of electricity supplied by State Electricity Company with or without official meter.
2. Family of Electric Consumer of NonState Electricity Company (Non-PLN) is user family/customer of electricity supplied besides by National Electricity Company, eg diesel/generator, power cultivated by the local government, private, and electricity based on community.
3. Non-Electricity Consuming Family is family that do not use electricity as a source of energy for home lighting.
4. Village Main Street is a street that is considered by the locals as the most important and the key transportation infrastructure from and to the nearest district office.
5. The Source of Main Street Illumination is the type of lighting and the source of financing of the existing lighting in the main street of the village. It's grouped into: state electricity, non-state electricity, and non-electric.
6. Fuel is the type of material that is used for cooking by the majority of families in village/sub-district.
7. Garbage Disposal Unit involves five things:

- up 5 kategori yaitu
- a. Tempat sampah yang kemudian diangkut;
 - b. Dikumpulkan dalam lubang kemudian dibakar;
 - c. Dibuang di sungai/saluran irigasi/danau/laut;
 - d. Dibuang di drainase (got/selokan)
 - e. Lainnya (misalnya dikumpulkan kemudian dipakai sebagai bahan pembuatan kompos, d.s.b).
- a. *Disposed in garbage pail then carried away;*
 - b. *Gathered in pool then burned/buried;*
 - c. *Disposed in rivers/irrigation channels/lake/seas*
 - d. *Disposed in drainage (sewer/drain);*
 - e. *Others, e.g. garbage is dumped then using as composting material.*
8. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) adalah tempat atau lahan yang digunakan sebagai penampungan pembuangan sampah yang bersifat sementara sebelum diangkut ke tempat perdauran ulang, pengolahan atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 9. Sungai adalah tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai yang dimaksud di sini termasuk anak sungai, kanal, dan sodetan (Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011).
 10. Embung adalah bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering.
 11. Mata air adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya (alami).
 12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen
8. *Temporary Garbage Disposal Unit (TPS) is a place or land used as a temporary garbage disposal unit before the garbage being transported to the recycling unit, processing garbage unit, or integrated garbage dump.*
 9. *River is the place, container, and water networks that are formed naturally or artificially starts from upstream to with bounded right and left by the demarcation line. River is here including creeks, canals, and sodetan (Governmental Regulation No. 38 Year 2011).*
 10. *Embung is a particular building that accommodates excess of water in the rainy season as water supply in a village for the dry season.*
 11. *Spring is a surface water source where water naturally flows out from the ground.*
 12. *Environmental Pollution is the inclusion of living things, substances, energy, and other components into the environment by human activities*

lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam satu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara.

13. Penggalian Golongan C adalah kegiatan penggalian pada wilayah permukaan bumi yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Bahan-bahan galian golongan C (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980) antara lain:
- a. Nitrat, phosphate, garam batu (halite);
 - b. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
 - c. Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;
 - d. Batu permata, batu setengah permata;
 - e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;
 - f. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
 - g. Marmer, batu tulis;
 - h. Batu kapur, dolomite, kalsit;
 - i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A dan golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

so that it surpasses the established environmental quality standards. Environmental quality standard is the size of the limit or the level of living things, substances, energy, or components that exist or must exist and or pollutant elements tolerated in a particular resource as an element of the environment. Environmental pollution can be divided into water pollution, land pollution, and air pollution.

13. *C-Class Mining is the quarrying activity on Earth's surface area that could potentially damage the environment. Excavated materials class C (Regulation of Government No. 27 Year 1980) include:*
- a. Nitrate, phosphate, rock salt (halite);*
 - b. Asbestos, talc, mica, graphite, magnesite;*
 - c. Yarosit, leusit, alum (natural), ocher;*
 - d. Gemstones, half gem stones;*
 - e. Quartz sand, kaolin, feldspar, gypsum, bentonite;*
 - f. Pumice, tras, obsidian, perlite, diatomaceous earth, soil absorption (Fullers earth);*
 - g. Marble, slate;*
 - h. Limestone, dolomite, calcite;*
 - i. Granite, andesite, basalt, trakhit, clay, and sand does not contain all the mineral elements of class A and class B in a significant amount in terms of mining economy.*

<https://jambi.bps.go.id>

TABEL : 03.1
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN KELUARGA PENGGUNA LISTRIK DAN SUMBER PENERANGAN JALAN UTAMA DESA
NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY PRESENCE OF FAMILY OF ELECTRIC CONSUMER AND SOURCE OF MAIN STREET ILLUMINATION

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pengguna Listrik Electric Consumer		Bukan Pengguna Listrik ¹ Non Electricity Consuming Family ¹	Sumber Penerangan Jalan Utama The Source of Main Street Illumination		
	PLN State Electricity Company	Non PLN Non- State Electricity Company		Listrik Pemerintah State Electricity	Listrik Non Pemerintah Non-State Electricity	Non Listrik Non Electric
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	282	22	87	138	46	-
Merangin	175	73	98	108	30	-
Sarolangun	136	49	78	63	41	-
Batang Hari	123	62	58	89	4	-
Muaro Jambi	154	56	59	114	19	-
Tanjung Jabung Timur	86	44	65	20	27	-
Tanjung Jabung Barat	112	78	75	41	37	-
Tebo	111	37	82	83	19	-
Bungo	153	30	82	105	31	-
Kota Jambi	62	-	7	62	-	-
Kota Sungai Penuh	68	2	13	67	1	-
JAMBI	1 462	453	704	890	255	-

Catatan / Note: ¹ Mencakup desa/kelurahan yang sama sekali tidak ada keluarga pengguna listrik atau yang terdapat keluarga pengguna listrik, namun di wilayah tersebut masih ada keluarga bukan pengguna listrik. / ¹ Includes villages/sub-districts with no family of electricity consumers or there are families of electricity consumers, but in those areas there are still families not consuming electricity.

TABEL : 03.2 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS BAHAN BAKAR UNTUK MEMASAK YANG DIGUNAKAN OLEH SEBAGIAN BESAR KELUARGA DAN KEBERADAAN AGEN/PENJUAL BAHAN BAKAR
 NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY TYPE OF COOKING FUEL USED BY MAJORITY OF FAMILIES AND AVAILABILITY OF AGENT/SELLER OF FUEL.

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jenis Bahan Bakar <i>Types of Cooking Fuel</i>						Agen/Penjual Bahan Bakar <i>Agent/Seller of Cooking Fuel</i>			
	Gas Kota <i>Municipality Gas</i>	LPG 3kg <i>3kg-LPG</i>	LPG lebih dari 3kg <i>More than 3kg LPG</i>	Minyak Tanah <i>Kerosene</i>	Kayu Bakar <i>Firewood</i>	Lainnya <i>Others</i>	Jumlah <i>Total</i>	LPG <i>LPG</i>	Minyak Tanah <i>Kerosene</i>	Tidak ada <i>Not Available</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kerinci	-	139	64	18	66	-	287	257	146	15
Merangin	-	110	30	3	72	-	215	189	109	17
Sarolangun	-	110	33	-	15	-	158	154	29	4
Batang Hari	-	117	5	-	2	-	124	124	18	-
Muaro Jambi	-	122	32	-	1	-	155	155	77	-
Tanjung Jabung Timur	-	91	-	-	1	1	93	93	31	-
Tanjung Jabung Barat	-	133	-	-	1	-	134	134	20	-
Tebo	-	92	-	-	20	-	112	108	33	4
Bungo	-	95	34	-	24	-	153	152	94	1
Kota Jambi	2	45	15	-	-	-	62	62	12	-
Kota Sungai Penuh	-	24	11	27	7	-	69	61	63	1
JAMBI	2	1 078	224	48	209	1	1 562	1 489	632	42

TABEL : 03.3 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DAN KETERSEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH**
TABLE : 03.3 **NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY TYPE OF GARBAGE DISPOSAL UNIT AND AVAILABILITY OF TEMPORARY GARBAGE DISPOSAL UNIT**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jenis Tempat Pembuangan Sampah <i>Type of Garbage Disposal Unit</i>					Jumlah <i>Total</i>	Ketersediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara <i>The Availability of Temporary Garbage Disposal Unit</i>
	Tempat Sampah Kemudian Diangkut <i>Garbage Pail and Carried Away</i>	Dalam Lubang/ Dibakar <i>Throw Away to the Pool/Burned</i>	Sungai/ Saluran Irigasi/ Danau/Laut <i>River/ Irrigation Channel/</i>	Drainase <i>Drainage</i>	Lainnya <i>Others</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kerinci	35	100	138	3	11	287	53
Merangin	13	147	45	-	10	215	21
Sarolangun	7	121	30	-	-	158	28
Batang Hari	7	95	20	-	2	124	22
Muaro Jambi	6	133	16	-	-	155	13
Tanjung Jabung Timur	1	60	30	-	2	93	8
Tanjung Jabung Barat	14	104	14	-	2	134	16
Tebo	3	92	17	-	-	112	12
Bungo	17	108	28	-	-	153	30
Kota Jambi	62	-	-	-	-	62	60
Kota Sungai Penuh	52	5	11	-	1	69	21
JAMBI	217	965	349	3	28	1 562	284

TABEL : 03.4 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT SUMBER AIR MINUM SEBAGIAN BESAR KELUARGA**
TABLE : 03.4 **NUMBER OF VILLAGES / SUB-DISTRICTS BY SOURCES OF DRINKING WATER OF MAJORITY OF THE FAMILIES**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Air Kemasan Bermerk <i>Branded Bottled Water</i>	Air Isi Ulang <i>Refill Water</i>	Ledeng dengan meteran <i>Bottled Water/ Tap Water</i>	Ledeng tanpa meteran <i>Electric/ Hand Pump</i>	Sumur bor atau pompa <i>Borehole/ Tube Well</i>	Sumur <i>Well</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	-	86	99	26	1	16
Merangin	-	18	13	-	-	115
Sarolangun	-	13	8	-	2	103
Batang Hari	-	7	13	-	4	100
Muaro Jambi	-	42	8	-	2	103
Tanjung Jabung Timur	-	20	-	-	-	7
Tanjung Jabung Barat	-	33	1	-	11	17
Tebo	-	5	4	-	12	87
Bungo	-	16	6	-	11	110
Kota Jambi	1	10	42	-	2	7
Kota Sungai Penuh	-	16	45	1	-	5
JAMBI	1	266	239	27	45	670

TABEL : 03.4 (Sambungan - *Continuation*)
TABLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Mata Air <i>Spring</i>	Sungai/Danau/Kolam/ Waduk/Situ/Embung/ Bendungan <i>River/Lake/Pool/Reservoir/ Dam</i>	Air Hujan <i>Rain-water</i>	Lainnya <i>Others</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kerinci	41	18	-	-	287
Merangin	39	30	-	-	215
Sarolangun	12	20	-	-	158
Batang Hari	-	-	-	-	124
Muaro Jambi	-	-	-	-	155
Tanjung Jabung Timur	-	-	66	-	93
Tanjung Jabung Barat	-	2	70	-	134
Tebo	-	4	-	-	112
Bungo	-	10	-	-	153
Kota Jambi	-	-	-	-	62
Kota Sungai Penuh	-	2	-	-	69
JAMBI	92	86	136	-	1 562

TABEL : 03.5
TABEL **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT PENGGUNAAN**
TABLE **FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR SEBAGIAN BESAR**
KELUARGA
NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY TOILET FACILITY
USAGE OF MAJORITY OF FAMILIES

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jamban <i>Toilet</i>			Bukan Jamban <i>Non-Toilet</i>	Jumlah <i>Total</i>
	Sendiri <i>Private</i>	Bersama <i>Shared</i>	Umum <i>Public</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	247	16	6	18	287
Merangin	175	7	6	27	215
Sarolangun	133	-	-	25	158
Batang Hari	110	-	13	1	124
Muaro Jambi	147	-	-	8	155
Tanjung Jabung Timur	93	-	-	-	93
Tanjung Jabung Barat	123	1	1	9	134
Tebo	107	3	2	-	112
Bungo	125	-	12	16	153
Kota Jambi	62	-	-	-	62
Kota Sungai Penuh	67	-	-	2	69
JAMBI	1 389	27	40	106	1 562

TABEL : 03.6
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN SUNGAI, SALURAN IRIGASI, DANAU/WADUK/SITU/BENDUNGAN, EMBUNG, DAN MATA AIR
TABLE NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY OF RIVER, IRRIGATION CHANNEL, LAKE/DAM/RESERVOIR, EMBUNG, AND SPRING

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sungai River	Saluran Irigasi Irrigation Channel	Danau/Waduk/Situ/ Bendungan Lake/Dam/Reservoir	Embung Embung	Mata Air Spring
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	227	184	30	20	132
Merangin	205	67	28	14	86
Sarolangun	149	52	16	10	46
Batang Hari	107	7	6	4	7
Muaro Jambi	123	5	2	13	22
Tanjung Jabung Timur	77	50	-	-	10
Tanjung Jabung Barat	111	9	4	5	16
Tebo	105	7	8	6	11
Bungo	142	46	17	18	37
Kota Jambi	41	-	2	-	5
Kota Sungai Penuh	53	39	-	1	15
JAMBI	1 340	466	113	91	387

TABEL : 03.7 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG DILALUI SALURAN IRIGASI**
MENURUT JENIS PENGGUNAAN SALURAN IRIGASI
NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS ARE TRAVERSED BY IRRIGATION
CHANNEL BY USAGE OF IRRIGATION CHANNEL

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Mandi/ Cuci <i>Bathing/ Washing</i>	Minum/ Masak <i>Drinking/ Cooking</i>	Bahan Baku Air Minum <i>Drinking Water Source</i>	Pengairan/ Irigasi <i>Irrigation</i>	Pariwisata <i>Tourism</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	25	2	8	166	1
Merangin	12	-	-	60	1
Sarolangun	8	-	-	45	-
Batang Hari	-	-	-	6	-
Muaro Jambi	-	-	-	5	-
Tanjung Jabung Timur	34	1	1	41	-
Tanjung Jabung Barat	3	-	-	7	-
Tebo	2	-	-	7	-
Bungo	18	5	1	44	-
Kota Jambi	-	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	1	1	1	35	-
JAMBI	103	9	11	416	2

TABEL : 03.7 (Sambungan - Continuation)
TABLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Perikanan <i>Fisbery</i>	Transportasi <i>Transportation</i>	Pembangkit Listrik <i>Electric Power Plant</i>	Tidak Dimanfaatkan <i>Not Used</i>
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kerinci	24	-	-	10
Merangin	1	-	-	3
Sarolangun	-	-	-	7
Batang Hari	2	-	-	1
Muaro Jambi	1	-	-	-
Tanjung Jabung Timur	17	15	-	1
Tanjung Jabung Barat	2	-	-	1
Tebo	1	-	-	-
Bungo	11	-	-	1
Kota Jambi	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	3	-	-	4
JAMBI	62	15	-	28

TABEL : 03.8 BANYAKNYA DESA¹/KELURAHAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN EMBUNG
TABLE NUMBER OF VILLAGES¹ /SUB-DISTRICTS BY USAGE OF OF EMBUNG

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Mandi/ Cuci <i>Bathing/ Washing</i>	Minum/ Masak <i>Drinking/ Cooking</i>	Bahan baku air minum <i>Drinking Water Source</i>	Pengairan/ Irigasi <i>Irrigation</i>	Pariwisata <i>Tourism</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	8	7	10	5	2
Merangin	2	2	-	6	2
Sarolangun	-	-	-	6	-
Batang Hari	-	-	-	1	-
Muaro Jambi	4	1	1	3	-
Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-	-
Tanjung Jabung Barat	2	1	1	1	1
Tebo	1	1	1	3	-
Bungo	6	1	1	1	1
Kota Jambi	-	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	1	1	-	-	-
JAMBI	24	14	14	26	6

Catatan / Note: ¹ Desa (termasuk nagari, UPT, dan SPT) yang ada embung. / ¹ Villages (includes nagari, Transmigration Settlement Unit, and Entity of Transmigration Settlement) with embung.

TABEL : 03.8 (Sambungan - *Continuation*)
TABLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Perikanan <i>Fisbery</i>	Pembangkit Listrik <i>Electric Power Plant</i>	Industri/ Pabrik <i>Industries/ Manufactories</i>	Lainnya <i>Others</i>	Tidak Dimanfaatkan <i>Not Used</i>
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kerinci	4	-	-	-	1
Merangin	4	-	-	1	2
Sarolangun	-	-	-	-	4
Batang Hari	-	-	-	-	3
Muaro Jambi	1	-	-	1	6
Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-	-
Tanjung Jabung Barat	2	-	-	1	1
Tebo	-	-	-	-	2
Bungo	2	-	-	6	3
Kota Jambi	-	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	-
JAMBI	13	-	-	9	22

TABEL : 03.9
TABLE : 03.9

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MEMPUNYAI SUNGAI MENURUT
KEBERADAAN PABRIK/INDUSTRI/RUMAH TANGGA/LAINNYA YANG
MEMBUANG LIMBAH KE SUNGAI**
**NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS WITH RIVER BY AVAILABILITY OF
MANUFACTORIES/INDUSTRIES/HOUSEHOLD/OTHERS THAT WASTE DISPOSAL
INTO RIVER**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Desa yang Mempunyai Sungai <i>Village with River</i>	Pabrik/Industri/Rumah Tangga/Lainnya Membuang Limbah Ke Sungai <i>Manufactories/Industries/Household/Others that Waste Disposal Into River</i>			Jumlah <i>Total</i>
		Di Dalam Desa/ Kelurahan <i>Inside The Village/ Sub-District</i>	Di Luar Desa/Kelurahan <i>Outside The Village/ Sub-District</i>	Di Dalam dan Luar Desa/Kelurahan <i>Inside and Outside The Village/ Sub-District</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	227	25	28	59	112
Merangin	205	20	56	35	111
Sarolangun	149	13	43	30	86
Batang Hari	107	11	30	15	56
Muaro Jambi	123	13	10	8	31
Tanjung Jabung Timur	77	1	-	7	8
Tanjung Jabung Barat	111	9	14	6	29
Tebo	105	27	21	28	76
Bungo	142	15	30	9	54
Kota Jambi	41	3	1	1	5
Kota Sungai Penuh	53	7	8	23	38
JAMBI	1 340	144	241	221	606

TABEL : 03.10 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**
TABLE : 03.10 **NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY TYPE OF ENVIRONMENTAL POLLUTION**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Pencemaran Air <i>Water Pollution</i>	Pencemaran Tanah <i>Land Pollution</i>	Pencemaran Udara <i>Air Pollution</i>	Tidak Ada Pencemaran <i>No Pollution</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	115	-	26	169
Merangin	111	3	14	99
Sarolangun	86	7	-	72
Batang Hari	56	9	15	57
Muaro Jambi	33	4	24	110
Tanjung Jabung Timur	9	-	2	83
Tanjung Jabung Barat	30	4	25	91
Tebo	76	1	26	30
Bungo	54	-	14	97
Kota Jambi	5	1	2	56
Kota Sungai Penuh	39	1	5	27
JAMBI	614	30	153	891

TABEL : 03.11 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS DAN SUMBER UTAMA**
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY TYPE AND MAIN SOURCE OF
ENVIRONMENTAL POLLUTION

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sumber Pencemaran Air <i>The Source of Water Pollution</i>			Sumber Pencemaran Tanah <i>The Source of Land Pollution</i>			Sumber Pencemaran Udara <i>The Source of Air Pollution</i>		
	Rumah Tangga Domestic Waste	Pabrik Factory	Lainnya Others	Rumah Tangga Domestic Waste	Pabrik Factory	Lainnya Others	Rumah Tangga Domestic Waste	Pabrik Factory	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kerinci	81	27	7	-	-	-	1	4	21
Merangin	6	105	-	-	1	2	-	4	10
Sarolangun	9	77	-	-	7	-	-	-	-
Batang Hari	5	43	8	7	2	-	3	9	3
Muaro Jambi	9	22	2	-	4	-	-	18	6
Tanjung Jabung Timur	7	2	-	-	-	-	-	1	1
Tanjung Jabung Barat	10	20	-	3	1	-	-	16	9
Tebo	8	68	-	-	-	1	1	10	15
Bungo	3	27	24	-	-	-	-	11	3
Kota Jambi	1	4	-	-	1	-	-	2	-
Kota Sungai Penuh	33	6	-	1	-	-	1	2	2
JAMBI	172	401	41	11	16	3	6	77	70

TABEL : 03.12 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEGIATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH
TABLE : 03.12 NUMBER VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY ACTIVITY ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND PROCESSING WASTE

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pelestarian Lingkungan ¹ <i>Environmental Conservation¹</i>		Pengolahan/Daur Ulang Sampah/Limbah <i>Processing/Recycling Waste</i>	
	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	43	244	21	266
Merangin	21	194	17	198
Sarolangun	12	146	13	145
Batang Hari	21	103	15	109
Muaro Jambi	17	138	17	138
Tanjung Jabung Timur	26	67	12	81
Tanjung Jabung Barat	20	114	26	108
Tebo	11	101	11	101
Bungo	18	135	33	120
Kota Jambi	11	51	11	51
Kota Sungai Penuh	13	56	6	63
JAMBI	213	1 349	182	1 380

Catatan / Note: ¹ Pelestarian lingkungan yang dimaksud dapat berupa penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove dsj. / ¹ *Environmental conservation in question can be the planting/maintenance of trees on critical land, mmangrove planting, etc.*

TABEL : 03.13
TABEL : 03.13 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBIASAAN MASYARAKAT MEMBAKAR LADANG/ KEBUN DAN KEBERADAAN PENGGALIAN GOLONGAN C**
TABLE NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY EXISTENCE OF BURNING PLANT/LAND TENURE AND AVAILABILITY OF C-CLASS MINING FIELD

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kebiasaan Membakar Ladang/Kebun <i>Habitual of Burning The Plant/Land Tenure</i>		Keberadaan Penggalan Golongan C <i>The Availability of C-Class Mining Field</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Ada <i>Exist</i>	Tidak Ada <i>Not Exist</i>	Ada <i>Exist</i>	Tidak Ada <i>Not Exist</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	86	201	52	235	287
Merangin	66	149	56	159	215
Sarolangun	59	99	32	126	158
Batang Hari	21	103	48	76	124
Muaro Jambi	47	108	34	121	155
Tanjung Jabung Timur	30	63	2	91	93
Tanjung Jabung Barat	19	115	11	123	134
Tebo	16	96	32	80	112
Bungo	25	128	19	134	153
Kota Jambi	-	62	-	62	62
Kota Sungai Penuh	10	59	12	57	69
JAMBI	379	1 183	298	1 264	1 562

4

ANTISIPASI DAN KEJADIAN BENCANA ALAM

ANTICIPATION AND INCIDENCE OF NATURAL DISASTER



<https://jambi.bps.go.id>

Penjelasan Teknis Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam

1. Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa bencana yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan dirinci setiap tahun, yaitu 2015, 2016, dan 2017. Dalam suatu kejadian bencana alam dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam lainnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi.
2. Sistem Peringatan Dini Bencana Alam adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud, misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, d.s.b yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan *loud speaker*, dan lainnya.
3. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, d.l.l. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu contoh yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

Technical Notes Anticipation and Incidence of Natural Disaster

1. *Natural Disaster is an event or series of events of disaster among the last 3 years (2015, 2016, 2017) that threaten and disrupt the lives and livelihoods caused by natural factors such as: earthquake, tsunami, volcanic eruption, flood, flash flood, drought, typhoon/cyclone, and landslide so it can lead to result in loss of material and non-material.*
2. *Natural Disaster Early Warning System is a series of activities warnings about the possibility of a natural disaster to local community by regulatory authorities. The natural disaster early warning system referred here is early warning to residents regarding the status of sluice height, mountain status, etc., which is conveyed through kentongan, notification with loud speakers, and others.*
3. *Engineering, maintenance or normalization: rivers, canals, dikes, etc. These activities can be the example as a disaster prevention effort. According to Government Regulation Number 21 of 2008 concerning Implementation of Disaster Management, prevention is carried out by reducing the threat of disasters and the vulnerability of those threatened by disaster.*

4. Sistem Peringatan Dini Tsunami adalah fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/kelurahan. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Cakupan wilayah sistem peringatan dini tsunami meliputi semua desa kelurahan yang dapat dijangkau oleh sistem tersebut dan bukan hanya desa/kelurahan dimana lokasi alat tersebut berada.
 5. Perlengkapan Keselamatan adalah perlengkapan yang diupayakan/disediakan oleh aparat setempat maupun warga desa untukantisipasi maupun evakuasi korban saat terjadi bencana alam, seperti: perahu karet, tenda, persediaan masker, dan sebagainya.
 6. Rambu-rambu dan Jalur Evakuasi adalah rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta, petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (muster point). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.
4. *Tsunami Early Warning System is a facility of early detection of tsunami occurrence to provide early warning for the population before the tsunami hit the village/sub-district. This system uses high technology equipment as a tool to monitor when and where the tsunami will occur. The coverage area of the tsunami early warning system covers all villages/sub districts that can be reached by the system and not just the village / sub districts where the location of the equipment is located.*
 5. *Safety Equipment is equipment that sought/provided by local apparatus or village community to anticipate the occurrence of natural disasters, such as providing rubber boats, tents, masks stock, etc.*
 6. *Evacuation Route is a path or a special route that is used for evacuation when a natural disaster is occurred. These routes could be available in the village in any form, e.g. maps, evacuation instructions, and muster point. The most important thing is that in case of a natural disaster, the villagers have clear evacuation route that must be followed.*

TABEL : 04.1 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT UPAYA ANTISIPASI/MITIGASI BENCANA ALAM**
TABLE : 04.1 **NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY EFFORT IN ANTICIPATION/MITIGATION OF NATURAL DISASTER**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam <i>Natural Disaster Early Warning System</i>	Sistem Peringatan Dini Tsunami <i>Tsunami Early Warning System</i>	Perlengkapan Keselamatan <i>Safety Equipment</i>	Rambu-Rambu dan Jalur Evakuasi <i>Signs and Evacuation Route</i>	Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi: Sungai, Kanal, Tanggul, dll <i>Engineering, Maintenance, or Normalization: Rivers, Canals, Dikes, etc</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	27	-	3	4	62
Merangin	23	-	5	2	53
Sarolangun	-	-	1	-	24
Batang Hari	8	-	7	2	12
Muaro Jambi	5	-	8	-	46
Tanjung Jabung Timur	1	-	5	2	27
Tanjung Jabung Barat	11	-	4	3	37
Tebo	4	-	1	-	11
Bungo	-	-	7	-	30
Kota Jambi	2	-	2	2	13
Kota Sungai Penuh	2	-	2	12	24
JAMBI	83	-	45	27	339

TABEL 04.2 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS BENCANA ALAM**
DALAM TIGA TAHUN TERAKHIR
NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY TYPE OF NATURAL DISASTER
WITHIN LAST THREE YEARS

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tanah Longsor Landslide	Banjir Flood	Banjir Bandang Flash Flood	Gempa Bumi Earth-quake	Tsunami Tsunami	Gelombang Pasang Laut Tide
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	22	72	18	15	-	-
Merangin	30	61	19	14	-	-
Sarolangun	5	65	5	-	-	-
Batang Hari	4	80	-	-	-	-
Muaro Jambi	3	66	-	-	-	-
Tanjung Jabung Timur	1	9	-	-	-	6
Tanjung Jabung Barat	2	28	-	-	-	7
Tebo	4	57	-	-	-	-
Bungo	15	77	2	14	-	-
Kota Jambi	1	17	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	11	43	15	21	-	-
JAMBI	98	575	59	64	-	13

TABEL : 04.2 (Sambungan - Continuation)
TABLE

Kabupaten/Kota <i>Province</i>	Angin Puyuh/Puting Belung/Topan <i>Typhoon/ Cyclone</i>	Gunung Meletus <i>Volcanic Eruption</i>	Kebakaran Hutan dan Lahan <i>Forest and Land Fires</i>	Kekeringan <i>Drought</i>	Tidak Ada Bencana Alam <i>No Natural Disaster</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kerinci	6	-	7	12	170
Merangin	10	-	14	17	104
Sarolangun	6	-	8	24	71
Batang Hari	6	-	6	17	35
Muaro Jambi	8	-	24	31	77
Tanjung Jabung Timur	4	-	13	7	65
Tanjung Jabung Barat	5	-	10	8	86
Tebo	7	-	61	34	17
Bungo	4	-	20	27	53
Kota Jambi	4	-	1	2	44
Kota Sungai Penuh	3	-	7	16	9
JAMBI	63	-	171	195	731

<https://jambi.bps.go.id>

5

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

EDUCATION AND HEALTH



<https://jambi.bps.go.id>

Penjelasan Teknis Pendidikan dan Kesehatan

1. Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus
 - a. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
 - c. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
2. Jenjang Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelati-

Technical Notes Education and Health

1. *The Formal Education Level consists of primary education, secondary education, and high education. The kind of education that taught consists of general education, vocational, academic, professional, religious, and specific education.*
 - a. *The Primary Education consists of Elementary School, Extraordinary Primary School, and Islamic Elementary School or other equivalent forms and Junior High School, Extraordinary Junior High School, and MTs, or other equivalent forms.*
 - b. *The Secondary Education consists of the senior high school, Extraordinary Senior High School, MA, Vocational School, and Vocational Madrasah Aliyah, or other equivalent forms.*
 - c. *The High Education consists of the education level after the secondary education that consists of diplomas, bachelor, master, specialist, and doctoral degrees that are held by the college. The colleges can be academy, polytechnic, high school, institute, or university.*
2. *The Non-Formal Education includes life skills education, early childhood education, youth education, women's empowerment education, literacy education, vocational and job training education, equality education, and other educa-*

han kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, satuan pendidikan formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

- a. Lembaga Keterampilan adalah pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh lembaga/pelatihan/kursus keterampilan yang mempunyai ciri: jangka waktu pendidikan relatif pendek, ditujukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat umum, dan menyediakan sertifikat bagi peserta yang lulus.
- b. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) atau biasa disebut PAUD adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini).
- c. Keaksaraan Fungsional adalah metode pemberantasan buta aksara meliputi pengajaran kemampuan baca, tulis, dan hitung, serta berbagai keterampilan lain. Keterampilan disini tergantung proposal yang diajukan, misal memasak, menjahit, pembuatan kain sulam, d.s.b.
- d. Kelompok Bermain (*Play Group*) adalah pendidikan anak-anak usia 2-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah

tion that aimed to develop the ability of learners. The non-formal education unit consists of courses institutes, training institutes, study groups, learning centers, and forum of taklim, and similar educational unit.

- a. *Skill Course is outside of school education managed by the training institution or skill course that has characteristics: duration of education is relatively short, it is provided to improve the skill of community, and provides certificate for the trainees who pass the exam.*
- b. *Early Childhood Education Facility is a pre-elementary activities place for child since birth up to the age of six years through provision of proper early education in order to assist physical and mental growth so that child become ready for attending further education level (Regulation of the Minister of Education and Culture No 137 of Year 2014 on Standard of National Early Childhood Education)*
- c. *Functional Literacy is one of the education programs outside of school in order to eradicate illiteracy which includes the teaching of reading, writing, and calculation, and other functional abilities in everyday activities such as cooking, sewing, embroidery fabric manufacture, etc.*
- d. *Play Group is an early childhood education facility for children aged 3 months up to the age of prior to elementary education (the child daycare is also called as child wellbe-*

- perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
- e. Taman Penitipan Anak adalah bentuk intervensi pendidikan bagi anak usia 3 bulan sampai memasuki pendidikan dasar pada lembaga taman penitipan anak (wahana kesejahteraan anak yang biasanya berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja).
 - f. Taman Pendidikan Al Quran adalah kegiatan Taman Pendidikan AlQur'an yang masih beroperasi di desa/kelurahan baik yang memiliki izin maupun tidak.
 - g. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah lembaga yang lahir dari dan untuk masyarakat yang merupakan potensi dalam memberdayakan warga (masyarakat umum) untuk belajar dan memperoleh informasi/pengertian untuk meningkatkan taraf hidup.
3. Pendidikan Keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, seminari dan bentuk lain yang sejenis.
 - a. Pondok pesantren (Ponpes) adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (PP Nomor 55 tahun 2007).
- ing (where the children whose parents are at works can perceive substitute family for a certain period of time).*
- e. *Child Daycare is educational intervention for children aged 3 months to enter primary education at child daycare (welfare child place as a substitute family for a certain period time for children whose their parents work)*
 - f. *AlQuran Learning Center is facility where children learn the holy book of the Islamic religion of the Al-Qur'an that still operates in the village/sub district with or without particular permit.*
 - g. *Communal Library is a public reading facility that is established by and for the community which become the potential facility for empowering the community to learn and acquire information/knowledge to improve their living.*
3. *The Religious Education can be organized in formal education, non-formal, and informal education. Religious education consists of diniyah education, muslim boarding, seminary, and other similar forms.*
 - a. *Islamic boarding school is a community based Islamic religious education institution that provide Islamic elementary education or integrated with other types of education (the Government Regulation no. 55 of 2007).*

- b. Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disahkannya PP Nomor 55 Tahun 2007, Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah, Departemen Pendidikan Nasional).
- c. Seminari/sejenisnya adalah lembaga pendidikan tinggi agama Katolik/Kristen, dalam profesi kepastoran dan biasanya menyediakan asrama bagi para siswanya dalam komplek pendidikan. Contoh sejenisnya adalah Pendidikan Alkitab untuk Agama Protestan.
4. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan/ bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.
5. Rumah Sakit Bersalin adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan.
6. Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana
- b. *Madrasah Diniyah is an integrated part of national education to fulfill people's need for Islamic education. Islamic Elementary School is an institutionalized education that aims to prepare students in mastering Islamic knowledge (Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System which is elaborated by the enactment of Government Regulation Number 55 of 2007, the Laws on Education and the Government Regulations, the Regulation of Ministry of Education).*
- c. *Seminary is facility of higher education in Catholic/Christian religion, in the pastoral profession and usually provides dormitories for students in the educational complex. A similar example is Bible Education for Protestantism.*
4. *Hospital is a health facility/ building in which to serve the ill patients to get outpatient or inpatient treatment services provided by doctors, nurses and other health personnels.*
5. *Maternity Hospital is a specialized hospital for childbirth, has specialist inspection service to pregnancy, childbirth, hospitalization, and outpatient for mothers and children that is under the supervision of an obstetrician.*
6. *Public Health Center is a government-owned health service unit (part of the regency/city*

- teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa.
7. Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan.
 8. Poliklinik adalah sarana kesehatan/bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu.
 9. Balai pengobatan adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri kesehatan.
 10. Tempat Praktek Dokter adalah sarana Kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktek dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.
 11. Rumah Bersalin adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior.
 12. Tempat Praktek Bidan adalah sarana Kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktek bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.
- office of health service) that is responsible for community health services at district level or vil-lage/sub-district level.*
7. *Subsidiary Public Health Center as a health facility/building that is used as a community health center for a smaller area, for example in a village/sub district.*
 8. *Polyclinic is a health facility/building used for providing outpatient services and usually managed by private or certain religious orga-nizations.*
 9. *Treatment Center is a health check-up place under the supervision of the health care work-ers (paramedics).*
 10. *Practitional Doctor is health facility/building used for the doctor (physician) who usually pro-vides outpatient services, including the practice of doctors who have inpatient and supporting pharmacy facility.*
 11. *Maternity House is health care facility with a license as a maternity house, equipped with prenatal care, childbirth, and examination of mothers and children which is under the super- vision of a senior midwife.*
 12. *Midwives are health facility/building used for the midwife who usually provides medical ex- amination for pregnant women and infants.*

13. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan.
 14. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa.
 15. Apotek adalah suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi.
 16. Toko Khusus Obat/Jamu adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, dan menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu.
 17. Posyandu adalah salah satu wadah peran serta masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan memantau pertumbuhan balita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.
 18. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), yang saat ini dikenal Posbindu PTM (penyakit tidak menular) merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan peman-
13. *Village Health Post (Poskesdes) is community-based health facility that is established in the village in an effort to provide basic health services for rural communities.*
 14. *Village Maternity Post is buildings that are built with donations from government funds and village community participation for maternity assistance and lodging for maternity mothers, as well as a place for the midwives to live in the village.*
 15. *Pharmacy is a health facility forwhere the pharmacist works, and drugs pharmaceutical products are sold or distributed to public.*
 16. *Traditional Drugs Store is a specific place that is used to do the work of storing and selling the drugs/ herbs as well as special ingredients for medicines/ herbal medicines.*
 17. *Integrated Health Service is a facility for the community participation which is managed and organized from, by, for, and with the community to obtain basic health services and monitor the growth of infants in order to improve the quality of human resources at an early stage. Those activities are immunization services, community nutrition education, and health services for mother and child.*
 18. *Integrated Health Counseling Post (the Posbindu), which is currently known as the Posbindu PTM (Integrated Health Counseling Post for the noninfectious disease) is the role of the community in conducting early detection and mon-*

- tauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik (Juknis Pelaksanaan Posbindu, Kemenkes, 2012).
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan)
 20. Dokter meliputi dokter umum dan dokter spesialis, tidak termasuk dokter hewan.
 21. Bidan adalah seorang petugas paramedis yang memperoleh pendidikan formal mengenai kebidanan dan berdomisili/tinggal di desa/kelurahan.
 22. Tenaga kesehatan lainnya meliputi: tenaga keperawatan, tenaga psikologi klinis, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan sebagainya.
 23. Dukun Bayi/Dukun Bersalin (Paraji) adalah wanita yang memiliki keterampilan secara turun temurun untuk menolong persalinan secara tradisional.
 24. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang ber-
- itoring of main risk factors of noninfectious disease carried out in an integrated, routine and periodic manner (Technical Guidelines on the Posbindu Operation, the Ministry of Health, 2012)*
19. *Health worker, is every person who devotes to health care and has knowledge or skills through education in the field of health. The certain types of skills in this service require the authority or license to provide health treatment (the Minister of Health Regulation Number 36 of 2014 on Health Workers).*
 20. *Doctors include general practitioners and specialists, but not veterinarians.*
 21. *Midwives are paramedics who receive formal education about midwifery and live in the village/sub district.*
 22. *Other Health Workers include: nursing staff, clinical psychology personnel, pharmacy personnel, public health personnel, environmental health workers, nutritionist, physical hygiene personnel, medical technical personnel, biomedical engineering personnel, traditional health workers, etc.*
 23. *Traditional Birth Attendant is someone with skill hereditary to help childbirth traditionally.*
 24. *Extraordinary Event is an appearance or increased incidence of morbidity or mortality epidemiologically in an area within a certain time*

makna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010). Penetapan KLB dapat dilakukan oleh:

- a. Kepala dinas kesehatan Kabupaten/Kota,
- b. Kepala dinas kesehatan provinsi, bila kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tidak menetapkan daerahnya dalam keadaan KLB,
- c. Menteri kesehatan, bila kepala dinas kesehatan provinsi atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB.

25. Wabah Penyakit Menular adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010). Penetapan wabah dapat dilakukan oleh menteri kesehatan.

26. Gizi Buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata) dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Busung lapar termasuk salah satu bentuk gizi buruk. Secara klinis, status gizi buruk terdapat tiga tipe, yaitu: marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.

and is a condition that can lead to an epidemic (Regulation of the Minister of Health No. 1501/MENKES/PER/X/2010). Determination of KLB can be done by:

- a. Chief of health office in regency/city,*
- b. Chief of health office in province, if a chief of health office in regency/city didn't establishment his region on epidemic,*
- c. Minister of Health, if a chief of health office in province or a chief of health office in regency/city didn't establishment his region on epidemic,*

25. *Epidemic is an outbreak of infectious disease in the community in which the number of patients more increased significantly than common condition in a certain time, area, and cause havoc (Regulation of the Minister of Health No. 1501/MENKES/PER/X/2010). The establishment of epidemic can be done by the minister of health.*

26. *Malnutrition is a condition of nutritional deficiency that is caused by the low energy consumption of protein daily, characterized by the weight and height is determined by medical personnel. Hunger oedema is included as one form of malnutrition. Clinically, there are three types of malnutrition status, namely: marasmus, kwashiorkor, and marasmus-kwashiorkor.*

27. Orang yang Dipasung adalah tindakan masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa (biasanya yang berat) dengan cara dikurung, dirantai kakinya, dimasukkan kedalam balok kayu, dan lain-lain sehingga kebebasannya menjadi hilang.
28. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial. BPJS tersebut merupakan implementasi dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2014 dengan dua cakupan jaminan sosial yaitu kesehatan dan Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS))
29. BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) Merupakan jaminan pembiayaan kesehatan dari pemerintah bagi masyarakat yang iurannya ditanggung pemerintah pusat dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai pemegang KIS, KJS, dan JAMKESMAS dimana semuanya dialihkan menjadi peserta BPJS PBI dengan kartu identitas yaitu KIS (Kartu Indonesia Sehat).
30. Jamkesda atau Jaminan Kesehatan Daerah adalah program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin oleh pemerintah daerah yang tidak masuk dalam program peserta BPJS PBI.
31. Surat Miskin/Surat Keterangan Tidak
27. *The Deprived People are people who are restricted for their movement because they are considered disruptive (usually people with severe mental disorders) caging, chaining their legs, putting them into the wooden beams and others so that their freedom is lost.*
28. *Social Security Agency (the BPJS) is a legal entity formed to organize social security in health care. The BPJS is an implementation of the National Health Security Program (JKN), which began on 1 January, 2014 with two social security coverages, which are health and employment (Law No. 24 of 2011 concerning the Social Security Agency (the BPJS))*
29. *The BPJS PBI (Contribution Assistance Recipient is a social protection financing scheme of health from the government for the particular people whose contributions are borne by the central government and intended for the poor and disadvantaged where determination of the beneficiaries is regulated by the provisions and the legislation. Those who are Contribution Assistance Recipients (PBI) are participants who were previously registered as holders of the KIS, KJS, and JAMKESMAS card where all were transferred to be the BPJS PBI beneficiaries known as the holders of KIS (Kartu Indonesia Sehat) card.*
30. *The Jamkesda or Regional Health Insurance is a free health care program scheme for the poor by local governments that are not included in the BPJS PBI beneficiaries program.*
31. *Poor Letter/Certificate of Inability (SKTM)*

Mampu (SKTM) adalah surat keterangan yang diberikan oleh kepala desa/lurah kepada masyarakat miskin untuk keperluan tertentu.

is a certificate given by the village head to the poor for a particular purpose.

<https://jambi.bps.go.id>

TABEL : 05.1 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN LEMBAGA KETERAMPILAN**
TABLE **NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY OF SKILLS COURSES**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Bahasa Asing <i>Foreign Language Course</i>	Komputer <i>Computer Course</i>	Menjahit/ Tata Busana <i>Fashion Design Course</i>	Kecantikan <i>Beauty Course</i>	Montir Mobil/ Motor <i>Automotive Course</i>	Elektronika <i>Electronics Course</i>	Lainnya <i>Others</i>	Tidak ada Lembaga Keteram- pilan <i>No Skills Courses</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kerinci	5	8	13	1	-	-	2	264
Merangin	10	12	22	3	8	3	2	176
Sarolangun	2	6	2	2	4	-	-	144
Batang Hari	3	4	3	2	3	3	1	117
Muaro Jambi	5	7	13	3	4	4	1	131
Tanjung Jabung Timur	2	6	2	1	2	2	2	84
Tanjung Jabung Barat	2	10	10	2	-	-	2	114
Tebo	3	17	25	4	7	2	2	76
Bungo	5	10	21	7	15	3	2	115
Kota Jambi	11	6	10	6	7	2	3	38
Kota Sungai Penuh	11	5	16	6	4	3	3	43
JAMBI	59	91	137	37	54	22	20	1 302

TABEL : 05.2 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MEMPUNYAI SEKOLAH
TABLE : 05.2 NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS WITH SCHOOL

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pos PAUD Early Childhood Education Facility	TK/RA/ BA Kindergarten	SD/MI Primary School	SMP/MTs Junior High School	SMU/MA Senior High School	SMK Vocational High School
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	253	117	225	72	25	8
Merangin	196	188	213	103	35	18
Sarolangun	155	138	156	77	31	23
Batang Hari	116	103	123	61	24	9
Muaro Jambi	138	130	150	94	35	17
Tanjung Jabung Timur	90	45	92	57	30	7
Tanjung Jabung Barat	128	70	128	84	39	12
Tebo	108	87	112	70	36	18
Bungo	151	106	152	73	34	17
Kota Jambi	54	55	59	46	34	23
Kota Sungai Penuh	65	37	59	15	9	4
JAMBI	1 454	1 076	1 469	752	332	156

TABEL : 05.2 (Sambungan – Continuation)
TABLE

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Akademi/ Perguruan Tinggi Academy/ University	SD Luar Biasa Extraordinary Primary School	SMP Luar Biasa Extraordinary Junior High School	SMA Luar Biasa Extraordinary Senior High School	Pondok Pesantren Islamic Boarding School	Madrasah Diniyah Madrasah Diniyah	Seminari/ Sejenisnya Seminary
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kerinci	1	1	-	-	7	8	-
Merangin	3	1	-	-	49	138	1
Sarolangun	2	1	-	-	31	123	-
Batang Hari	2	1	1	1	23	107	-
Muaro Jambi	3	1	1	-	41	106	1
Tanjung Jabung Timur	2	1	1	1	13	38	-
Tanjung Jabung Barat	4	2	-	-	23	93	2
Tebo	3	1	1	1	27	62	-
Bungo	4	1	1	1	39	89	-
Kota Jambi	18	3	2	1	10	11	-
Kota Sungai Penuh	8	2	1	-	3	1	-
JAMBI	50	15	8	5	266	776	4

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KETERSEDIAAN KEGIATAN
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA/KEAKSARAAN FUNGSIONAL, KEGIATAN
PENDIDIKAN PAKET A/B/C, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN
ANAK, TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN TAMAN BACAAN
MASYARAKAT**

TABEL : 05.3
TABLE

NUMBER OF VILLAGES/SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY OF FUNCTIONAL LITERACY, A/B/C EDUCATIONAL PACKAGE, PLAYGROUP, CHILD DAYCARE, AL-QURAN LEARNING CENTER, AND COMMUNAL LIBRARY

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Keaksaraan Fungsional <i>Functional Literacy</i>	Pendidikan Paket A/B/C <i>A/B/C Educational Package</i>	Kelompok Bermain <i>Playgroup</i>	Taman Penitipan Anak <i>Child Daycare</i>	Taman Pendidikan Al-Quran <i>Al-Quran Learning Center</i>	Taman Bacaan Masyarakat <i>Communal Library</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	38	60	45	17	263	25
Merangin	20	46	73	6	123	93
Sarolangun	3	18	17	8	48	48
Batang Hari	7	30	32	6	46	40
Muaro Jambi	16	38	48	12	105	13
Tanjung Jabung Timur	12	41	12	2	47	37
Tanjung Jabung Barat	21	29	33	7	63	15
Tebo	9	32	20	5	69	5
Bungo	-	24	15	11	98	34
Kota Jambi	6	15	37	17	33	32
Kota Sungai Penuh	11	16	8	1	65	17
JAMBI	143	349	340	92	960	359

TABEL : 05.4 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN SARANA KESEHATAN**
TABLE : 05.4 **NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY OF HEALTH FACILITY**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Rumah Sakit <i>Hospital</i>	Rumah Sakit Bersalin <i>Maternity Hospital</i>	Puskesmas ¹ <i>Public Health Center¹</i>	Puskesmas Pembantu <i>Subsidiary of Public Health Center</i>	Poliklinik/ Balai Pengobatan <i>Polyclinic/ Treatment Center</i>	Tempat Praktek Dokter <i>Doctor Practice</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	-	-	24	44	7	29
Merangin	2	-	37	98	13	33
Sarolangun	1	-	16	49	6	24
Batang Hari	2	-	17	64	10	15
Muaro Jambi	3	1	29	99	12	30
Tanjung Jabung Timur	1	-	18	61	2	17
Tanjung Jabung Barat	1	-	16	74	13	17
Tebo	2	-	21	43	11	20
Bungo	6	4	22	78	9	25
Kota Jambi	16	1	20	36	17	42
Kota Sungai Penuh	2	-	11	8	3	21
JAMBI	36	6	231	654	103	273

Catatan / Note: ¹ Puskesmas mencakup puskesmas dengan rawat inap dan puskesmas tanpa rawat inap.
¹ *Public Health Center includes public health center with hospitalization and without hospitalization.*

TABEL : 05.4 (Sambungan – Continuation)
TABLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tempat Praktek			Polindes <i>Village Maternity Post</i>	Apotek <i>Pharmacy</i>	Toko Khusus Obat/Jamu <i>Traditional Drugs Store</i>
	Rumah Bersalin <i>Maternity House</i>	Bidan <i>Midwife</i>	Poskesdes <i>Village Health Post</i>			
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kerinci	12	139	101	24	19	24
Merangin	18	141	124	45	25	23
Sarolangun	8	113	133	-	18	18
Batang Hari	9	66	62	29	11	13
Muaro Jambi	18	107	50	77	21	27
Tanjung Jabung Timur	5	60	22	39	9	12
Tanjung Jabung Barat	16	63	80	15	17	16
Tebo	10	96	92	8	15	24
Bungo	24	115	70	44	22	16
Jambi	17	38	5	1	43	42
Sungai Penuh	12	32	29	-	11	7
JAMBI	149	970	768	282	211	222

TABEL
TABLE : 05.5 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEGIATAN POSYANDU DAN POSBINDU**
NUMBER OF VILLAGES/SUB-DISTRICTS BY THE ACTIVITY OF INTEGRATED HEALTH POST AND INTEGRATED COUNSELING POST

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kegiatan Posyandu <i>The Activity of Integrated Health Post</i>		Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) <i>Integrated Health Counseling Post</i>
	Setiap Sebulan Sekali <i>Once in a Month</i>	Setiap 2 Bulan atau Lebih <i>Once in at Least Two Months</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	280	60	46
Merangin	203	50	77
Sarolangun	150	55	65
Batang Hari	123	11	15
Muaro Jambi	152	44	43
Tanjung Jabung Timur	92	26	34
Tanjung Jabung Barat	129	16	50
Tebo	105	34	30
Bungo	152	45	78
Kota Jambi	62	6	47
Kota Sungai Penuh	66	9	31
JAMBI	1 514	356	516

TABEL
TABLE : 05.6 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN TENAGA KESEHATAN DAN DUKUN BAYI YANG TINGGAL DI DESA**
NUMBER OF VILLAGES/SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY OF HEALTH WORKER AND TRADITIONAL BIRTH ATTENDANT WHO LIVE IN VILLAGE

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tenaga Kesehatan yang Tinggal di Desa <i>Health Worker who Live in the Village</i>					Dukun Bayi <i>Traditional Birth Attendant</i>
	Dokter Pria <i>Male Doctor</i>	Dokter Wanita <i>Female Doctor</i>	Dokter Gigi <i>Dentist</i>	Bidan <i>Midwife</i>	Lainnya <i>Other Health Practitioner</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	23	22	13	240	203	123
Merangin	19	23	18	204	107	196
Sarolangun	25	17	16	151	102	139
Batang Hari	17	15	13	115	90	115
Muaro Jambi	15	17	8	144	81	129
Tanjung Jabung Timur	13	11	5	83	58	86
Tanjung Jabung Barat	18	14	9	124	72	128
Tebo	20	19	16	107	81	107
Bungo	17	26	12	148	113	141
Kota Jambi	31	37	24	53	50	12
Kota Sungai Penuh	13	23	11	53	63	12
JAMBI	211	224	145	1 422	1 020	1 188

TABEL : 05.7 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)/WABAH PENYAKIT SELAMA SETAHUN TERAKHIR
 TABLE : 05.7 NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY TYPE OF EPIDEMIC WITHIN LAST YEAR

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Muntaber/ Diare <i>Diarrhea</i>	Demam Berdarah <i>Dengue Fever</i>	Campak <i>Measles</i>	Malaria <i>Malaria</i>	Flu Burung/ SARS <i>Avian Influenza</i>	Hepatitis E <i>Hepatitis E</i>	Difteri <i>Diphtheria</i>	Lainnya <i>Other Epidemics</i>	Tidak Ada KLB/ Wabah <i>No Epidemic</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kerinci	3	1	10	8	-	-	-	-	272
Merangin	-	-	-	-	-	-	-	-	215
Sarolangun	-	-	-	-	-	-	-	-	158
Batang Hari	-	-	-	-	-	-	-	-	124
Muaro Jambi	2	2	3	5	-	-	-	-	148
Tanjung Jabung Timur	2	-	-	-	-	-	-	-	91
Tanjung Jabung Barat	1	-	1	1	-	-	-	-	131
Tebo	-	-	-	-	-	-	-	-	112
Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	153
Kota Jambi	3	-	1	-	-	-	-	-	59
Kota Sungai Penuh	-	-	2	-	-	-	-	-	67
JAMBI	11	3	17	14	-	-	-	-	1 530

TABEL : 05.8 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN PENDERITA GIZI BURUK DAN ORANG YANG DIPASUNG**
TABLE : 05.8 **NUMBER OF VILLAGES / SUB-DISTRICTS BY PRESENCE OF MALNUTRITION AND DEPRIVED PEOPLE**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penderita Gizi Buruk <i>Malnutrition</i>	Orang yang Dipasung <i>Deprived People</i>
(1)	(2)	(3)
Kerinci	22	9
Merangin	35	6
Sarolangun	7	5
Batang Hari	9	1
Muaro Jambi	18	5
Tanjung Jabung Timur	2	2
Tanjung Jabung Barat	13	7
Tebo	8	8
Bungo	10	3
Kota Jambi	8	-
Kota Sungai Penuh	11	2
JAMBI	143	48

TABEL : 05.9 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN WARGA PENERIMA BPJS KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)/JAMKESDA DAN WARGA PENERIMA SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU PADA TAHUN 2017**
NUMBER OF VILLAGES/SUB-DISTRICTS BY PRESENCE OF PEOPLE WHO RECEIVED SOCIAL SECURITY AGENCY -CONTRIBUTION ASSISTANCE RECIPIENT- (THE BPJS PBI)/ REGIONAL HEALTH INSURANCE (THE JAMKESDA) AND PEOPLE WHO RECEIVED POOR CERTIFICATE IN 2017

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penerima BPJS PBI/Jamkesda <i>People Who Received BPJS PBI/Regional Health Insurance</i>	Penerima Surat Miskin/SKTM <i>Families Who Received Poor Certificate</i>
(1)	(2)	(3)
Kerinci	287	286
Merangin	209	207
Sarolangun	158	157
Batang Hari	118	119
Muaro Jambi	142	149
Tanjung Jabung Timur	93	93
Tanjung Jabung Barat	110	128
Tebo	110	111
Bungo	146	148
Kota Jambi	62	62
Kota Sungai Penuh	68	69
JAMBI	1 503	1 529

<https://jambi.bps.go.id>

6

SOSIAL DAN BUDAYA

SOCIAL AND CULTURE



<https://jambi.bps.go.id>

Penjelasan Teknis Sosial dan Budaya

1. Tempat Ibadah adalah bangunan/ruangan yang lokasinya tetap dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum sesuai agama yang dianut tanpa memandang status kepemilikan, termasuk bangunan/ruangan yang lokasinya tetap dan fungsinya dikhususkan untuk ibadah di fasilitas umum. Tidak termasuk tempat ibadah yang khusus dipakai oleh pribadi/keluarga.
 - a. Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk Sholat Jum'at.
 - b. Surau/Langgar adalah tempat peribadatan umat Islam, lebih kecil dari masjid dan tidak digunakan untuk Sholat Jum'at.
 - c. Gereja Kristen adalah tempat ibadah untuk umat Kristen
 - d. Gereja Katolik adalah tempat ibadah untuk umat Katolik
 - e. Kapela adalah tempat ibadah untuk umat Katolik yang tidak ada Pastur.
 - f. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu.
 - g. Vihara adalah tempat ibadah umat Buddha.
 - h. Klenteng adalah tempat ibadah umat Konghucu.
 - i. Lainnya, khusus untuk tempat ibadah Aliran Penghayat Kepercayaan. Contohnya Balai Basarah, yang merupakan tempat ibadah umat Kaharingan
2. Penyandang Cacat adalah orang yang mengalami kecacatan sehingga terganggu/terhambat dalam melakukan suatu

Technical Notes Social and Cultural

1. *Places of Worship is a building/room which the location is fixed and specially designed for worship by the public according to their religious affiliation, regardless of ownership status of the building. It includes building/room which the location is fixed and the function remain devoted to worship in public facilities. Excluding the special place of worship used by personal/family.*
 - a. *Mosque is a place of worship for Muslims, which can be used as a place for Friday prayers.*
 - b. *Prayer Room is a place of worship for Muslims, smaller than the mosque and not used as a place for Friday prayers.*
 - c. *Christian Church is a place of worship for Christians.*
 - d. *Catholic Church is a place of worship for Catholics.*
 - e. *Chapel is a place of worship for Catholics without a pastor.*
 - f. *Hindu Temple is a place of worship for Hinduism.*
 - g. *Buddhist Temple is a place of worship for Buddhist.*
 - h. *Shrine is a place of worship for Confucian.*
 - i. *Other is a place of worship for the native-faith followers. For example, the Balai Basarah is a place of worship for the followers of Kaharingan.*
2. *The Disabled is people who have disabilities so that they are disrupted / impaired in carrying out an activity as normal people.*

kegiatan sebagaimana layaknya.

- a. Tunanetra (Buta) adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Tunanetra dibedakan ke dalam dua golongan yaitu: buta total dan kurang awas. Buta total jika kedua mata tidak dapat melihat sama sekali. Kurang awas, bila dua mata tidak dapat menghitung jari-jari tangan yang digerakkan pada jarak 1 meter di depannya walaupun memakai kacamata atau ada cukup cahaya untuk melihat.
- b. Tunarungu (Tuli) adalah kondisi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara.
- c. Tunawicara (Bisu) adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara.
- d. Tunarungu-wicara (tuli-bisu) adalah ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara dan berbicara. Seseorang menjadi bisu umumnya disebabkan karena tuli.
- e. Tunadaksa (Cacat Tubuh) adalah kelainan pada tulang, otot atau sendi anggota gerak dan tubuh, serta kelumpuhan/ketidaklengkapan anggota gerak/tulang sehingga menimbulkan gangguan gerak.
- f. Tunagrahita (Cacat Mental/Keterbelakangan Mental) adalah kelainan/keterbelakangan mental/jiwa sehingga tidak mampu melakukan aktivitas yang umum dilakukan orang lain seusianya, contoh idiot.
- g. Tunalaras adalah hambatan/gangguan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
- h. Cacat Eks Sakit Kusta adalah kecacatan yang disebabkan oleh penyakit

- a. *Blind is a condition of a person who has a disorder or obstacles in the senses of vision. Blind is divided into two groups, namely: total blindness and less alert (low vision). Total blindness if both eyes can not see at all. Less alert (low vision), when the two eyes can not count the fingers that are driven at a distance of 1 meter in front of him despite wearing glasses or there is enough light to see.*
- b. *Deaf is a physical condition that is characterized by a decrease or the inability of a person to listen to the sound.*
- c. *Mute is the inability of a person to speak.*
- d. *Deaf-Mute is the inability of a person to hear and speak. The mute is usually as an impact of deaf .*
- e. *Physically Disable an abnormality in bones, muscles or joints of the body and limbs, and paralysis/incompleteness of limb/ bone causing movement disorders.*
- f. *Mental Disorder is ta disorder/ retardation of mental/soul hence unable to perform common activities that others who have similar age did, like an idiot.*
- g. *Post-Madness is barrier/disturbance in emotional control and social control.*
- h. *Post-Leprosy is disability caused by leprosy which has been declared cured medically.*

- kusta/lepra yang secara medis sudah dinyatakan sembuh.
- i. Cacat Ganda (Cacat Fisik-Mental) adalah orang yang menderita cacat mental (tunagrahita atau tunalaras) dan cacat fisik (buta, tuli, bisu, bisu-tuli atau cacat tubuh).
3. Korban bunuh diri adalah seseorang yang perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa sendiri atas kemauan sendiri atau karena bujukan, rayuan, dan hasutan, termasuk yang mencoba bunuh diri tetapi tidak meninggal. Korban bunuh diri mencakup juga upaya percobaan bunuh diri.
 4. Lokasi Berkumpul Anak Jalanan adalah titik-titik lokasi berkumpulnya anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun tempat-tempat umum, seperti pasar, mall, terminal bis, stasiun kereta api, taman kota (Kementrian Sosial RI).
 5. Lokasi Gelandangan adalah titik-titik lokasi yang menjadi tempat mangkal/tinggal gelandangan dan pengemis, misalnya jembatan, emperan toko, d.l.l.
 6. Lokalisasi/Lokasi/Tempat Mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah tempat PSK menjajakan diri baik secara legal maupun ilegal yang dikelola secara kelompok maupun individu.
- i. *Physical-Mental Disabilities is people who suffer from mental disabilities (mental disorder or post-madnes) and physical disabilities (blind, deaf, mute, mute-deaf or handicapped).*
 3. *A suicide victim is someone intentionally did suicidal action or lose their own lives on their own will or because of persuasion, seduction, and incitement, including those who attempted suicide but did not die. Suicide victims include those who attempted suicide.*
 4. *Location of Street Children Gathered is location point where children aged 5-18 years gather to spend most of their time to earn a living and hang around the streets and public places, such as markets, malls, bus terminals, railway station, and city park.*
 5. *Location of Homeless is location points that became a hangout/living for homeless and beggars, for example bridges, storefront, etc.*
 6. *Localization/Location of Commercial Sex Workers is location where a prostitute selling themselves both legally and illegally managed on a group or individual.*

<https://jambi.bps.go.id>

TABEL : 06.1 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KERAGAMAN AGAMA, SUKU/ETNIS, DAN BAHASA**
TABLE NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY DIVERSITY OF RELIGION, ETHNIC, AND LANGUAGE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Agama/ <i>Religion</i>		Etnis/ <i>Ethnic</i>		Bahasa/ <i>Language</i>	
	Satu Agama <i>Single Religion</i>	Multi Agama <i>Multi-Religion</i>	Satu Etnis <i>Single Ethnic</i>	Multi Etnis <i>Multi-Ethnic</i>	Satu Bahasa <i>Single Language</i>	Multi Bahasa <i>Multi-Language</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	255	32	39	248	165	122
Merangin	132	83	41	174	111	104
Sarolangun	80	78	18	140	59	99
Batang Hari	58	66	2	122	25	99
Muaro Jambi	53	102	1	154	17	138
Tanjung Jabung Timur	28	65	-	93	4	89
Tanjung Jabung Barat	46	88	-	134	8	126
Tebo	36	76	-	112	9	103
Bungo	83	70	8	145	40	113
Kota Jambi	9	53	1	61	11	51
Kota Sungai Penuh	49	20	28	41	38	31
JAMBI	829	733	138	1 424	487	1 075

TABEL 06.2 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN TEMPAT IBADAH
TABLE NUMBER OF VILLAGES / SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY OF PLACE OF WORSHIP

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Masjid Mosque	Surau/ Langgar /Musala Prayer Room	Gereja Kristen Christian Church	Gereja Katolik Catholic Church	Kapel Chapel	Pura Hindu Temple	Vihara Buddhist Temple	Kelenteng Sbrine	Lainnya Others	Tidak Ada Tempat Ibadah No Place of Worship
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kerinci	256	184	2	2	-	-	-	-	-	5
Merangin	215	192	23	9	1	-	-	-	-	-
Sarolangun	157	140	19	8	-	-	-	-	-	-
Batang Hari	123	112	10	3	-	-	-	-	-	-
Muaro Jambi	154	141	31	12	-	1	-	3	-	-
Tanjung Jabung Timur	93	84	11	5	1	1	-	-	-	-
Tanjung Jabung Barat	133	128	29	7	1	-	1	2	-	-
Tebo	112	107	19	4	4	-	-	-	-	-
Bungo	153	145	8	3	-	-	1	-	-	-
Kota Jambi	58	58	11	4	-	1	9	15	-	-
Kota Sungai Penuh	61	51	1	-	-	-	1	-	-	-
JAMBI	1 515	1 342	164	57	7	3	12	20	-	5

TABEL : 06.3 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN PENYANDANG CACAT**
TABLE : 06.3 **NUMBER OF VILLAGES/SUB-DISTRICTS BY PRESENCE OF THE DISABLED**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ada Penyandang Cacat Disabled People	Jenis Kecacatan/ <i>The Type of Disability</i>			
		Tunanetra Blind	Tunarungu Deaf	Tunawicara Mute	Tunarungu-wicara Deaf-Mute
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	267	114	120	106	106
Merangin	209	99	123	121	92
Sarolangun	150	69	76	89	81
Batang Hari	119	60	54	77	55
Muaro Jambi	141	63	66	66	67
Tanjung Jabung Timur	90	58	41	45	44
Tanjung Jabung Barat	124	49	51	56	56
Tebo	108	75	74	81	70
Bungo	146	88	74	82	72
Kota Jambi	57	37	16	24	24
Kota Sungai Penuh	64	28	20	32	25
JAMBI	1 475	740	715	779	692

TABEL : 06.3 (Sambungan – Continuation)
TABLE : 06.3 (Sambungan – Continuation)

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jenis Kecacatan/ <i>The Type of Disability</i>				
	Tunadaksa <i>Physically Disable</i>	Tunagrahita <i>Mental Disorder</i>	Tunalaras <i>Post-Madness</i>	Cacat Eks Sakit Kusta <i>Post-Leprosy</i>	Cacat Ganda <i>Physical-Mental Disabilities</i>
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kerinci	157	165	109	13	18
Merangin	115	121	80	3	11
Sarolangun	76	92	54	3	16
Batang Hari	82	82	58	13	10
Muaro Jambi	77	82	55	10	16
Tanjung Jabung Timur	65	47	42	16	11
Tanjung Jabung Barat	74	86	56	6	15
Tebo	85	85	57	7	25
Bungo	85	94	72	8	33
Kota Jambi	44	41	17	-	15
Kota Sungai Penuh	27	45	28	2	7
JAMBI	887	940	628	81	177

TABEL : 06.4
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN KORBAN BUNUH DIRI, LOKASI BERKUMPUL ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)
NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY EXISTENCE OF SUICIDE VICTIMS, STREET CHILDREN, HOMELESS, AND COMMERCIAL SEX WORKERS

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Korban Bunuh Diri <i>Suicide Victim</i>	Lokasi Berkumpul Anak Jalanan <i>Location of Street Children</i>	Lokasi Gelandangan <i>Location of Homeless</i>	Lokasi Pekerja Seks Komersial (PSK) <i>Location of Commercial Sex Workers</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	9	-	-	-
Merangin	18	-	-	-
Sarolangun	9	-	-	1
Batang Hari	8	-	-	-
Muaro Jambi	9	2	-	1
Tanjung Jabung Timur	8	-	-	2
Tanjung Jabung Barat	6	3	2	1
Tebo	11	-	1	2
Bungo	5	-	-	-
Kota Jambi	6	4	3	3
Kota Sungai Penuh	-	-	-	-
JAMBI	89	9	6	10

<https://jambi.bps.go.id>

7

HIBURAN DAN OLAHRAGA

ENTERTAINMENT AND SPORT



<https://jambi.bps.go.id>

Penjelasan Teknis Hiburan dan Olahraga

1. Ruang Publik Terbuka adalah lahan umum yang utamanya diperuntukkan sebagai tempat berkumpul warga seperti untuk bersantai, bermain tanpa perlu membayar. Ruang publik terbuka dapat berupa lapangan terbuka/alun-alun, taman, tempat bermain, d.s.b.
2. Pub/diskotek/tempat karaoke adalah tempat/gedung yang digunakan secara permanen untuk pub/diskotek/karaoke. Tidak termasuk peralatan karaoke yang disewakan.
3. Pusat Kebugaran adalah tempat khusus berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik. Sebuah *fitness centre* yang biasanya menyajikan banyak fasilitas dengan konsep *one stop sport* dan *entertainment* menjadi kunci utamanya.

Technical Notes Entertainment and Sport

1. *Open Public Space is a public land that primarily designed as a place for leisure, playing for community without needing to pay. Open public space consists of field or square, park, playground, etc.*
2. *Pub/discotheque/karaoke place is a place/building that is used permanently for pubs/discotheques/karaoke. The concept does not include karaoke equipment for rent.*
3. *The Fitness Center is a special place that provides equipment for physical fitness exercise or where the body muscle is done routinely/regularly. It usually provides a number facilities including entertainment with one stop sport concept.*

<https://jambi.bps.go.id>

TABEL : 07.1 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KETERSEDIAAN RUANG
TABLE : 07.1 **PUBLIK TERBUKA, PUB/DISKOTEK/KARAOKE, DAN PUSAT KEBUGARAN**
 NUMBER OF VILLAGES / SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY OF OPEN PUBLIC
 SPACE, PUB/DISCOTHEQUE/KARAOKE, AND FITNESS CENTER

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i> (1)	Ruang Publik <i>Open Public Space</i> (2)	Pub/Diskotik/ Karaoke <i>Pub/Discotheque/Karaoke</i> (3)	Pusat Kebugaran <i>Fitness Center</i> (4)
Kerinci	34	12	28
Merangin	45	2	25
Sarolangun	14	3	19
Batang Hari	16	-	6
Muaro Jambi	29	1	18
Tanjung Jabung Timur	12	-	3
Tanjung Jabung Barat	19	3	13
Tebo	20	1	7
Bungo	22	5	21
Kota Jambi	23	16	21
Kota Sungai Penuh	5	8	14
JAMBI	239	51	175

TABEL 07.2 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KETERSEDIAAN FASILITAS/LAPANGAN OLAHRAGA**
TABLE **NUMBER OF VILLAGES / SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY OF SPORTS FACILITY/FIELD**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sepak Bola <i>Soccer</i>	Bola Voli <i>Volley Ball</i>	Bulu Tangkis <i>Badminton</i>	Bola Basket <i>Basket Ball</i>	Tenis Lapangan <i>Court Tennis</i>	Tenis Meja <i>Table Tennis</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	155	201	123	20	22	150
Merangin	184	200	175	23	15	125
Sarolangun	124	152	126	16	10	103
Batang Hari	99	114	101	11	3	85
Muaro Jambi	136	134	144	23	15	99
Tanjung Jabung Timur	79	88	76	1	2	59
Tanjung Jabung Barat	101	119	110	12	11	71
Tebo	102	100	93	14	4	75
Bungo	127	140	111	23	20	79
Kota Jambi	36	49	49	13	17	36
Kota Sungai Penuh	12	45	29	7	3	40
JAMBI	1 155	1 342	1 137	163	122	922

TABEL : 07.2 (Sambungan – Continuation)
TABLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Futsal <i>Futsal</i>	Renang <i>Swimming Pool</i>	Bela Diri <i>Martial Arts</i>	Bilyard <i>Billiards</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kerinci	30	3	42	27	18
Merangin	25	5	87	19	22
Sarolangun	27	3	58	15	2
Batang Hari	56	3	43	9	9
Muaro Jambi	37	4	59	18	8
Tanjung Jabung Timur	42	1	48	15	2
Tanjung Jabung Barat	44	2	60	16	-
Tebo	25	5	52	14	3
Bungo	37	4	50	26	11
Kota Jambi	21	11	24	14	4
Kota Sungai Penuh	9	3	11	4	2
JAMBI	353	44	534	177	81

<https://jambi.bps.go.id>

8

ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI

TRANSPORTATION, COMMUNICATION, AND INFORMATION



<https://jambi.bps.go.id>

Penjelasan Teknis Angkutan, Komunikasi, dan Informasi

1. Prasarana Transportasi adalah sarana penunjang lalu lintas pemindahan orang dan atau barang, yang terdiri atas jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan lain-lain yang digunakan oleh warga desa untuk mobilitas dari dan ke desa terdekat.
2. Angkutan Umum adalah sarana angkutan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan).
3. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang atau orang dan barang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
4. Jenis Permukaan Jalan Terluas adalah jenis permukaan jalan terluas yang ada di desa/kecamatan. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal/beton, diperkeras (dengan kerikil atau batu), tanah, dan lainnya yaitu terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan dan sejenisnya.
5. *Base Transceiver Station* (BTS) adalah alat yang berfungsi sebagai pengirim dan

Technical Notes Transportation, Communication, and Informasi

1. *Transportation Infrastructure is a facility of supporting the transfer of people and or goods, which consists of roads, bridges, docks, harbors, etc used by villagers for mobility to and from the nearest village.*
2. *Public Transportation is the transportation infrastructure to transfer of people and or goods from one place to another by using a motor vehicle that is provided to the public with payment (Regulation of Government No. 41 Year 1993 about Road Transportation).*
3. *Route is the track of public transport for the transportation service for people and or goods, which has fixed trip origin and destination, fixed route, and fixed schedule or unscheduled.*
4. *The Type of Widest Road Surface is the widest road surface in the village/ sub-district. This types of road surface consisting of: asphalt/ concrete, pebble (with gravel or stone), land, and others such as made of wood/ board that is usually used in swamp areas, including walkways, roads in the forests, etc.*
5. *Cellular Phone Tower or Base Transceiver Station (BTS) is a tool that serves as the sender*

penerima (*transceiver*) sinyal komunikasi seluler. Biasanya BTS ditandai adanya menara/tower yang dilengkapi antena sebagai perangkat *transceiver*.

6. Sinyal telepon seluler adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.
7. Sinyal internet GSM atau CDMA adalah jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet. Protokol transfer data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi yaitu GPRS, Edge, HSPA, 3G, kemudian 4G.
8. Program TV adalah program yang dirancang/disusun oleh stasiun/pemancar TV, baik stasiun TVRI, TV daerah, TV swasta, maupun TV luar negeri. Program TV yang dimaksud adalah program TV baik menggunakan antena parabola/TV kabel maupun tidak.
9. Warnet adalah usaha penyewaan jasa internet seperti: usaha sewa komputer dengan jaringan internet termasuk yang digunakan sebagai *game online*.
10. Kantor Pos adalah tempat pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pem-

and receiver (*transceiver*) of cellular communication signals. Usually, BTS is marked with a tower equipped with antenna as *transceiver* devices.

6. Cellular telephone signal is electromagnetic quantities that change in space and time by bringing information that confirms when the cell phone services are available.
7. GSM or CDMA internet signal is an internet package data system network with certain data transfer speeds. Data packages here are usually used in access the internet. This data transfer protocol has undergone several changes ranging from low to high speeds, namely GPRS, Edge, HSPA, 3G, then 4G respectively.
8. TV program is a program broadcasted by TV stations/transmitters, either by TVRI (state-owned tv broadcast station), or local TV, or private TV, and or foreign TV broadcast. The TV programs covered in this concept are both TV programs using satellite receiver or cable installation TV and the other types of reception.
9. The Internet Stall is an internet service rental business such as: computer rental business with internet network including those asserve online games.
10. Post Office is a service provider place of written communication and or electronic mail, parcel service, logistics services, financial transaction services, postal and agency services to the public. Postal house has the same function as the post office and subsidiary of post office, the difference is that postal house usually located in

bantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

remote areas.

11. Pos Keliling adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.

11. *Mobile Postal Service is tnomadic postal service (to sell, send, and receive postal stationery) by car or transportation facility that the functions are the same as the post office or subsidiary of post office.*

12. Perusahaan Jasa Agen Ekspedisi Swasta adalah pelayanan pengiriman paket maupun dokumen yang dikelola oleh pihak swasta, misalnya Tiki, JNE, ESL, d.l.l.

12. *Private Expedition Service Company is packages and documents delivery service managed by privates, for example Tiki, JNE, ESL, etc.*

<https://jambi.bps.go.id>

<https://jambi.bps.go.id>

TABEL : 08.1
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS PRASARANA TRANSPORTASI DAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM
NUMBER OF VILLAGES / SUB-DISTRICTS BY TYPE OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE AND AVAILABILITY OF PUBLIC TRANSPORTATION

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jenis Prasarana Transportasi <i>The Type of Transportation Infrastructure</i>				Ketersediaan Angkutan Umum <i>The Availability of Public Transportation</i>		
	Darat <i>Land</i>	Air <i>Water</i>	Darat dan Air <i>Land and Water</i>	Udara <i>Air</i>	Ada, Dengan Trayek Tetap <i>Available with Fixed Routes</i>	Ada, Tanpa Trayek Tetap <i>Available without Fixed Routes</i>	Tidak Ada Angkutan Umum <i>Not Available</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kerinci	287	-	-	-	118	107	62
Merangin	207	1	7	-	65	65	85
Sarolangun	153	-	5	-	68	41	49
Batang Hari	93	1	30	-	37	35	52
Muaro Jambi	129	2	24	-	57	29	69
Tanjung Jabung Timur	52	5	36	-	41	23	29
Tanjung Jabung Barat	94	2	38	-	38	35	61
Tebo	73	-	39	-	30	27	55
Bungo	153	-	-	-	45	67	41
Kota Jambi	61	-	1	-	45	17	-
Kota Sungai Penuh	69	-	-	-	31	38	-
JAMBI	1 371	11	180	-	575	484	503

TABEL : 08.2 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MENGGUNAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT ATAU DARAT DAN AIR MENURUT JENIS PERMUKAAN JALAN DARAT TERLUAS**
TABLE : 08.2 **NUMBER OF VILLAGES/SUB-DISTRICTS USED LAND OR LAND AND WATER TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE BY TYPE OF THE WIDEST ROAD SURFACE**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Aspal/Beton <i>Asphalt/Concrete</i>	Diperkeras (Kerikil, Batu, dll) <i>Pebble</i>	Tanah <i>Land</i>	Lainnya <i>Others</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	277	8	2	-	287
Merangin	114	79	18	3	214
Sarolangun	114	21	23	-	158
Batang Hari	100	14	9	-	123
Muaro Jambi	97	33	23	-	153
Tanjung Jabung Timur	40	16	32	-	88
Tanjung Jabung Barat	53	50	25	4	132
Tebo	68	29	15	-	112
Bungo	130	18	5	-	153
Kota Jambi	60	2	-	-	62
Kota Sungai Penuh	67	2	-	-	69
JAMBI	1 120	272	152	7	1 551

TABEL : 08.3
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MENGGUNAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT ATAU DARAT DAN AIR MENURUT KEBERADAAN JALAN YANG DAPAT DILALUI KENDARAAN RODA EMPAT
NUMBER OF VILLAGES/SUB-DISTRICTS USED LAND OR LAND AND WATER TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE BY AVAILABILITY OF ROAD WHICH CAN BE PASSED BY FOUR WHEEL VEHICLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sepanjang Tahun <i>Along The Year</i>	Sepanjang Tahun Kecuali Saat Tertentu <i>Along The Year Except Specific Condition</i>	Selama Musim Kemarau <i>During the Dry Season</i>	Tidak Dapat Dilalui Sepanjang Tahun <i>Can't be Passed Along The Year</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	283	3	-	1	287
Merangin	186	22	2	4	214
Sarolangun	136	4	8	10	158
Batang Hari	104	16	2	1	123
Muaro Jambi	129	21	2	1	153
Tanjung Jabung Timur	55	12	10	11	88
Tanjung Jabung Barat	83	17	6	26	132
Tebo	88	21	3	-	112
Bungo	147	5	1	-	153
Kota Jambi	61	1	-	-	62
Kota Sungai Penuh	65	4	-	-	69
JAMBI	1 337	126	34	54	1 551

TABEL
TABLE : 08.4

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN BASE
TRANSCIEVER STATION (BTS), SINYAL TELEPON SELULER, DAN SINYAL
INTERNET GSM ATAU CDMA**
NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY EXISTENCE OF BASE
TRANSCIEVER STATION (BTS), CELLULAR PHONE SIGNAL, AND GSM OR
CDMA INTERNET SIGNAL

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Keberadaan BTS <i>The Existence of BTS</i>		Kekuatan Sinyal Telepon Seluler <i>The Strenght of Cellular Phone Signal</i>			
	Ada <i>Exist</i>	Tidak Ada <i>Not Exist</i>	Sangat Kuat <i>Very Strong</i>	Kuat <i>Strong</i>	Lemah <i>Weak</i>	Tidak Ada Sinyal <i>No Signal</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	59	228	49	179	51	8
Merangin	68	147	22	103	70	20
Sarolangun	62	96	29	70	47	12
Batang Hari	61	63	12	80	32	-
Muaro Jambi	84	71	16	93	46	-
Tanjung Jabung Timur	51	42	7	47	36	3
Tanjung Jabung Barat	48	86	18	61	53	2
Tebo	50	62	14	56	39	3
Bungo	77	76	25	73	50	5
Kota Jambi	46	16	32	30	-	-
Kota Sungai Penuh	17	52	15	44	9	1
JAMBI	623	939	239	836	433	54

TABEL : 08.4 (Sambungan – Continuation)
 TABLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sinyal Internet GSM Atau CDMA <i>GSM or CDMA Internet Signal</i>			
	4G/LTE <i>4G/LTE</i>	3G/H/H+ <i>3G/H/H+</i>	2G/E/GPRS <i>2G/E/GPRS</i>	Tidak Ada Sinyal Internet <i>No Internet Signal</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kerinci	166	84	19	10
Merangin	34	90	47	24
Sarolangun	39	75	24	8
Batang Hari	13	91	17	3
Muaro Jambi	47	97	9	2
Tanjung Jabung Timur	19	47	19	5
Tanjung Jabung Barat	48	65	11	8
Tebo	15	65	18	11
Bungo	29	69	42	8
Kota Jambi	52	10	-	-
Kota Sungai Penuh	44	22	-	2
JAMBI	506	715	206	81

TABEL : 08.5 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT PROGRAM TELEVISI DAN RADIO YANG DAPAT DITERIMA WARGA**
TABLE : 08.5 **NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY TELEVISION AND RADIO PROGRAM THAT CAN BE RECEIVED BY PEOPLE**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Program TV/TV Program				Tidak Ada Program Televisi yang Dapat Diterima <i>No Television Program That Can Be Received</i>
	TVRI <i>TV of The Republic Indonesia</i>	TVRI Daerah <i>Local TV of The Republic Indonesia</i>	TV Swasta <i>Commercial TV</i>	TV Luar Negeri <i>Foreign TV</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	286	286	280	275	-
Merangin	215	214	212	200	-
Sarolangun	148	139	155	132	2
Batang Hari	123	123	124	121	-
Muaro Jambi	155	155	155	139	-
Tanjung Jabung Timur	90	90	93	93	-
Tanjung Jabung Barat	133	123	131	125	1
Tebo	107	110	111	101	-
Bungo	153	138	153	151	-
Kota Jambi	62	62	62	62	-
Kota Sungai Penuh	69	69	69	69	-
JAMBI	1 541	1 509	1 545	1 468	3

TABEL : 08.5 (Sambungan - *Continuation*)
TABLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Program Radio/ <i>Radio Program</i>		
	RRI RRI	RRI Daerah <i>RRI Region</i>	Radio Swasta/ Komunitas <i>Private/Community Radio</i>
(1)	(7)	(8)	(9)
Kerinci	247	249	238
Merangin	175	175	171
Sarolangun	89	92	72
Batang Hari	119	117	118
Muaro Jambi	153	153	149
Tanjung Jabung Timur	81	71	60
Tanjung Jabung Barat	94	84	98
Tebo	82	80	87
Bungo	120	114	119
Kota Jambi	62	62	62
Kota Sungai Penuh	62	68	68
JAMBI	1 284	1 265	1 242

TABEL : 08.6 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN SARANA KOMUNIKASI**
TABLE : 08.6 **NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY OF COMMUNICATION FACILITY**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Warnet <i>Internet Stall</i>	Kantor Pos/ Pos Pembantu/ Rumah Pos <i>Post Office/Subsidiary of Post Office</i>	Pos Keliling <i>Mobile Postal Service</i>	Perusahaan Jasa Ekspedisi Swasta <i>Private Expedition Service Company</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	44	16	96	20
Merangin	30	15	50	26
Sarolangun	13	9	-	8
Batang Hari	20	14	22	7
Muaro Jambi	28	30	60	13
Tanjung Jabung Timur	7	11	10	5
Tanjung Jabung Barat	15	16	7	15
Tebo	27	12	28	11
Bungo	18	12	21	11
Kota Jambi	40	28	14	31
Kota Sungai Penuh	27	1	13	7
JAMBI	269	164	321	154

9

EKONOMI

ECONOMY



<https://jambi.bps.go.id>

Penjelasan Teknis Ekonomi

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip:
 - a. Keanggotaannya sukarela dan terbuka;
 - b. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis;
 - c. Pembagian sisa hasil usahanya dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. Kemandirian, serta sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
2. Mini Market adalah tempat usaha yang menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan sistem pelayanan mandiri dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400 m².
3. Restoran adalah tempat usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahannya dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa. Restoran mempunyai ciri bahwa pembeli dikenakan pajak. Izin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh Ditjen Pariwisata atau Kanwil Parpostel setempat.
4. Rumah Makan adalah tempat usaha

Technical Notes Economy

1. *Cooperative is a business entity consisting of people or cooperative legal entities which activities are based on the principles:*
 - a. *Membership is voluntary and open;*
 - b. *Management is conducted democratically;*
 - c. *Benefits are distributed proportionally according to the member's share;*
 - d. *Remuneration is limited to the capital; and*
 - e. *Independence, as well as the people's economic movement based on the principle of kinship;*
2. *Mini Market is a place of business which sell various kinds of goods at retail by self-service system and everything has a price tag, with a building area of less than 400 m².*
3. *Restaurant is a place of business that use the entire building permanently to provide food processing services and presented directly in place in accordance with the wishes of service users. Restaurant has characteristic that the buyers have to pay taxes. The license of restaurant and its qualifications are awarded by the Directorate General of Tourism or the Regional Office of Tourism, Post, and Telecommunications.*
4. *Food Stall is a place of business that provide*

yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya bisa dilakukan di luar rumah makan. Rumah makan mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin rumah makan diberikan oleh Dinas Pariwisata Daerah atau Direktorat Perekonomian/Bagian Perekonomian Pemerintah daerah setempat.

5. Warung/Kedai Makanan Minuman adalah tempat usaha yang menjual makanan dan minuman siap saji yang dijual di bangunan yang tetap dan tidak mempunyai surat ijin usaha. Ciri utama dari warung/kedai makanan minuman adalah pembeli biasanya tidak dikenakan pajak.
6. Toko/Warung Kelontong adalah tempat usaha di bangunan tetap yang menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri dikelola oleh satu penjual.
7. Toko/warung kelontong yang menjual bahan pangan (sembako) adalah tempat usaha di bangunan tetap yang khusus menjual bahan pangan (sembako) secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri dan dikelola oleh satu penjual.
8. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, d.l.l) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.
9. Penginapan (Hostel/Motel/Los-

providing food services that food processing can be done outside the facility. Food Stall has characteristic that the buyers usually pay taxes. The license of food stall is granted by the Regional Office of Tourism or the Directorate/Section of Economic Affairs at the local government.

5. *Food and Beverage Store is a place of business that sell prepared food and beverages in the permanent building and does not has a business license. The main characteristic of food and beverage store is buyers usually are not taxed.*
6. *Shop/Grocery Store is a place of business that sell daily use items at retail, does not has self-service system, and is managed by a single seller.*
7. *Grocery shop/kios that sell basic food stuffs is a place of business in permanent buildings that specifically sell basic foodstuffs in retail. It, does not have self service system and managed by one seller.*
8. *Hotel is the kind of accommodation that use part or the whole building for lodging services, food and beverage and other services (such as restaurants, laundry, etc.) for the public which is commercially managed with a business license of hotel.*
9. *Inn is a type of accommodation that use part*

- men/Wisma) adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel.
10. Kelompok Pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal sepuluh toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya bisa lebih dari satu.
11. Pasar dengan Bangunan Permanen/ Semi Permanen adalah pasar yang menggunakan bangunan tetap dan memiliki lantai, atap, baik ber dinding maupun tidak.
12. Pasar Tanpa Bangunan adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan, termasuk pasar terapung.
13. Kios yang Menjual Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) adalah tempat penjualan pupuk, bibit, dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dibedakan menurut kepemilikan (KUD, BUMDes, atau nonKUD).
14. Fasilitas Perkreditan adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Tidak termasuk pinjaman dari perorangan.
15. Industri Kecil dan Mikro dikelompokkan menurut bahan baku utama de
- or the whole building for lodging services to the public, usually without eating and drinking facilities which is commercially managed with a business license of non-hotel.*
10. *Shopping Complex is a group of shops consisting at least ten stores and clumped. In one shopping complex, number of physical buildings can be more than one.*
11. *Market in the Permanent/ Semi Permanent Building is a market that uses the permanent building and have floor, roof, whether it walled or not.*
12. *Market Without Building is a market that is not located within the building, including the floating market.*
13. *Agricultural Production Stall is the place to sale fertilizer, seed and others for food crops, plantations, forestry, animal husbandry, and fisheries that are differentiated by the ownership status i.e. Village Cooperative Unit or Non-Village Cooperative Unit.*
14. *Credit facility is financial facilities that allow a person or business entity to borrow money to buy a product and repay it within a specified period. Not included loans from individuals.*
15. *Small and Micro Industry is classified by the main raw materials with a workforce of less*

ngan tenaga kerja kurang dari dua puluh pekerja

- a. Industri dari Kulit adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari kulit. Contoh pembuatan tas, sepatu, sandal, dan sebagainya
- b. Industri dari Kayu adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari kayu dan sejenisnya, misalnya industri pembuatan meubel/furnitur, mainan dari kayu, lantai dari kayu, d.s.b. Ukiran tidak termasuk barang industri dari kayu karena termasuk barang seni
- c. Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari logam mulia dan bahan bahan dari logam, misalnya pembuatan anting-anting, gelang, cincin dan pembuatan perhiasan lainnya dari emas atau perak serta bahan bahan dari logam (misal peralatan rumah tangga)
- d. Industri Anyaman adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, misalnya keset kaki, tikar, tas, hiasan dinding, keranjang, topi, kipas, dan sebagainya
- e. Industri Gerabah/Keramik/Batu adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari gerabah/keramik/porselen/batu dan sejenisnya, misalnya alat-alat dapur yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar (misal kendi, genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, d.s.b). Tidak termasuk pembuatan barang seni, misalnya patung, gapura, d.l.l.
- f. Industri dari Kain/Tenun adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari kain/benang dan sejenisnya

than twenty workers.

- a. *Leather Industry is an industry that the main raw materials are derived from the skin. Examples: the making of bags, shoes, sandals, etc*
- b. *Wood Industry is an industry that the main raw materials are derived from wood and the similar, such as industry of furniture, wooden toys, wooden floors, etc. Engraving is not included in wood industry because it is an art*
- c. *Precious Metals Industry and Metal Industry is an industry that the main raw materials are derived from precious metals and metal materials, such as making earrings, bracelets, rings and other jewelry from gold or silver metallic materials and materials (i.e. home appliances ladder)*
- d. *Cane Work Industry is an industry that the main raw materials are derived from bamboo, rattan, pandanus, grass and the similar*
- e. *Ceramics/Stone Industry is an industry that the main raw materials are derived from ceramic/porcelain/stone atc, such as kitchen tools that are made of clay and then baked (eg jugs, tile, brick, porcelain, tile, ceramics, etc.). Excluding the creation of art, such as sculpture, gate, etc.*
- f. *Clothes/Weaving Industry is an industry that the main raw materials comes from the fabric/yarn and the similar*

- g. Industri Makanan dan Minuman adalah industri yang menghasilkan produk makanan/minuman dan sejenisnya, termasuk pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak, susu dan makanan dari susu, penggilingan padi-padian, d.l.l
- g. *Food and Beverage Industry is an industry that produce food/drink products and the similar, including the processing and preserving of meat, fish, fruits, vegetables, oils and fats, milk and dairy foods, grinding grain, etc*
16. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
16. *Bank is business entity that raise funds from the public in deposits and distribute it to the public in order to improve the living standard of the people.*
17. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).
17. *Commercial Bank is a bank that can provide services in payment transfer (Law Number 7 Year 1992 About Banking).*
18. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
18. *Rural bank is a bank that accepts saving in time deposits, savings, or others.*
19. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang bersifat informal yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuhkan kembangkan usaha mikro dan kecil.
19. *Sharia Financial Services Cooperative is an informal microfinance institution that is operated with the principle of profit sharing to grow micro and small businesses.*
20. Pegadaian adalah badan usaha yang secara resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Menurut Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang
20. *Pawnshop is a business entity that officially has permission to carry out financial institution activities in the form of financing in the terms of funds distribution to the public on the basis of pawning law. According to the Civil Law Article 1150, pawning is a right obtained by someone who has a receivable of a movable item.*

bergerak.

21. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah mesin elektronik yang dapat melayani nasabah bank untuk melakukan berbagai kegiatan perbankan (mengambil uang, transfer, mengecek rekening tabungan, d.l.l) secara mandiri tanpa perlu dilayani oleh petugas bank.
 22. Bengkel mobil/motor adalah tempat yang menyediakan ruang dan peralatan untuk melakukan konstruksi atau manufaktur dan memperbaiki mobil atau motor.
 23. Salon Kecantikan adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Variasi lain dari jenis usaha salon kecantikan adalah salon rambut, dan salon tangan dan kuku (pedikur dan manikur).
 24. Agen tiket/travel/biro perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang maupun sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
 25. Agen Bank adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.
21. *Automated Teller Machine (ATM) is electronic machine that can serve bank customers to carry out various banking activities (withdrawing and transferring money, checking savings accounts, etc.) independently without being served by bank tellers.*
 22. *Car/motorcycle repair shop is a place that provides space and equipment to carry out construction or manufacture and repair cars or motorbikes.*
 23. *Beauty salon is a business that deals with cosmetics, facial and hair care, for both men and women. Other variations of this type of beauty salon business are hair salons, and hand and nail salons (pedicures and manicures).*
 24. *Ticket / travel agent / travel agency is a commercial business activity that arranges and provides services for a person or group of people to travel with the main purpose of recreational trip.*
 25. *Agent Bank is the party who collaborates with the Laku Pandai bank that is the bank's representative to provide banking services to the public in the context of financial inclusion as agreed.*

TABEL **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN KOPERASI**
TABLE : 09.1 **NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY OF COOPERATIVE**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Koperasi Unit Desa <i>Village Cooperative Unit</i>	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat <i>Small Industry and Citizen Handicraft Cooperative</i>	Koperasi Simpan Pinjam <i>Savings and Loan Cooperative</i>	Koperasi Lainnya <i>Other Cooperative</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	8	6	39	10
Merangin	26	11	20	10
Sarolangun	41	10	30	5
Batang Hari	27	2	19	7
Muaro Jambi	52	2	14	8
Tanjung Jabung Timur	9	2	15	1
Tanjung Jabung Barat	33	8	17	8
Tebo	21	6	12	9
Bungo	30	4	16	7
Kota Jambi	-	5	27	1
Kota Sungai Penuh	3	3	20	3
JAMBI	250	59	229	69

TABEL : 09.2
TABEL : 09.2
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN SARANA PERDAGANGAN DAN AKOMODASI
NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY OF TRADING AND ACCOMODATION FACILITY

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sarana Perdagangan <i>Trading Facility</i>		
	Mini Market <i>Mini Market</i>	Restoran/ Rumah Makan <i>Restaurant/ Food Stall</i>	Warung/ Kedai Makanan Minuman <i>Food & Beverage Store</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	9	32	178
Merangin	24	26	130
Sarolangun	15	9	81
Batang Hari	15	14	77
Muaro Jambi	36	24	105
Tanjung Jabung Timur	5	11	64
Tanjung Jabung Barat	14	19	94
Tebo	9	14	72
Bungo	17	17	100
Kota Jambi	45	38	59
Kota Sungai Penuh	13	23	54
JAMBI	202	227	1 014

TABEL : 09.2 (Sambungan - Continuation)
TABLE

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sarana Perdagangan Trading Facility		Sarana Akomodasi Acomodation Facility	
	Toko/ Warung Kelontong <i>Shop/ Grocery Store</i>	Toko/ Warung Kelontong yang Menjual Bahan Pangan <i>Grocery Shop/Kios that Sell Basic Food Stuffs</i>	Hotel <i>Hotel</i>	Penginapan <i>Inn</i>
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kerinci	278	179	3	9
Merangin	212	195	6	9
Sarolangun	155	104	5	4
Batang Hari	121	71	2	6
Muaro Jambi	154	130	1	7
Tanjung Jabung Timur	93	64	2	6
Tanjung Jabung Barat	134	100	4	16
Tebo	112	111	2	3
Bungo	151	141	8	6
Kota Jambi	62	53	32	7
Kota Sungai Penuh	69	62	9	6
JAMBI	1 541	1 210	74	79

TABEL : 09.3 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN KELOMPOK PERTOKOAN, PASAR, DAN KIOS SARANA PRODUKSI PERTANIAN (SAPROTAN)**
TABLE : 09.3 **NUMBER OF VILLAGES / SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY OF SHOPPING COMPLEX, MARKET, AND AGRICULTURAL PRODUCTION STALL.**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kelompok Pertokoan <i>Shopping Complex</i>	Pasar dengan Bangunan <i>Market in Permanent Building</i>	Pasar tanpa Bangunan <i>Market without Permanent Building</i>	Tidak Ada Kelompok Pertokoan dan Pasar <i>No Shopping Complex and Market</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	20	24	43	219
Merangin	33	66	39	133
Sarolangun	20	31	34	97
Batang Hari	11	34	7	87
Muaro Jambi	30	44	12	95
Tanjung Jabung Timur	20	25	18	53
Tanjung Jabung Barat	27	53	25	60
Tebo	26	49	18	57
Bungo	28	48	19	83
Kota Jambi	47	20	9	12
Kota Sungai Penuh	9	4	11	51
JAMBI	271	398	235	947

TABEL : 09.3 (Sambungan - Continuation)
TABLE

Kabupaten/Kota <i>Province</i>	Kios Sarana Produksi Pertanian <i>Agricultural Production Stall(s)</i>		
	KUD <i>Village Cooperative Unit</i>	BUM Desa <i>Village Government Enterprise</i>	Non-KUD/ BUM Desa <i>Non-Village Cooperative Unit/ Village Government Enterprise</i>
(1)	(6)	(7)	(8)
Kerinci	-	8	102
Merangin	7	12	83
Sarolangun	2	6	39
Batang Hari	8	9	48
Muaro Jambi	17	17	69
Tanjung Jabung Timur	3	3	46
Tanjung Jabung Barat	10	22	43
Tebo	3	20	50
Bungo	12	12	51
Kota Jambi	-	-	9
Kota Sungai Penuh	-	3	19
JAMBI	62	112	559

TABEL : 09.4 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN FASILITAS PERKREDITAN SELAMA SETAHUN TERAKHIR
TABLE : 09.4 NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY OF CREDIT FACILITY WITHIN LAST YEAR

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kredit Usaha Rakyat (KUR) <i>Micro Credit Program</i>	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) <i>Loan for Food Sustainability Program and Energy</i>	Kredit Usaha Kecil (KUK) <i>Credit for Small Enterprises</i>	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) <i>Joint Business Group</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	214	-	22	24
Merangin	88	1	20	26
Sarolangun	106	-	10	14
Batang Hari	110	2	21	41
Muaro Jambi	122	5	28	45
Tanjung Jabung Timur	73	2	9	18
Tanjung Jabung Barat	115	3	10	25
Tebo	94	3	17	22
Bungo	125	1	8	14
Kota Jambi	39	9	23	43
Kota Sungai Penuh	52	2	17	19
JAMBI	1 138	28	185	291

TABEL : 09.5 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN DAN JENIS INDUSTRI KECIL DAN MIKRO
TABLE : 09.5 NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY AND TYPE OF SMALL AND MICRO INDUSTRY

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Industri dari Kulit Leather Industry	Industri dari Kayu Wood Industry	Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam Precious Metals and Metal Industry	Industri Anyaman Cane Work Industry	Industri Gerabah/ Keramik/ Batu Ceramic Industry	Industri dari Kain/ Tenun Clothes/ Weaving Industry	Industri Makanan dan Minuman Food and Beverage Industry	Industri Lainnya Other Industry
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kerinci	1	102	31	13	24	28	65	10
Merangin	-	79	14	21	19	16	32	11
Sarolangun	-	71	7	14	21	8	29	14
Batang Hari	1	75	4	21	12	9	26	5
Muaro Jambi	2	70	6	19	25	11	38	4
Tanjung Jabung Timur	1	47	21	24	3	6	48	12
Tanjung Jabung Barat	-	73	19	39	9	13	56	12
Tebo	-	65	11	17	14	20	26	10
Bungo	-	77	13	11	16	41	53	8
Kota Jambi	2	41	11	10	7	28	46	8
Kota Sungai Penuh	-	20	2	5	4	8	24	17
JAMBI	7	720	139	194	154	188	443	111

TABEL : 09.6 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN BANK
TABLE : 09.6 NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY OF BANK

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jenis Bank <i>The Type of Bank</i>			Tidak Ada Bank <i>No Bank</i>
	Bank Umum Pemerintah <i>Government Bank</i>	Bank Umum Swasta <i>Private Bank</i>	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) <i>Rural Bank</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	16	2	2	271
Merangin	15	2	3	199
Sarolangun	10	5	3	147
Batang Hari	10	2	-	114
Muaro Jambi	13	1	3	141
Tanjung Jabung Timur	9	1	1	84
Tanjung Jabung Barat	12	3	3	121
Tebo	11	1	-	101
Bungo	13	4	1	138
Kota Jambi	31	15	10	27
Kota Sungai Penuh	4	3	2	61
JAMBI	144	39	28	1 404

TABEL : 09.7 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN SARANA PENUNJANG EKONOMI**
TABLE : 09.7 **NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY AVAILABILITY OF ECONOMIC SUPPORTING FACILITIES**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Baitul Maal Wa Tamwil (BMI) Sharia Financial Services Cooperative	Pegadaian Pawnshops	Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Automated Teller Machines	Bengkel Mobil/Motor Car/ Motorcycle Repair	Salon Kecantikan Beauty Salon	Agen Tiket/ Travel/Biro Perjalanan Ticket/Travel Agent	Agen Bank Agent Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kerinci	-	2	14	169	80	37	78
Merangin	1	4	16	176	43	39	75
Sarolangun	2	3	11	121	38	20	98
Batang Hari	-	6	21	106	43	10	47
Muaro Jambi	-	4	16	123	68	28	67
Tanjung Jabung Timur	5	2	9	80	36	16	35
Tanjung Jabung Barat	-	1	23	112	35	23	39
Tebo	-	2	12	104	37	13	55
Bungo	2	2	21	124	50	36	65
Kota Jambi	3	32	44	56	54	37	27
Kota Sungai Penuh	3	2	11	42	21	20	40
JAMBI	16	60	198	1 213	505	279	626

<https://jambi.bps.go.id>

10

KEAMANAN

SECURITY



<https://jambi.bps.go.id>

Penjelasan Teknis Keamanan

1. Perkelahian Massal adalah perkelahian yang terjadi secara massal melibatkan banyak pelaku antara lain: antar kelompok masyarakat, antar pelajar, antar suku, atau lainnya yang terjadi di desa selama setahun terakhir.
2. Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal adalah orang atau sekelompok orang yang berinisiatif secara aktif untuk mendamaikan massa yang sedang bertikai.
 - a. Aparat Keamanan meliputi aparat kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Pengamanan (Satpam), dan sebagainya.
 - b. Aparat Pemerintah meliputi aparat pemerintah daerah, kecamatan, desa dan sebagainya.
 - c. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau wibawa di lingkungannya. Contoh: Ketua RT/RW, Ketua Adat, pengurus ormas, dan sebagainya.
 - d. Tokoh Agama adalah orang yang memiliki kharisma dalam agama dan menjadi panutan orang-orang sekitar. Contoh: ulama/ustadz, pendeta, dan sebagainya.
3. Tindak Kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja/tidak, telah terjadi/ baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta, benda, kehormatan dan lainnya serta tindakan tersebut dapat diancam hukuman penjara/kurungan. Tindak kejahatan mencakup pencurian, penipuan, penganiayaan, dan sebagainya.

Technical Notes Security

1. *Massive Fighting Incident is a fight in bulk that involves many actors such as: among the society, students, ethnic groups, or others in the village during the last year.*
2. *Initiator of Problem Solving is the person or group of people who actively take the initiative to reconcile the masses who are fighting:*
 - a. *Security Force includes the police, military, civil service police unit, security unit and so on.*
 - b. *Government Official includes the local government officials, district, village, and so on.*
 - c. *Community Figure is someone who has influence or authority in their communities. For example: Head of RT/RW, Customary Chair, organization administrator, and so on.*
 - d. *Religious Figure is people who have charisma in religion and become role models of people around. For example: ustadz, pastor, and so on.*
3. *Crime is any act both intentional and not, has occurred or a trial, that can injure others in terms of body, soul, property, objects, and other honors, and such action that may be subjected to punishable with imprisonment. Crime includes theft, fraud, abuse, etc.*

4. Pos Polisi adalah tempat polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah sekitar, termasuk Polisi Sektor (Polsek), Polisi Resort (Polres), dan Polisi Daerah (Polda).
 - a. Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan.
 - b. Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten.
 - c. Kepolisian Daerah (Polda) adalah struktur komando Kepolisian Indonesia di tingkat provinsi.
4. *Police Stations is a place where the police maintain security around the region, includes the sector police, the resort police, and the regional police.*
 - a. *The Sector Police is the Indonesian police command structure at the district level.*
 - b. *The Resort Police is the Indonesian police command structure at the regency level.*
 - c. *The Regional Police is the Indonesian police command structure at the province level.*

TABEL : 10.1 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS PERKELAHIAN MASSAL YANG TERJADI SELAMA SETAHUN TERAKHIR**
TABLE : 10.1 **NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY TYPE OF MASSIVE FIGHTING INCIDENT WITHIN LAST YEAR**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Antar Kelompok Masyarakat <i>Among Community Groups</i>	Kelompok Masyarakat Antar Desa/ Kelurahan <i>Between Rural Communities</i>	Kelompok Masyarakat dengan Aparat Keamanan <i>Community vs. Security Forces</i>	Kelompok Masyarakat dengan Aparat Pemerintah <i>Community vs. Government Officials</i>	Pelajar/ Mahasiswa <i>Among Students</i>	Antar Suku <i>Ethnic Group</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kerinci	3	6	-	1	4	-	-
Merangin	1	6	-	-	2	1	1
Sarolangun	-	1	-	-	-	-	1
Batang Hari	-	-	-	-	-	-	-
Muaro Jambi	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-	1	-	-
Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-	-	-
Tebo	1	1	-	-	1	-	2
Bungo	2	7	-	1	2	-	-
Kota Jambi	-	-	-	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	-	1	-	-	1	-	-
JAMBI	7	22	-	2	11	1	4

TABEL : 10.2 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MENGALAMI KEJADIAN PERKELAHIAN MASSAL DAN KATEGORI KORBAN
 TABLE : 10.2 NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS WITH MASSIVE FIGHTING INCIDENT AND TYPE OF VICTIM

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Desa yang Mengalami Perkelahian Massal <i>Village With Massive Fighting Incident</i>	Jenis Korban/ <i>The Type of Victim</i>	
		Meninggal <i>Died</i>	Luka-luka <i>Injured</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	11	-	7
Merangin	10	-	9
Sarolangun	2	-	1
Batang Hari	-	-	-
Muaro Jambi	-	-	-
Tanjung Jabung Timur	1	-	1
Tanjung Jabung Barat	-	-	-
Tebo	5	-	3
Bungo	10	-	5
Kota Jambi	-	-	-
Kota Sungai Penuh	2	-	2
JAMBI	41	-	28

TABEL : 10.3 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT INISIATOR PENYELESAIAN PERKELAHIAN MASSAL YANG PALING SERING TERJADI SETAHUN TERAKHIR**
TABLE : 10.3 **NUMBER OF VILLAGES / SUB-DISTRICTS BY INITIATOR/MEDIATOR OF MASSIVE FIGHTING INCIDENT THAT MOST OFTEN OCCUR WITHIN LAST YEAR**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Aparat Keamanan <i>Security Forces</i>	Aparat Pemerintah <i>Government Officials</i>	Tokoh Masyarakat <i>Community Figure</i>	Tokoh Agama <i>Religious Figure</i>	Lainnya <i>Others</i>	Tidak ada Inisiator <i>No Initiator</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	9	6	8	2	-	-
Merangin	4	7	8	5	1	-
Sarolangun	-	1	1	-	-	-
Batang Hari	-	-	-	-	-	-
Muaro Jambi	-	-	-	-	-	-
Tanjung Jabung Timur	1	1	1	1	-	-
Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-	-
Tebo	2	3	2	1	-	-
Bungo	3	5	7	4	2	-
Kota Jambi	-	-	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	-	1	-	-	1	-
JAMBI	19	24	27	13	4	-

TABEL : 10.4
TABLE
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MENGALAMI KEJADIAN TINDAK KEJAHATAN SELAMA SETAHUN TERAKHIR MENURUT JENIS TINDAK KEJAHATAN
NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS WITH INCIDENCE OF CRIME WITHIN LAST YEAR BY TYPE OF CRIMINAL OFFENSE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Pencurian <i>Theft</i>	Pencurian dengan Kekerasan <i>Robbery</i>	Penipuan/ Penggelapan <i>Fraud/ Embezzlement</i>	Penganiayaan <i>Persecution</i>	Pembakaran <i>Arson</i>	Perkosaan/ Kejahatan Terhadap Kesusilaan <i>Rape/Crime Against Decency</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	133	-	8	3	1	1
Merangin	98	11	23	14	6	6
Sarolangun	92	11	13	6	2	2
Batang Hari	96	9	10	7	3	3
Muaro Jambi	109	15	22	12	6	4
Tanjung Jabung Timur	40	1	11	2	1	3
Tanjung Jabung Barat	82	6	32	9	1	2
Tebo	87	8	21	9	4	11
Bungo	101	9	19	8	2	15
Kota Jambi	47	12	18	10	-	7
Kota Sungai Penuh	30	3	3	1	2	-
JAMBI	915	85	180	81	28	54

TABEL : 10.4 (Sambungan – *Continuation*)
TABLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penyalahguna- an/Pengedaran Narkoba <i>Drug Abuse/ Drug Trafficking</i>	Perjudian <i>Gambling</i>	Pembunuhan <i>Murder</i>	Perdagangan Orang <i>Trafficking</i>	Korupsi <i>Corruption</i>	Tidak Ada Tindak Kejahatan <i>No Incident of Crime</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kerinci	13	25	-	-	-	145
Merangin	30	29	2	-	2	104
Sarolangun	45	28	6	-	1	57
Batang Hari	36	21	4	-	-	22
Muaro Jambi	60	48	2	2	-	30
Tanjung Jabung Timur	8	21	3	-	1	43
Tanjung Jabung Barat	31	33	4	-	1	49
Tebo	42	31	6	-	5	18
Bungo	72	31	3	-	2	36
Kota Jambi	37	21	3	1	9	10
Kota Sungai Penuh	13	9	-	-	-	34
JAMBI	387	297	33	3	21	548

TABEL : 10.5
TABEL NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY TYPE OF INCIDENCE OF CRIME THAT MOST OFTEN OCCUR WITHIN LAST YEAR

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Pencurian <i>Theft</i>	Pencurian dengan Kekerasan <i>Robbery</i>	Penipuan/ Penggelapan <i>Fraud/ Embezzlement</i>	Penganiayaan <i>Persecution</i>	Pembakaran <i>Arson</i>	Perkosaan/ Kejahatan Terhadap Kesusilaan <i>Rape/Crime Against Decency</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	123	-	2	-	1	-
Merangin	87	1	2	2	1	1
Sarolangun	67	-	1	-	-	-
Batang Hari	94	1	-	1	-	-
Muaro Jambi	101	2	1	1	1	-
Tanjung Jabung Timur	32	1	3	-	-	1
Tanjung Jabung Barat	66	1	2	-	-	-
Tebo	64	2	1	1	-	-
Bungo	75	-	1	-	-	3
Kota Jambi	36	3	1	-	-	-
Kota Sungai Penuh	27	-	-	-	1	-
JAMBI	772	11	14	5	4	5

TABEL : 10.5 (Sambungan – *Continuation*)
TABLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penyalahgunaan/ Pengedaran Narkoba <i>Drug Abuse/Drug Trafficking</i>	Perjudian <i>Gambling</i>	Pembunuhan <i>Murder</i>	Perdagangan Orang <i>Trafficking</i>	Korupsi <i>Corruption</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kerinci	4	12	-	-	-	142
Merangin	8	9	-	-	-	111
Sarolangun	23	8	1	-	1	101
Batang Hari	5	1	-	-	-	102
Muaro Jambi	10	9	-	-	-	125
Tanjung Jabung Timur	-	13	-	-	-	50
Tanjung Jabung Barat	11	4	1	-	-	85
Tebo	19	7	-	-	-	94
Bungo	33	4	-	-	1	117
Kota Jambi	12	-	-	-	-	52
Kota Sungai Penuh	5	2	-	-	-	35
JAMBI	130	69	2	-	2	1 014

TABEL : 10.6
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS UPAYA WARGA MENJAGA KEAMANAN LINGKUNGAN SELAMA SETAHUN TERAKHIR
TABLE : 10.6
NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY TYPE OF CITIZEN'S EFFORT TO SECURE COMMUNITY WITHIN LAST YEAR

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pembangunan/ Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan <i>Building/ Maintenance Security Post</i>	Pembentukan/ Pengaturan Regu Keamanan <i>Establishing Security Guard</i>	Penambahan Jumlah Anggota Hansip/Linmas <i>Raising Civil Defense/Civil Protection Personnel</i>	Pelaporan Tamu Menginap Lebih dari 24 Jam <i>Reporting Guests Staying More Than 24 Hours</i>	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga <i>Activation of Security System from Citizen Initiative</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	150	68	42	147	114
Merangin	167	125	121	153	132
Sarolangun	100	51	18	81	76
Batang Hari	75	61	56	89	63
Muaro Jambi	130	99	49	121	119
Tanjung Jabung Timur	78	64	22	78	65
Tanjung Jabung Barat	105	67	46	104	85
Tebo	90	67	28	82	72
Bungo	131	89	26	91	97
Kota Jambi	52	42	14	51	51
Kota Sungai Penuh	34	16	4	32	13
JAMBI	1 112	749	426	1 029	887

TABEL : 10.7 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN POS POLISI DAN KEMUDAHAN AKSES KE POS POLISI TERDEKAT**
TABLE : 10.7 **NUMBER OF VILLAGES / SUB-DISTRICTS BY EXISTENCE OF POLICE STATION AND EASY ACCESS TO NEAREST POLICE STATION**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pos Polisi (Termasuk Polsek, Polres, dan Polda) <i>Police Station (Includes Sector Police, Resort Police, and Regional Police)</i>		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Pos Polisi) <i>The Ease of Access to Nearest Police Station (For Village/Sub-District That Not Having Police Station)</i>			
	Ada <i>Available</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	Sangat Mudah <i>Very Easy</i>	Mudah <i>Easy</i>	Sulit <i>Difficult</i>	Sangat Sulit <i>Very Difficult</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	16	271	55	205	11	-
Merangin	17	198	25	138	29	6
Sarolangun	19	139	28	84	23	4
Batang Hari	12	112	11	80	20	1
Muaro Jambi	22	133	15	100	14	4
Tanjung Jabung Timur	27	66	15	32	18	1
Tanjung Jabung Barat	40	94	9	58	25	2
Tebo	13	99	16	65	16	2
Bungo	15	138	36	99	3	-
Kota Jambi	21	41	21	20	-	-
Kota Sungai Penuh	5	64	39	25	-	-
JAMBI	207	1 355	270	906	159	20

<https://jambi.bps.go.id>

11

OTONOMI DESA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

VILLAGE AUTONOMY AND COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAMS



<https://jambi.bps.go.id>

Penjelasan Teknis Otonomi Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Sistem Informasi Desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem Informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
2. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
3. Dana Desa Bersumber dari APBN adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pendapatan Asli Desa (PAD) adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. PAD berasal dari penerimaan tanah kas desa, pasar/kios desa, pemandian umum yang diurus desa, daya tarik wisata, bangunan

Technical Notes Village Autonomy and Community Empowerment Programs

1. *Village Information Systems include village data, village development data, rural areas, as well as other information relating to general rural development and rural areas development. Village Information System is managed by the Village Government and can be accessed by the village community and all stakeholders.*
2. *Village Financial System (SISKEUDES) is an information system application developed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in order to improve the quality of village financial governance.*
3. *Village Funds Sourced from the State Budget are the funds sourced from the state budget for revenues allocated for the villages that are transferred through the district/city regional budget and are used to finance government administration, development programs implementation, community development, and community empowerment at village level.*
4. *Village Generated Revenue is an income generated from the village government efforts to raise funds for financing the routine activities/development of the village. Sources of the village generated income are mostly from the village retributions on cash land receipts, village market/stall, public bath facilities operated by the village, tourist attractions, and also revenues*

- milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat, dan gotong royong masyarakat, termasuk juga penerimaan yang berasal dari pungutan desa dan hasil usaha desa.
- from village-owned buildings that are rented out, other village assets, community contribution, and community mutual cooperation, and revenues from village fees and village business.*
5. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit sepuluh persen (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

5. Proportion of the Local Tax and Retribution is the proportion of the revenues from regency/city taxes and retributions to the village at least 10 percent (ten percent) of the realization of revenue from taxes and retribution in the regency/city level.
 6. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa.

6. Village Fund Allocation is the funds allocated by the regency/city government to the village, which is derived from balance budget of central and local finance, that is received by regency/city.
 7. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

7. Financial Assistance from Provincial Budget and Regency/City Budget is the financial assistance from the provincial and regency/city governments, which is derived from the provincial regional budget and the regency/city regional budget.
 8. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, seperti pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, luar negeri, swasta, dan lainnya.

8. Grants and Donations from Third Party, such as regency/city government, provincial government, central government, foreign, private, and others.
 9. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

9. Village Asset is village property that is derived from the village original wealth, purchased or obtained at the budget village or other legal rights acquisition (Law No. 6 Year 2014 about Village). Village assets can be Village Owned Enterprise, village land; village build-

Aset desa dapat berupa tanah kas desa/ulayat; bangunan desa, misalnya: kantor kepala desa, balai desa, d.l.l; pasar desa, misalnya: pasar hewan, pelelangan ikan, dan pelelangan hasil pertanian; atau aset desa lainnya.

ings, for example: village hall, etc.; village market, for example: animal market, fish auction, and agricultural products auctions; or other village assets.

<https://jambi.bps.go.id>

<https://jambi.bps.go.id>

TABEL : 11.1
BANYAKNYA DESA MENURUT KEBERADAAN SISTEM INFORMASI DESA DAN SISTEM KEUANGAN DESA
NUMBER OF VILLAGES BY AVAILABILITY OF VILLAGE INFORMATION SYSTEM AND VILLAGE FINANCIAL SYSTEM

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sistem Informasi Desa <i>Village Information System</i>			Sistem Keuangan Desa <i>Village Financial System</i>		
	Ada, Diperbaharui <i>Updated</i>	Ada, Tidak Diperbaharui <i>Not Updated</i>	Tidak Ada <i>None</i>	Ada, Diperbaharui <i>Updated</i>	Ada, Tidak Diperbaharui <i>Not Updated</i>	Tidak Ada <i>None</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	1	2	282	240	28	17
Merangin	-	-	205	186	19	-
Sarolangun	1	-	148	149	-	-
Batang Hari	-	-	110	105	5	-
Muaro Jambi	-	-	150	137	2	11
Tanjung Jabung Timur	-	-	73	71	2	-
Tanjung Jabung Barat	-	-	114	114	-	-
Tebo	2	1	104	100	7	-
Bungo	-	-	141	124	12	5
Kota Jambi	-	-	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	-	-	65	60	5	-
JAMBI	4	3	1 392	1 286	80	33

TABEL 11.2 BANYAKNYA DESA MENURUT SUMBER PENDAPATAN DESA TAHUN 2017
TABLE 11.2 NUMBER OF VILLAGES BY THE SOURCE OF VILLAGE'S BUDGET IN 2017

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Dana Desa Bersumber dari APBN <i>Village Fund Sourced from State Budget</i>	Pendapatan Asli Desa (PADes) <i>Village Generated Revenue</i>	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <i>Proportion of the Local Tax and Retribution</i>	Alokasi Dana Desa (ADD) <i>Village Fund Allocation Revenue</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	284	34	276	285
Merangin	205	58	198	191
Sarolangun	149	20	-	149
Batang Hari	110	75	109	110
Muaro Jambi	150	94	138	150
Tanjung Jabung Timur	73	10	73	73
Tanjung Jabung Barat	114	36	111	111
Tebo	107	48	100	107
Bungo	141	31	141	137
Kota Jambi	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	65	17	1	59
JAMBI	1 398	423	1 147	1 372

TABEL : 11.2 (Sambungan - Continuation)
TABLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi <i>Financial Assistance from Provincial Budget</i>	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota <i>Financial Assistance from Regency/Municipality Budget</i>	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga <i>Grants and Donations from Third Party</i>	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah <i>Other Legitimate Village Income</i>
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kerinci	263	3	2	23
Merangin	160	45	10	26
Sarolangun	149	149	-	2
Batang Hari	110	-	3	5
Muaro Jambi	134	67	4	5
Tanjung Jabung Timur	69	-	-	5
Tanjung Jabung Barat	99	26	7	6
Tebo	104	-	1	1
Bungo	121	135	10	3
Kota Jambi	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	60	26	-	32
JAMBI	1 269	451	37	108

TABEL : 11.3
TABLE

BANYAKNYA DESA MENURUT KEBERADAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA 2018, DAN PERATURAN KEPALA DESA 2017

NUMBER OF VILLAGES BY AVAILABILITY OF VILLAGE MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN (RPJM), VILLAGE GOVERNMENT WORK PLAN 2018, AND HEADMAN REGULATION 2017

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) <i>Village Medium-term Development Plan</i>	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 2018 <i>Village Government Work Plan 2018</i>	Peraturan Kepala Desa 2017 <i>Headman Regulation 2017</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kerinci	277	228	251
Merangin	203	202	148
Sarolangun	143	143	88
Batang Hari	110	108	87
Muaro Jambi	150	149	89
Tanjung Jabung Timur	71	72	60
Tanjung Jabung Barat	110	114	78
Tebo	102	106	73
Bungo	135	139	81
Kota Jambi	-	-	-
Kota Sungai Penuh	65	65	45
JAMBI	1 366	1 326	1 000

TABEL : 11.4 **BANYAKNYA DESA MENURUT KEPEMILIKAN ASET DESA**
TABLE : 11.4 **NUMBER OF VILLAGES BY OWNERSHIP OF VILLAGE ASSET**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tanah Kas Desa/Ulayat <i>Village's Communal Land</i>	Bangunan Milik Desa <i>Village's Building</i>	Pasar Desa <i>Village's Market</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	181	256	30	99
Merangin	171	204	54	124
Sarolangun	113	147	22	56
Batang Hari	99	109	23	59
Muaro Jambi	124	149	28	64
Tanjung Jabung Timur	48	73	12	34
Tanjung Jabung Barat	58	114	33	46
Tebo	81	107	50	51
Bungo	110	141	44	74
Kota Jambi	-	0	-	-
Kota Sungai Penuh	42	60	6	31
JAMBI	1 027	1 360	302	638

TABEL : 11.5 **BANYAKNYA DESA MENURUT KEBERADAAN**
KERJASAMA DESA TAHUN 2018
TABLE **NUMBER OF VILLAGES BY THE AVAILABILITY OF**
VILLAGE COOPERATION IN 2018

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kebudayaan Kerjasama <i>Availability of Village Cooperation</i>	
	Antar Desa <i>Between Villages</i>	Desa dengan Pihak Ketiga <i>With Third Parties</i>
	(1)	(2)
Kerinci	69	23
Merangin	57	33
Sarolangun	13	10
Batang Hari	56	13
Muaro Jambi	56	29
Tanjung Jabung Timur	15	17
Tanjung Jabung Barat	44	28
Tebo	31	14
Bungo	34	26
Kota Jambi	-	-
Kota Sungai Penuh	13	16
JAMBI	388	209

TABEL : 11.6 **BANYAKNYA DESA MENURUT KEBERADAAN PENDAMPING DESA**
TABLE : 11.6 **NUMBER OF VILLAGES BY THE AVAILABILITY OF VILLAGE ASSISTANCE**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Ada, Aktif <i>Available, Active</i>	Ada, Tidak Aktif <i>Available, Not Active</i>	Tidak Ada <i>Not Available</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	246	22	17	285
Merangin	185	13	7	205
Sarolangun	136	3	10	149
Batang Hari	103	-	7	110
Muaro Jambi	129	7	14	150
Tanjung Jabung Timur	57	14	2	73
Tanjung Jabung Barat	101	5	8	114
Tebo	98	4	5	107
Bungo	128	11	2	141
Kota Jambi	-	-	-	-
Kota Sungai Penuh	58	2	5	65
JAMBI	1 241	81	77	1 399

**PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN
PEMBERDAYAAN YANG SELAIN BERSUMBER DARI DANA DESA SELAMA
TAHUN 2015-2017**

TABEL

TABLE : 11.7 NUMBER OF VILLAGES/SUB-DISTRICTS BY THE AVAILABILITY OF
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT PROGRAM/ACTIVITY
THAT FUNDED APART FROM VILLAGE FUND IN 2015-2017

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pembangunan Sarana dan Prasarana <i>Infrastructure Development</i>	Pemberdayaan <i>Empowerment</i>
(1)	(2)	(3)
Kerinci	182	138
Merangin	128	100
Sarolangun	139	106
Batang Hari	88	48
Muaro Jambi	111	102
Tanjung Jabung Timur	88	52
Tanjung Jabung Barat	105	85
Tebo	92	79
Bungo	137	107
Kota Jambi	55	35
Kota Sungai Penuh	44	31
JAMBI	1 169	883

12

KETERANGAN PEMERINTAH DESA

INFORMATION OF VILLAGE GOVERNMENT



<https://jambi.bps.go.id>

Penjelasan Teknis Keterangan Pemerintah Desa

1. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).
2. Kepala Desa/Lurah adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Sekretaris Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
4. Sekretariat Desa/Kelurahan dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat desa/kelurahan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
5. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

Technical Notes Information of Village Government

1. *The Village Government is the village head or called by another name helped by the village apparatus as an element of village administration. The village apparatus consists of village secretariat, implementing territorial, and technical territorial (Law No. 6 Year 2014 about Village).*
2. *Head of Village/Sub-District is a village/sub district government official who have the authority, duties and obligations to organize and manage their village households and carry out duties from the Government and Regional Governments.*
3. *Village/Sub-District Secretary hold the position as the leadership element of the Village Secretariat. Village Secretary/Sub-District Secretary is in charge of assisting the head of village in the field of government administration.*
4. *Village/Sub-District Secretariat is led by village secretary who is assisted by elements of secretarial staff assigned to assist the head of village in the field of public administration. Village Secretariat/Sub-District Secretariat consists of 3 (three) divisions that are in charge in, administration and general affairs, financial affairs, and planning, and at least consist of 2 (two) divisions, general affairs and planning, and financial affairs.*
5. *Teritorial Administrator is an assistant element of the village head as a teritorial task force.*

6. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit dua seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

6. *Technical Administrator is an assistant element of the head of village to support operational task or activities. Technical administrator consists of 3 (three) sections namely the government affairs section, the welfare section, and the public service section, and at least 2 (two) sections namely the government affairs section, and the welfare and public service section.*

<https://jambi.bps.go.id>

TABEL : 12.1 **BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN**
TABLE : 12.1 **NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY EXISTENCE OF VILLAGE/SUBDISTRICT GOVERNMENT**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kepala Desa/Lurah <i>Head of Village/Sub-District</i>	Sekretaris Desa/ Sekertaris Kelurahan <i>The Village/Sub-District Secretary</i>	Pelaksana Kewilayahan <i>Territorial Administrator</i>	Pelaksana Teknis <i>Technical Administrator</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kerinci	266	269	287	183
Merangin	215	211	215	214
Sarolangun	134	152	158	158
Batang Hari	117	121	124	120
Muaro Jambi	152	152	155	149
Tanjung Jabung Timur	90	80	93	89
Tanjung Jabung Barat	125	129	134	131
Tebo	92	106	112	110
Bungo	133	150	153	151
Kota Jambi	61	56	62	58
Kota Sungai Penuh	67	68	69	65
JAMBI	1 452	1 494	1 562	1 428

TABEL 12.2 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS KELAMIN KEPALA DESA/LURAH DAN SEKRETARIS DESA/KELURAHAN
 TABLE : 12.2 NUMBER OF VILLAGES /SUB-DISTRICTS BY SEX OF VILLAGE HEAD/SUBDISTRICT HEAD AND VILLAGE SECRETARY/SUB-DISTRICT SECRETARY

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kepala Desa/Lurah <i>The Village Head/Sub-District Head</i>			Sekretaris Desa/Lurah <i>The Village Secretary/Sub-District Secretary</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kerinci	263	3	266	263	6	269
Merangin	213	2	215	204	7	211
Sarolangun	132	2	134	138	14	152
Batang Hari	115	2	117	106	15	121
Muaro Jambi	146	6	152	136	16	152
Tanjung Jabung Timur	86	4	90	74	6	80
Tanjung Jabung Barat	118	7	125	112	17	129
Tebo	88	4	92	97	9	106
Bungo	131	2	133	140	10	150
Kota Jambi	53	8	61	29	27	56
Kota Sungai Penuh	64	3	67	58	10	68
JAMBI	1 409	43	1 452	1 357	137	1 494

TABEL 12.3 BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KELOMPOK UMUR KEPALA DESA/LURAH DAN SEKRETARIS DESA/KELURAHAN
TABLE 12.3 NUMBER OF VILLAGES/SUB-DISTRICTS BY AGE GROUP OF VILLAGE HEAD/ SUB-DISTRICT HEAD AND VILLAGE SECRETARY/SUB-DISTRICT SECRETARY

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kelompok Umur (Tahun) / Age Group (Year)											
	Kepala Desa/Lurah The Village Head/Sub-District Head						Sekretaris Desa/Lurah The Village Secretary/Sub-District Secretary					
	≤24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55+	Jumlah Total	≤24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55+	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kerinci	-	14	94	130	28	266	1	86	88	85	9	269
Merangin	-	14	94	91	16	215	8	80	80	39	4	211
Sarolangun	-	11	46	61	16	134	5	41	54	42	10	152
Batang Hari	-	2	44	55	16	117	8	46	53	11	3	121
Muaro Jambi	-	12	61	67	12	152	3	59	52	32	6	152
Tanjung Jabung Timur	-	6	35	44	5	90	2	33	36	9	-	80
Tanjung Jabung Barat	-	11	43	59	12	125	2	63	53	10	1	129
Tebo	-	7	34	45	6	92	2	38	30	30	6	106
Bungo	-	7	38	69	19	133	-	44	58	44	4	150
Kota Jambi	-	7	12	28	14	61	-	12	12	24	8	56
Kota Sungai Penuh	-	3	17	37	10	67	6	27	23	10	2	68
JAMBI	-	94	518	686	154	1 452	37	529	539	336	53	1 494

TABEL : 12.4
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN KEPALA DESA/LURAH
TABLE NUMBER OF VILLAGES/SUB-DISTRICTS BY EDUCATION ATTAINMENT OF THE VILLAGE/SUB-DISTRICTS HEAD

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tidak Pernah Sekolah <i>Never been to School</i>	Tidak Tamat SD <i>Not Yet Completed Primary School</i>	Tamat Sekolah/ <i>Graduated</i>		
			SD dan Sederajat <i>Primary School</i>	SMP dan Sederajat <i>Junior High School</i>	SMU dan Sederajat <i>Senior High School</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	-	-	-	10	183
Merangin	-	-	-	18	156
Sarolangun	-	-	-	12	90
Batang Hari	-	-	-	8	84
Muaro Jambi	-	-	-	18	100
Tanjung Jabung Timur	-	-	-	2	61
Tanjung Jabung Barat	-	-	-	12	78
Tebo	-	-	-	7	71
Bungo	-	-	-	26	86
Kota Jambi	-	-	-	-	8
Kota Sungai Penuh	-	-	-	1	49
JAMBI	-	-	-	114	966

TABEL : 12.4 (Sambungan - Continuation)
TABLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tamat Sekolah/ <i>Graduated</i>				Jumlah <i>Total</i>
	Akademi/DIII <i>Academy/ Associate's Degree</i>	Diploma IV/S1 <i>Bachelor Degree/ Undergra-duate</i>	S2 <i>Graduate</i>	S3 <i>Post Graduate</i>	
	(7)	(8)	(9)	(10)	
Kerinci	20	52	1	-	266
Merangin	6	34	1	-	215
Sarolangun	5	25	2	-	134
Batang Hari	5	20	-	-	117
Muaro Jambi	1	32	1	-	152
Tanjung Jabung Timur	5	22	-	-	90
Tanjung Jabung Barat	5	30	-	-	125
Tebo	4	10	-	-	92
Bungo	5	13	3	-	133
Kota Jambi	3	46	4	-	61
Kota Sungai Penuh	3	12	2	-	67
JAMBI	62	296	14	-	1 452

TABEL : 12.5
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN SEKRETARIS DESA/LURAH
TABLE NUMBER OF VILLAGES/SUB-DISTRICTS BY EDUCATION ATTAINMENT OF THE VILLAGE/SUB-DISTRICTS SECRETARY

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tidak Pernah Sekolah <i>Never been to School</i>	Tidak Tamat SD <i>Not Yet Completed Primary School</i>	Tamat Sekolah/ <i>Graduated</i>		
			SD dan Sederajat <i>Primary School</i>	SMP dan Sederajat <i>Junior High School</i>	SMU dan Sederajat <i>Senior High School</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	-	-	-	3	107
Merangin	-	-	-	6	122
Sarolangun	-	-	-	5	99
Batang Hari	-	-	-	1	61
Muaro Jambi	-	-	-	1	83
Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-	52
Tanjung Jabung Barat	-	-	-	1	67
Tebo	-	-	-	1	71
Bungo	-	-	1	12	88
Kota Jambi	-	-	-	-	9
Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	25
JAMBI	-	-	1	30	784

TABEL : 12.5 (Sambungan - *Continuation*)
 TABLE

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Tamat Sekolah/ <i>Graduated</i>				Jumlah <i>Total</i>
	Akademi/DIII <i>Academy/ Associate's Degree</i>	Diploma IV/S1	S2	S3	
		<i>Bachelor Degree/ Undergra-duate</i>	<i>Graduate</i>	<i>Post Graduate</i>	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kerinci	21	137	1	-	269
Merangin	11	70	2	-	211
Sarolangun	7	41	-	-	152
Batang Hari	7	52	-	-	121
Muaro Jambi	7	61	-	-	152
Tanjung Jabung Timur	4	24	-	-	80
Tanjung Jabung Barat	9	52	-	-	129
Tebo	6	28	-	-	106
Bungo	4	45	-	-	150
Kota Jambi	3	42	2	-	56
Kota Sungai Penuh	11	32	-	-	68
JAMBI	90	584	5	-	1 494

<https://jambi.bps.go.id>

LAMPIRAN

APPENDIX

<https://ijambiposps.guide>



<https://jambi.bps.go.id>



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

PODES2018- DESA
Disimpan di BPS Kabupaten/Kota

PENDATAAN POTENSI DESA/KELURAHAN 2018

RAHASIA

I. KETERANGAN TEMPAT				
101	Provinsi			<input type="text"/>
102	Kabupaten/Kota *)			<input type="text"/>
103	Kecamatan			<input type="text"/>
104	Desa/Kelurahan *)			<input type="text"/>
105	Status Daerah	Perkotaan - 1	Perdesaan - 2	<input type="checkbox"/>
106	Status definitif desa dan operasional desa/kelurahan:			
	a. Ada wilayah desa/kelurahan dengan batas yang jelas	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
	b. Ada penduduk yang menetap di wilayah desa/kelurahan	Ya - 3	Tidak - 4	<input type="checkbox"/>
	c. Ada pemerintah desa/kelurahan	Ya - 5	Tidak - 6	<input type="checkbox"/>
<i>Jika R106 a, b atau c ada yang berkode 2,4, atau 6, maka lanjutkan ke R201 sampai R208 kemudian STOP</i>				
107	Lokasi pelayanan pemerintahan desa/kelurahan:			
	Alamat lengkap		Kode Pos: <input type="text"/>
			
II. KETERANGAN PETUGAS DAN NARASUMBER				
201	Nama Pencacah		205	Nama Pengawas/Pemeriksa
202	NIP/NIM	<input type="text"/>	206	NIP/NIM
203	Tanggal Pencacahan	Kunjungan I	Kunjungan II	Kunjungan III
204	Tanda Tangan		207	Tanggal Pemeriksaan
208	Tanda Tangan		208	Tanda Tangan
209	Narasumber :			
	Nama	Jabatan	No. Telepon	Email
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			

*) Coret yang tidak sesuai

**DAFTAR INI DIISI OLEH PETUGAS
BERDASARKAN HASIL PENCACAHAN/
WAWANCARA DENGAN NARASUMBER TERKAIT
YANG BERWENANG DAN RELEVAN, SERTA
PENELUSURAN DOKUMEN DESA/KELURAHAN**

..... Mei 2018
Mengetahui
Kepala Desa/Lurah*)

Nama dan Stempel

III. KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN			
301	Status pemerintahan: Desa - 1 Kelurahan - 2 UPT/SPT - 3		<input type="checkbox"/>
302	a. Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R303		<input type="checkbox"/>
	b. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK):	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan selama tahun 2017:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
303	Peta desa/kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota atau Gubernur: Ada - 1 Tidak ada - 2		<input type="checkbox"/>
304	a. Keberadaan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di bawah desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R305		<input type="checkbox"/>
	b. Banyaknya jenjang SLS di bawah desa/kelurahan:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Banyaknya SLS terkecil di desa/kelurahan:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
305	a. Letak wilayah desa/kelurahan: 1. Wilayah desa/kelurahan terletak di sebanyak pulau. 2. Tuliskan nama-nama pulau *): a) c) b) d) <small>*) Jika terdapat lebih dari 4 pulau, tuliskan di Blok Catatan</small>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Topografi wilayah desa/kelurahan: Lereng/Puncak - 1 Lembah - 2 Dataran - 3		<input type="checkbox"/>
	c. Keberadaan permukiman penduduk di lereng/puncak: Ada - 1 Tidak ada - 2		<input type="checkbox"/>
306	Keberadaan, status, kondisi, dan lokasi kantor kepala desa/lurah:		
	a. Keberadaan kantor kepala desa/lurah: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R307		<input type="checkbox"/>
	b. Status kantor kepala desa/lurah: Aset desa/kelurahan - 1 Bukan aset desa/kelurahan - 2		<input type="checkbox"/>
	c. Kondisi kantor kepala desa/lurah: Layak - 1 Tidak layak - 2		<input type="checkbox"/>
	d. Lokasi kantor kepala desa/lurah: Di dalam wilayah desa/kelurahan - 1 Di luar wilayah desa/kelurahan - 2		<input type="checkbox"/>
307	a. Kegiatan pemerintahan desa/kelurahan utamanya dilaksanakan di: Kantor kepala desa/lurah - 1 Bukan kantor kepala desa/lurah - 2		<input type="checkbox"/>
	b. Koordinat lokasi kegiatan pemerintahan desa/kelurahan: 1. Koordinat: Garis Lintang (Latitude): Lintang Utara (LU) - 1 Lintang Selatan (LS) - 2 Garis Bujur (Longitude) Timur:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2. Ketinggian letak (Altitude) lokasi kegiatan pemerintahan desa/kelurahan dari permukaan air laut (dpl): m	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(Jangan lupa memotret lokasi kantor kepala desa/lurah)		
308	a. Ada wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R309		<input type="checkbox"/>
	b. Jika wilayah desa/kelurahan ada yang berbatasan langsung dengan laut:		
	1. Pemanfaatan laut untuk:		
	a) Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut) Ada - 1 Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut) Ada - 3 Tidak ada - 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Tambak garam Ada - 5 Tidak ada - 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Wisata bahari Ada - 7 Tidak ada - 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e) Transportasi umum Ada - 1 Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Keberadaan tanaman mangrove (misalnya: bakau, api-api, pedada, tanjang, dll.) di desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R309		<input type="checkbox"/>	
3. Kondisi mangrove: Baik - 1 Sebagian rusak - 2 Rusak - 3		<input type="checkbox"/>	

309	a. Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap kawasan hutan: <i>Di dalam kawasan hutan - 1 Di tepi/sekitar kawasan hutan - 2 Di luar kawasan hutan - 3 → R401</i>	<input type="checkbox"/>
	b. Fungsi kawasan hutan/hutan : <i>Konservasi - 1 Lindung - 2 Produksi - 3</i>	<input type="checkbox"/>
	c. Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan/hutan: <i>Tinggi - 1 Sedang - 2 Rendah - 3 Tidak tergantung - 4</i>	<input type="checkbox"/>
IV. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN		
401	Penduduk dan keluarga pada 1 Januari 2018:	
	a. Jumlah penduduk laki-laki	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> orang
	c. Jumlah keluarga	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> keluarga
402	a. Keberadaan warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri: <i>Ada - 1 Tidak ada - 2 → R402c Tidak tahu - 3 → R402c</i>	
	b. Jumlah warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri:	
	1. Laki-laki	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> orang
	2. Perempuan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> orang
403	c. Keberadaan agen (seseorang/sekelompok orang/perusahaan) pengerahan TKI ke luar negeri di desa/kelurahan: <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>	
	a. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan berasal dari lapangan usaha: <i>Pertanian - 1 Angkutan, pergudangan, komunikasi - 5</i> <i>Pertambangan dan penggalian - 2 Jasa - 6</i> <i>Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll.) - 3 Lainnya - 7</i> <i>Perdagangan besar/eceran dan rumah makan - 4 (tuliskan)</i>	
	Jika R403a berkode 2 - 7 → R404.	
	b. Jenis komoditi/sub sektor utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan: <i>Padi - 01 Tebu - 12</i> <i>Palawija (jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian, dll.) - 02 Peternakan (sapi, domba, ayam, susu, telur, dll) - 13</i> <i>Hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, tanaman obat-obatan, dll) - 03 Perikanan tangkap (termasuk biota lainnya) - 14</i> <i>Karet - 04 Budidaya tanaman kehutanan (jati, mahoni, sengon, bambu, dll) - 16</i> <i>Kelapa sawit - 05 Pemungutan hasil hutan (madu, gaharu, buah-buahan, kayu bakar, dll) - 17</i> <i>Kopi - 06 Penangkapan satwa liar (babi, ayam hutan, kijang, dll) - 18</i> <i>Kakao - 07 Penangkaran satwa/tumbuhan liar (arwana, buaya, anggrek, dll) - 19</i> <i>Kelapa - 08 Jasa pertanian (pembenihan, sewa traktor, rotan, dll) - 20</i> <i>Lada - 09</i> <i>Cengkeh - 10</i> <i>Tembakau - 11</i>	
c. Jenis prasarana transportasi dari/ke lokasi sentra produksi pertanian di desa/kelurahan: 1. Jenis prasarana transportasi dari/ke lokasi sentra produksi pertanian ke jalan utama desa/kelurahan: <i>Aspal/beton - 1 Tanah - 3 Lainnya - 5</i> <i>Diperkeras (kerikil, batu, dll) - 2 Air - 4 → R404 (tuliskan, misalnya: jalan setapak, kayu/papan, dll.)</i>		
2. Jalan darat dari/ke lokasi sentra produksi pertanian ke jalan utama desa/kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih: <i>Sepanjang tahun - 1 Selama musim kemarau - 3</i> <i>Sepanjang tahun kecuali saat tertentu - 2 Tidak dapat dilalui sepanjang tahun - 4</i> <i>(ketika turun hujan, pasang, dll)</i>		
404	a. Keberadaan produk barang unggulan/utama desa/kelurahan: <i>Ada - 1 Tidak ada - 2 → R501</i>	
	b. Produk barang unggulan/utama desa/kelurahan: 1. Pangan..... <i>(tuliskan)</i>	
	2. Non pangan..... <i>(tuliskan)</i>	
c. Produk barang unggulan/utama desa/kelurahan yang diekspor ke negara lain: <i>Ada, sebagian besar - 1 Ada, sebagian kecil - 2 Tidak ada - 3</i>		<input type="checkbox"/>

V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
501	a. Jumlah keluarga pengguna listrik: 1. PLN (Perusahaan Listrik Negara) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> keluarga 2. Non-PLN (misalnya: swasta, swadaya, atau perseorangan) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> keluarga
	b. Jumlah keluarga bukan pengguna listrik: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> keluarga
	502 a. Penerangan di jalan utama desa/kelurahan: <i>Ada, sebagian besar</i> - 1 <i>Ada, sebagian kecil</i> - 2 <i>Tidak ada</i> - 3 → R503 <input type="checkbox"/> b. Jenis penerangan di jalan utama desa/kelurahan: <i>Listrik diusahakan oleh pemerintah</i> - 1 <i>Listrik diusahakan oleh non pemerintah</i> - 2 <i>Non listrik</i> - 3 <input type="checkbox"/>
503	a. Bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh keluarga: 1. Gas kota <i>Ya</i> - 1 <i>Tidak</i> - 2 1. <input type="checkbox"/> 2. LPG 3 kg <i>Ya</i> - 3 <i>Tidak</i> - 4 2. <input type="checkbox"/> 3. LPG lebih dari 3 kg <i>Ya</i> - 5 <i>Tidak</i> - 6 3. <input type="checkbox"/> 4. Minyak tanah <i>Ya</i> - 7 <i>Tidak</i> - 8 4. <input type="checkbox"/> 5. Kayu bakar <i>Ya</i> - 1 <i>Tidak</i> - 2 5. <input type="checkbox"/> 6. Lainnya <i>Ya</i> - 3 <i>Tidak</i> - 4 6. <input type="checkbox"/> <i>(tuliskan, misalnya: batu bara, arang, dll.)</i>
	b. Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga : (Pilih salah satu kode pada R503a yang dijawab "Ya") <input type="checkbox"/>
	c. Jika R503a.5 berkode 1 , cara memperoleh kayu bakar oleh sebagian besar keluarga: <i>Pembelian</i> - 1 <i>Pengambilan dari luar kawasan hutan/hutan</i> - 3 <input type="checkbox"/> <i>Pengambilan dari kawasan hutan/hutan</i> - 2 <i>Lainnya</i> - 4 <i>(tuliskan)</i>
504	a. Tempat buang sampah keluarga: 1. Tempat sampah, kemudian diangkut <i>Ya</i> - 1 <i>Tidak</i> - 2 1. <input type="checkbox"/> 2. Dalam lubang atau dibakar <i>Ya</i> - 3 <i>Tidak</i> - 4 2. <input type="checkbox"/> 3. Sungai/saluran irigasi/danau/laut <i>Ya</i> - 5 <i>Tidak</i> - 6 3. <input type="checkbox"/> 4. Drainase (got/selokan) <i>Ya</i> - 7 <i>Tidak</i> - 8 4. <input type="checkbox"/> 5. Lainnya <i>Ya</i> - 1 <i>Tidak</i> - 2 5. <input type="checkbox"/> <i>(tuliskan)</i>
	b. Tempat buang sampah sebagian besar keluarga (Pilih salah satu kode pada R504a yang dijawab "Ya"): <input type="checkbox"/>
	c. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS): <i>Ada, digunakan</i> - 1 <i>Ada, tidak digunakan</i> - 2 <i>Tidak ada</i> - 3 <input type="checkbox"/>
505	a. Penggunaan fasilitas buang air besar sebagian besar keluarga di desa/kelurahan: <input type="checkbox"/> <i>Jamban sendiri</i> - 1 <i>Jamban umum</i> - 3 <i>Jamban bersama</i> - 2 <i>Bukan jamban</i> - 4 → R506
	b. Tempat pembuangan akhir tinja sebagian besar keluarga : <i>Tangki/instalasi pengelolaan air limbah</i> - 1 <i>Lubang tanah</i> - 3 <input type="checkbox"/> <i>Sawah/kolam/sungai/danau/laut atau pantai/tanah lapang/kebun</i> - 2 <i>Lainnya</i> - 4
506	Tempat/saluran pembuangan limbah cair dari air mandi/cuci sebagian besar keluarga : <i>Lubang resapan</i> - 1 <i>Dalam lubang atau tanah terbuka</i> - 4 <input type="checkbox"/> <i>Drainase (got/selokan)</i> - 2 <i>Lainnya</i> - 5 <i>Sungai/saluran irigasi/danau/laut</i> - 3 <i>(tuliskan)</i>
507	a. Sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari: <i>Air kemasan bermerek</i> - 1 <i>Sumur</i> - 6 <i>Air isi ulang</i> - 2 <i>Mata air</i> - 7 <i>Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)</i> - 3 <i>Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan</i> - 8 <input type="checkbox"/> <i>Ledeng tanpa meteran</i> - 4 <i>Air hujan</i> - 9 <i>Sumur bor atau pompa</i> - 5 <i>Lainnya</i> - 10 <i>(tuliskan)</i>
	b. Sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari: <i>Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)</i> - 1 <i>Mata air</i> - 5 <input type="checkbox"/> <i>Ledeng tanpa meteran</i> - 2 <i>Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan</i> - 6 <i>Sumur bor atau pompa</i> - 3 <i>Air hujan</i> - 7 <i>Sumur</i> - 4 <i>Lainnya</i> - 8 <i>(tuliskan)</i>

512	a. Keberadaan permukiman kumuh (sanitasi lingkungan buruk, bangunan padat, dan sebagian besar tidak layak huni) di desa/kelurahan: <i>Ada - 1 Tidak ada - 2 → R513</i> <input type="checkbox"/>							
	b. Jika ada permukiman kumuh:							
	1. Jumlah lokasi	<input type="text"/> lokasi						
	2. Jumlah bangunan	<input type="text"/> unit						
	3. Jumlah keluarga (<i>isian tidak boleh lebih dari isian R401c</i>)	<input type="text"/> keluarga						
513	Pencemaran lingkungan hidup (polusi) di desa/kelurahan selama setahun terakhir :							
		Jika ada kejadian pencemaran lingkungan hidup (kolom (2) berkode 1)						
	Pencemaran lingkungan hidup (polusi)	Kejadian pencemaran lingkungan hidup <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>	Sumber pencemaran lingkungan hidup yang utama <i>Rumah tangga - 1 Pabrik/industri/usaha - 2 Lainnya - 3</i> Jika jawaban berkode 3 tuliskan sumber pencemarannya	Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>				
	(1)	(2)	(3)	(4)				
	a. Air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ,	<input type="checkbox"/>				
b. Tanah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ,	<input type="checkbox"/>					
c. Udara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ,	<input type="checkbox"/>					
514	Kegiatan pelestarian lingkungan dan pengolahan sampah selama 3 tahun terakhir							
	Jenis Kegiatan	<i>Ada, sebagian warga terlibat - 1 Ada, warga tidak terlibat - 2 Tidak ada kegiatan - 3</i>						
	(1)	(2)						
	a. Penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan sejenisnya	<input type="checkbox"/>						
	b. Pengolahan/daur ulang sampah/limbah (<i>reuse, recycle</i>)	<input type="checkbox"/>						
515	Kebiasaan masyarakat membakar ladang/kebun di desa/kelurahan untuk proses usaha pertanian: <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i> <input type="checkbox"/>							
516	Keberadaan lokasi penggalian Golongan C (misalnya: batu kali, pasir, kapur, kaolin, pasir kuarsa, tanah liat, dll) di desa/kelurahan: <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i> <input type="checkbox"/>							
VI. BENCANA ALAM DAN MITIGASI BENCANA ALAM								
601	Kejadian/bencana alam (menggangu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat) yang terjadi selama 3 tahun terakhir :							
	Kejadian/bencana alam	Kejadian <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>	Jika ada kejadian/bencana alam (kolom (2) berkode 1)					
			Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
			Banyak kejadian	Korban jiwa	Banyak kejadian	Korban jiwa	Banyak kejadian	Korban jiwa
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Tanah longsor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	b. Banjir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	c. Banjir bandang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	d. Gempa bumi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	e. Tsunami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
f. Gelombang pasang laut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
g. Angin puyuh/puting beliung/topan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
h. Gunung meletus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
i. Kebakaran hutan dan lahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
j. Kekeringan (lahan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	

602	Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/kelurahan:				
	a. Sistem peringatan dini bencana alam	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>	
	b. Sistem peringatan dini khusus tsunami	Bukan wilayah potensi tsunami - 0	Ada - 3	Tidak ada - 4	<input type="checkbox"/>
	c. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll.)	Ada - 5	Tidak ada - 6	<input type="checkbox"/>	
	d. Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana	Ada - 7	Tidak ada - 8	<input type="checkbox"/>	
	e. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll.	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>	
VII. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN					
701	Keberadaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan				
	Jenis/jenjang pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan		Jika tidak ada lembaga pendidikan di desa/kelurahan (<i>kolom (2) dan kolom (3) terisi 0</i>), jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana pendidikan terdekat	
		Negeri	Swasta	Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	b. TK/RA/BA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	c. SD/MI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	d. SMP/MTs	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	e. SMU/MA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	f. SMK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	g. Akademi/Perguruan Tinggi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	h. SDLB	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	i. SMPLB	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	j. SMALB	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	k. Pondok Pesantren		<input type="text"/>		
	l. Madrasah Diniyah		<input type="text"/>		
	m. Seminari/sejenisnya		<input type="text"/>		
Kode kolom (5): Sangat mudah - 1 Mudah - 2 Sulit - 3 Sangat sulit - 4					
702	a. Kegiatan pemberantasan buta aksara/keaksaraan fungsional (KF) selama 3 tahun terakhir : Ada - 1 Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>				
	b. Kegiatan pendidikan Paket A/B/C selama setahun terakhir : Ada - 3 Tidak ada - 4 <input type="checkbox"/>				
	c. Kelompok Bermain (<i>Play Group</i>): Ada - 5 Tidak ada - 6 <input type="checkbox"/>				
	d. Taman Penitipan Anak (TPA): Ada - 7 Tidak ada - 8 <input type="checkbox"/>				
	e. Taman Pendidikan Al-Qur'an: Ada - 1 Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>				
	f. Taman Bacaan Masyarakat (TBM): Ada - 3 Tidak ada - 4 <input type="checkbox"/>				

703	Keberadaan jenis pendidikan keterampilan di desa/kelurahan			
	Jenis pendidikan keterampilan	Jumlah		
		Milik desa/kelurahan	Bukan milik desa/kelurahan	
	(1)	(2)	(3)	
	a. Bahasa asing	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	b. Komputer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	c. Menjahit/tata busana	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	d. Kecantikan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
e. Montir mobil/motor	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
f. Elektronika	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
g. Lainnya	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<i>(tuliskan, misalnya: tataboga, stir mobil, menetik, akuntansi, dll.)</i>				
704	Keberadaan sarana kesehatan di desa/kelurahan			
	Sarana kesehatan	Jumlah sarana kesehatan di desa/kelurahan	Jika tidak ada sarana kesehatan di desa/kelurahan [kolom (2) terisi 0], Jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana kesehatan terdekat	
			Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Rumah sakit	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Rumah sakit bersalin	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Puskesmas dengan rawat inap	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	d. Puskesmas tanpa rawat inap	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	e. Puskesmas pembantu	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	f. Poliklinik/balai pengobatan	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	g. Tempat praktik dokter	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	h. Rumah bersalin	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	i. Tempat praktik bidan	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	j. Poskesdes (pos kesehatan desa)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	k. Polindes (pondok bersalin desa)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	l. Apotek	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
m. Toko khusus obat/jamu	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kode kolom (4): Sangat mudah - 1 Mudah - 2 Sulit - 3 Sangat sulit - 4				
705	Jumlah posyandu/posbindu menurut kegiatan/pelayanan selama setahun terakhir:			
	a. Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap sebulan sekali:	<input type="text"/>	unit	
	b. Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih:	<input type="text"/>	unit	
	c. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu):	<input type="text"/>	unit	
706	Tenaga kesehatan yang tinggal/menetap di desa/kelurahan:			
	a. Dokter umum/spesialis:	<input type="text"/>	orang	
	1. Dokter pria	<input type="text"/>	orang	
	2. Dokter wanita	<input type="text"/>	orang	
	b. Dokter gigi (tidak termasuk tukang gigi):	<input type="text"/>	orang	
c. Bidan:	<input type="text"/>	orang		
d. Tenaga kesehatan lainnya: (misalnya: apoteker/asisten apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, perawat, dll.)	<input type="text"/>	orang		

707	Keberadaan bidan desa (BDD):		<i>Ada - 1</i>	<i>Tidak ada - 2</i>	<input type="checkbox"/>
708	Dukun bayi/dukun bersalin/paraji yang tinggal/menetap di desa/kelurahan:				<input type="text"/> orang
709	Kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit selama setahun terakhir				
	Jenis KLB/wabah penyakit (KLB: timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, ditetapkan oleh pemerintah)		Kejadian <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>		Jika ada KLB atau wabah, (kolom (2) berkode 1)
	(1)		(2)	Jumlah penderita (3)	Jumlah penderita yang meninggal (4)
	a. Muntaber/diare	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	b. Demam berdarah	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	c. Campak	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	d. Malaria	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	e. Flu burung/SARS	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	f. Hepatitis E	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	g. Difteri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
h. Lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<i>(tuliskan, misalnya: chikungunya, leptospirosis, kolera, dll.)</i>					
710	Jumlah warga penderita gizi buruk (<i>marasmus</i> dan <i>kwashiorkor</i>) pada tahun 2017 :				<input type="text"/> orang
711	a. Jumlah warga peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Jamkesda pada tahun 2017 :				<input type="text"/> orang
	b. Jumlah surat miskin/SKTM yang dikeluarkan desa/kelurahan selama tahun 2017 :				<input type="text"/> surat
	c. Jumlah keluarga miskin menurut kepala desa/lurah selama tahun 2017 : (isian tidak boleh lebih dari isian R401c)				<input type="text"/> keluarga
VIII. SOSIAL BUDAYA					
801	Keberadaan warga yang menganut agama/kepercayaan di desa/kelurahan:				
	Kode	Nama agama/kepercayaan			Keberadaan
	(1)	(2)			(3)
	1	Islam	<i>Ada - 1</i>	<i>Tidak ada - 2</i>	<input type="checkbox"/>
	2	Kristen	<i>Ada - 3</i>	<i>Tidak ada - 4</i>	<input type="checkbox"/>
	3	Katolik	<i>Ada - 5</i>	<i>Tidak ada - 6</i>	<input type="checkbox"/>
	4	Buddha	<i>Ada - 7</i>	<i>Tidak ada - 8</i>	<input type="checkbox"/>
	5	Hindu	<i>Ada - 1</i>	<i>Tidak ada - 2</i>	<input type="checkbox"/>
6	Konghucu	<i>Ada - 3</i>	<i>Tidak ada - 4</i>	<input type="checkbox"/>	
7	Aliran penghayat kepercayaan..... <i>(tuliskan)</i>	<i>Ada - 5</i>	<i>Tidak ada - 6</i>	<input type="checkbox"/>	
802	Agama/kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar warga di desa/kelurahan: (pilih salah satu kode pada R801 kolom (1) yang isian kolom (3) nya berkode 1, 3, 5, atau 7)				<input type="checkbox"/>
803	Jumlah tempat ibadah di desa/kelurahan:				
	Jenis tempat ibadah	Jumlah	Jenis tempat ibadah	Jumlah	
	(1)	(2)	(1)	(2)	
	a. Masjid	<input type="text"/>	f. Pura	<input type="text"/>	
	b. Surau/Langgar/Musala	<input type="text"/>	g. Wihara	<input type="text"/>	
	c. Gereja Kristen	<input type="text"/>	h. Kelenteng	<input type="text"/>	
	d. Gereja Katolik	<input type="text"/>	i. Lainnya,	<input type="text"/>	
e. Kapel	<input type="text"/>	<i>(tuliskan, misalnya: Balai Basarah, dll.)</i>			

804	a. 1. Warga desa/kelurahan terdiri dari beberapa suku/etnis: <i>Ya - 1 Tidak - 2</i> <input type="checkbox"/>		
	2. Tuliskan tiga nama suku/etnis utama secara berurutan dari yang terbesar: a) <input type="text"/> b) <input type="text"/> c) <input type="text"/>		
805	b. 1. Warga desa/kelurahan berkomunikasi sehari-hari menggunakan beberapa bahasa: <i>Ya - 1 Tidak - 2</i> <input type="checkbox"/>		
	2. Bahasa sehari-hari sebagian besar warga di desa/kelurahan: <input type="text"/> (tuliskan)		
805	Banyaknya penyandang cacat di desa/kelurahan:		
	Jenis kecacatan	Banyaknya penyandang cacat	
	a. Tunanetra (buta)	<input type="text"/>	
	b. Tunarungu (tuli)	<input type="text"/>	
	c. Tunawicara (bisu)	<input type="text"/>	
	d. Tunarungu-wicara (tuli-bisu)	<input type="text"/>	
	e. Tunadaksa (cacat tubuh): kelumpuhan/kelainan/ketidaklengkapan anggota gerak	<input type="text"/>	
	f. Tunagrahita (cacat mental, keterbelakangan mental)	<input type="text"/>	
	g. Tunalaras (eks-sakit jiwa, mengalami hambatan/gangguan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial)	<input type="text"/>	
	h. Cacat eks-sakit kusta: pernah mengalami sakit kusta dan telah dinyatakan sembuh oleh dokter	<input type="text"/>	
i. Cacat ganda (cacat fisik-mental): cacat fisik (buta, tuli, bisu, bisu-tuli atau cacat tubuh) dan cacat mental (tunagrahita atau tunalaras)	<input type="text"/>		
806	Jumlah orang yang dipasung di desa/kelurahan: <input type="text"/> orang		
807	Situs cagar budaya di desa/kelurahan: <i>Ada, dikelola - 1 Ada, jarang dikelola - 2 Ada, tidak dikelola - 3 Tidak ada - 4</i> <input type="checkbox"/>		
808	Ruang publik terbuka yang peruntukan utamanya sebagai tempat bagi warga desa/kelurahan untuk bersantai/bermain tanpa perlu membayar (misalnya: lapangan terbuka/alun-alun, taman, dll.): <i>Ada, dikelola - 1 Ada, tidak dikelola - 2 Tidak ada - 3</i> <input type="checkbox"/>		
809	a. Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan untuk kepentingan umum/komunitas (seperti: kerja bakti, siskamling, pesta rakyat, dll) selama 1 tahun terakhir: <i>Ada, sebagian besar warga terlibat - 1 Ada, sebagian kecil warga terlibat - 2 Tidak ada kebiasaan - 3</i> <input type="checkbox"/>		
	b. Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah (seperti kematian, kesakitan, kecelakaan, dll) selama 1 tahun terakhir: <i>Ada, sebagian besar warga terlibat - 1 Ada, sebagian kecil warga terlibat - 2 Tidak ada kebiasaan - 3</i> <input type="checkbox"/>		
810	Keberadaan kearifan lokal yaitu budaya/adat/kebiasaan luhur yang menjadi ciri masyarakat dan masih dipertahankan di desa/kelurahan:		
	Kearifan lokal berkaitan dengan	Nama kearifan lokal	Kearifan lokal berkaitan dengan
	(1)	(2)	(1)
	1. Kehamilan	5. Perkawinan
	2. Kelahiran	6. Kehidupan komunitas
	3. Pekerjaan/pencarian	7. Kematian
	4. Alam/lingkungan hidup

811	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa:			
	Jenis lembaga		Jumlah	
	(1)		(2)	
	a. PKK	<input type="text"/>	d. Kelompok tani	<input type="text"/>
	b. Karang taruna	<input type="text"/>	e. Lembaga pengelolaan air	<input type="text"/>
	c. Lembaga adat	<input type="text"/>	f. Kelompok masyarakat (pokmas)	<input type="text"/>
IX. OLAHRAGA DAN HIBURAN				
901	Ketersediaan fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga di desa/kelurahan:			
	Jenis olahraga	Fasilitas/lapangan olahraga Ada, baik - 1 Ada, rusak parah - 3 Ada, rusak sedang - 2 Tidak ada - 4	Kelompok kegiatan Ada - 1 Tidak ada - 2	
	(1)	(2)	(3)	
	a. Sepak bola	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	b. Bola voli	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	c. Bulu tangkis	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	d. Bola basket	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	e. Tenis lapangan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	f. Tenis meja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	g. Futsal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	h. Renang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	i. Bela diri (pencak silat, karate, dll.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	j. Bilyard	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	k. fitness, aerobik, dll.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
l. Lainnya..... (tuliskan)	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
902	a. Keberadaan pub/diskotek/tempat karaoke yang masih berfungsi: Ada - 1 → R1001 Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>			
	b. Jika tidak ada pub/diskotek/tempat karaoke, perkiraan jarak ke pub/diskotek/tempat karaoke terdekat : km <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
X. ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI				
1001	Prasarana dan sarana transportasi antar desa/kelurahan:			
	a. Lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui :			
	Darat - 1 Air - 2 → R1001c Darat dan air - 3 Udara - 4 → R1001c <input type="checkbox"/>			
	b. Jika lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui darat atau darat dan air,			
	1. Jenis permukaan jalan darat antar desa/kelurahan yang terluas:			
	Aspal/beton - 1 Tanah - 3 <input type="checkbox"/>			
	Diperkeras (kerikil, batu, dll.) - 2 Lainnya - 4			
	(tuliskan, misalnya: jalan setapak, kayu/papan, dll.)			
	2. Jalan darat antar desa/kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih:			
	Sepanjang tahun - 1 <input type="checkbox"/>			
Sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll.) - 2				
Selama musim kemarau - 3				
Tidak dapat dilalui sepanjang tahun - 4				
c. Angkutan umum yang melewati desa/kelurahan:				
1. Keberadaan angkutan umum:				
Ada, dengan trayek tetap - 1 Ada, tanpa trayek tetap - 2 Tidak ada angkutan umum - 3 → R1002 <input type="checkbox"/>				
2. Operasional angkutan umum yang utama: Setiap hari - 1 Tidak setiap hari - 2 <input type="checkbox"/>				
3. Jam operasi angkutan umum yang utama: Siang dan malam hari - 1 Hanya siang hari - 2 <input type="checkbox"/>				

1002	Sarana transportasi dari kantor kepala desa/lurah ke kantor camat/bupati/walikota						
	Sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa/lurah ke	Sarana transportasi yang biasa digunakan [kode]	Jika ada angkutan umum (kolom (2) berkode 1, 3, 5, atau 7)		Jarak tempuh (km)	Waktu tempuh (jam: menit)	Biaya transportasi (000 Rupiah)
			Jenis angkutan umum [kode]	Angkutan umum yang utama [kode]			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a. Kantor camat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Kantor bupati/walikota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Kantor camat lain terdekat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	d. Kantor bupati/walikota lain terdekat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Kode kolom (2). pilihan boleh lebih dari satu kode: Angkutan umum - 1 Kendaraan pribadi - 2 Jalan kaki, sepeda, dll. - 4						
	Kode kolom (3), pilihan boleh lebih dari satu kode: Ojek sepeda motor - 1 Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih - 2 Perahu (bermotor maupun tidak bermotor) - 4 Pesawat terbang - 8 Lainnya (becak, delman, pedati, dll) - 16						
Kode kolom (4): Ojek sepeda motor - 1 Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih - 2 Perahu (bermotor maupun tidak bermotor) - 3 Pesawat terbang - 4 Lainnya (becak, delman, pedati, dll) - 5							
1003	a. Jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel:					<input type="text"/>	keluarga
	b. Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/handphone:					<input type="checkbox"/>	
	Sebagian besar warga - 1 Sebagian kecil warga - 2 Tidak ada - 3						
1004	Keberadaan warnet (termasuk game online) di desa/kelurahan:					Ada - 1 Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
1005	a. Jumlah menara Base Transceiver Station (BTS):					<input type="text"/>	buah
	b. Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa/kelurahan:					<input type="text"/>	jenis
	c. Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan:					<input type="checkbox"/>	
	Sinyal sangat kuat - 1 Sinyal kuat - 2 Sinyal lemah - 3 Tidak ada sinyal - 4 → R1006						
1006	d. Sinyal internet GSM atau CDMA telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan:					<input type="checkbox"/>	
	4G/LTE - 1 3G/H/H+/EVDO - 2 2.5G/E/GPRS - 3 Tidak ada sinyal internet - 4						
1007	a. Komputer/PC/laptop yang masih berfungsi di kantor kepala desa/lurah:					<input type="checkbox"/>	
	Digunakan - 1 Jarang digunakan - 2 Tidak digunakan - 3 Tidak ada - 4						
1007	b. Fasilitas internet di kantor kepala desa/lurah:					<input type="checkbox"/>	
	Berfungsi - 1 Jarang berfungsi - 2 Tidak berfungsi - 3 Tidak ada - 4						
	c. Layanan pos keliling:					<input type="checkbox"/>	
1007	Ada - 1 Tidak ada - 2						
	c. Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/dokumen) swasta:					<input type="checkbox"/>	
1007	Beroperasi - 1 Jarang beroperasi - 2 Tidak beroperasi - 3 Tidak ada - 4						
	1008 Program/siaran TV/radio yang diterima di desa/kelurahan						
	Program/siaran televisi/radio	Program/siaran televisi/radio dapat diterima Ya - 1 Tidak - 2		Jika program/siaran televisi dapat diterima (kolom 2 berkode 1), apakah harus menggunakan parabola/TV kabel? Ya - 1 Tidak - 2			
	(1)	(2)		(3)			
	a. TVRI	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	b. TVRI daerah	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	c. TV swasta	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	d. TV luar negeri	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	e. RRI	<input type="checkbox"/>					
	f. RRI daerah	<input type="checkbox"/>					
	g. Radio swasta/komunitas	<input type="checkbox"/>					

XI. PENGGUNAAN LAHAN	
1101	Luas wilayah desa/kelurahan : km ² <input type="text"/> <input type="text"/> (1 Ha= 0,01 km ²)
1102	Luas lahan menurut jenis penggunaan lahan: a. Lahan pertanian sawah (R1102a.1 + R1102a.2) : Ha <input type="text"/> <input type="text"/> 1. Lahan sawah irigasi : Ha <input type="text"/> <input type="text"/> 2. Lahan sawah nonirigasi (tadah hujan, pasang surut, rawa) : Ha <input type="text"/> <input type="text"/> b. Lahan pertanian nonsawah : Ha <input type="text"/> <input type="text"/> (tegal/kebun, ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, perkebunan, peternakan, dll.) c. Lahan nonpertanian : Ha <input type="text"/> <input type="text"/> (perumahan, industri, perkantoran, pertokoan, jalan, prasarana umum, lapangan, dll.)
XII. EKONOMI	
1201	Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) menurut bahan baku utama:
	Jumlah
	a. Industri barang dari kulit (tas, sepatu, sandal, dll.) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	b. Industri barang dari kayu (meja, kursi, lemari, dll.) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	c. Industri barang dari logam mulia atau bahan logam (perabot dan perhiasan dari logam, dll.) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	d. Industri barang dari kain/tenun (kerajinan tenun, konveksi, dll.) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	e. Industri gerabah/keramik/batu (genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, dll.) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	f. Industri anyaman yang terbuat dari rotan/bambu, rumput, pandan, dll. (tikar, tas, hiasan dinding, dan produk lainnya). <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	g. Industri makanan dan minuman (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak, susu dan makanan dari susu, makanan dan minuman lain, dll.) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	h. Industri lainnya (tuliskan) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
1202	a. Jumlah Sentra Industri: <input type="text"/> lokasi
	b. Jumlah Lingkungan Industri Kecil (LIK): <input type="text"/> lokasi
	c. Jumlah Perkampungan Industri Kecil (PIK): <input type="text"/> lokasi
1203	a. Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah (termasuk penjual minyak tanah keliling): Ada - 1 Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>
	b. Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling): Ada - 3 Tidak ada - 4 <input type="checkbox"/>
1204	Jumlah KUD di desa/kelurahan
	a. KUD yang beroperasi: <input type="text"/> <input type="text"/> unit Jika tidak ada KUD (R1204a =0) → R1205
	b. KUD yang membeli/menjual hasil/produksi pertanian <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	c. KUD yang menyediakan Kredit Usaha <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	d. KUD yang melakukan kegiatan lainnya <input type="text"/> <input type="text"/> unit
1205	a. Jumlah koperasi (selain KUD) yang masih aktif/beroperasi: <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	1. Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)/Usaha mikro <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	2. Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	3. Koperasi lainnya <input type="text"/> <input type="text"/> unit (tuliskan, misalnya koperasi: serbausaha, konsumsi.)

1205	b. Keberadaan toko/kios yang menjual sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, cangkul, dll.) di desa/kelurahan:				
	1. Milik KUD	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>	
	2. Milik BUM Desa	Ada - 3	Tidak ada - 4	<input type="checkbox"/>	
	3. Selain milik KUD/BUM Desa	Ada - 5	Tidak ada - 6	<input type="checkbox"/>	
1206	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi di desa/kelurahan				
	Jenis sarana dan prasarana ekonomi	Jumlah	Jika tidak ada [kolom (2) terisi 0], Jarak dan akses ke sarana dan prasarana ekonomi terdekat		
			Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai [kode]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	a. Kelompok pertokoan (minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Pasar dengan bangunan permanen (memiliki atap, lantai, dan dinding)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Pasar dengan bangunan semi permanen (memiliki atap dan lantai, tanpa dinding)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Pasar tanpa bangunan (misalnya: pasar subuh, pasar terapung, dll.)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. Jumlah minimarket/swalayan (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan label harga, sistem pelayanan mandiri, luas lantai < 400 m ²)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	f.1. Toko/warung kelontong (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang keperluan sehari-hari secara eceran, tanpa ada sistem pelayanan mandiri)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. Toko/warung kelontong yang menjual bahan pangan (sembako)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. Restoran/rumah makan (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya dikenai pajak)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	h. Warung/kedai makanan minuman (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya tidak dikenai pajak)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. Hotel (menyediakan jasa akomodasi dan ada restoran, penginapan dengan izin usaha sebagai hotel)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	j. Penginapan: hostel/motel/losmen/wisma (menyediakan akomodasi, penginapan dengan izin usaha bukan sebagai hotel)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	Kode kolom (4) : Sangat mudah - 1 Mudah - 2 Sulit - 3 Sangat sulit - 4				
	1207	Fasilitas kredit yang diterima warga desa/kelurahan selama setahun terakhir :			
		a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
		b. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)	Ada - 3	Tidak ada - 4	<input type="checkbox"/>
		c. Kredit Usaha Kecil (KUK)	Ada - 5	Tidak ada - 6	<input type="checkbox"/>
d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)		Ada - 7	Tidak ada - 8	<input type="checkbox"/>	
1208	Jumlah sarana lembaga keuangan yang beroperasi di desa/kelurahan				
	Jenis sarana lembaga keuangan	Jumlah	Jika tidak ada [kolom (2) terisi 0], Jarak dan akses ke sarana/lembaga keuangan terdekat		
			Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai [kode]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	a. Bank Umum Pemerintah (BRI, BNI, Mandiri, BPD, BTN)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Bank Umum Swasta (BCA, Permata, Sinarmas, CIMB, dll.)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	Kode kolom (4) : Sangat mudah - 1 Mudah - 2 Sulit - 3 Sangat sulit - 4				

1209	Keberadaan sarana penunjang ekonomi di desa/kelurahan				
	Jenis sarana penunjang ekonomi	Keberadaan <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	Jika tidak ada [<i>kolom (2) berkode 2</i>], Jarak dan akses ke sarana penunjang terdekat		
			Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai [kode]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	a. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Pegadaian	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Bengkel mobil/motor	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. Salon Kecantikan	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Agen Tiket/Travel/Biro Perjalanan	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
g. Agen Bank	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		
Kode kolom (4): <i>Sangat mudah - 1</i> <i>Mudah - 2</i> <i>Sulit - 3</i> <i>Sangat sulit - 4</i>					
XIII. KEAMANAN					
1301	a. Kejadian perkelahian massal di desa/kelurahan selama setahun terakhir : <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i> → R1303 <input type="checkbox"/>				
	b. Jika ada kejadian perkelahian massal, berikut ini keterangan jenis perkelahian massal, jumlah kejadian, dan keberadaan korban manusia selama setahun terakhir :				
	Jenis perkelahian massal	Jumlah	Jika ada perkelahian massal (<i>kolom (2) tidak sama dengan 0</i>)		
			Korban manusia		Penyebab perkelahian [kode]
	Meninggal <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	Luka- luka <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Antar kelompok masyarakat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	2. Kelompok masyarakat antar desa/kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	3. Kelompok masyarakat dengan aparat keamanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	4. Kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5. Pelajar/mahasiswa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
6. Antar suku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
7. Lainnya (<i>tuliskan</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Kode kolom (5): Pilihan boleh lebih dari satu. <i>Harta - 1</i> <i>Asmara - 4</i> <i>Keramaian (olah raga, hiburan, dll.) - 16</i> <i>Lainnya - 64</i> <i>Kekuasaan - 2</i> <i>Ideologi/kepercayaan - 8</i> <i>Ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan - 32</i>					
1302	a. Perkelahian massal yang paling sering terjadi (R1301b kolom (2) yang isiannya paling banyak), apakah sudah diselesaikan/didamaikan? <i>Ya, semuanya - 1</i> <i>Ya, sebagian - 2</i> <i>Tidak - 3</i> <input type="checkbox"/>				
	b. Upaya penyelesaian perkelahian massal dilakukan oleh: (Pilihan boleh lebih dari satu)				
	<i>Aparat keamanan - 1</i> <i>Tokoh masyarakat - 4</i> <i>Lainnya - 16</i> <i>Aparat pemerintah - 2</i> <i>Tokoh agama - 8</i> <i>Tidak ada - 32</i>	<input type="text"/>			

1303	a. Tindak kejahatan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir :			
	Kode	Jenis tindak kejahatan	Kejadian Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada tindak kejahatan (kolom (3) berkode 1), kecenderungan tindak kejahatan dibanding setahun yang lalu Menurun - 1 Sama saja - 2 Meningkat - 3
	(1)	(2)	(3)	(4)
	01	Pencurian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	02	Pencurian dengan kekerasan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	03	Penipuan/penggelapan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	04	Penganiayaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	05	Pembakaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	06	Perkosaan/kejahatan terhadap kesucilaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	07	Penyalahgunaan/peredaran narkoba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	08	Perjudian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	09	Pembunuhan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	Perdagangan orang (<i>trafficking</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	11	Korupsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Dari berbagai kejadian tindak kejahatan (R1303a kolom (3) berkode 1), tindak kejahatan yang paling sering terjadi: (salin kode pada R1303a kolom (1))			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1304	Kegiatan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan lingkungan di desa/kelurahan selama setahun terakhir :			
	a. Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan:	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
	b. Pembentukan/pengaturan regu keamanan:	Ya - 3	Tidak - 4	<input type="checkbox"/>
	c. Penambahan jumlah anggota hansip/linmas:	Ya - 5	Tidak - 6	<input type="checkbox"/>
	d. Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan:	Ya - 7	Tidak - 8	<input type="checkbox"/>
	e. Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga:	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
1305	Jumlah anggota linmas/hansip di desa/kelurahan:			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> orang
1306	a. Keberadaan pos polisi (termasuk kantor polisi) di desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R1306c			<input type="checkbox"/>
	b. Jumlah pos polisi (termasuk kantor polisi):			
	1. Digunakan:			<input type="checkbox"/> unit
	2. Tidak digunakan:			<input type="checkbox"/> unit
	c. Jika tidak ada pos polisi,			
	1. Perkiraan jarak ke pos polisi (termasuk kantor polisi) terdekat (km):			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	2. Kemudahan untuk mencapai pos polisi (termasuk kantor polisi) terdekat:			<input type="checkbox"/>
	Sangat mudah - 1	Mudah - 2	Sulit - 3	Sangat sulit - 4
1307	Jumlah korban bunuh diri (termasuk percobaan bunuh diri) yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir :			<input type="checkbox"/> orang
1308	a. Keberadaan lokasi berkumpul/mangkal anak jalanan (selain rumah singgah) di desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2			<input type="checkbox"/>
	b. Keberadaan tempat mangkal gelandangan/pengemis di desa/kelurahan: Ada - 3 Tidak ada - 4			<input type="checkbox"/>
1309	Keberadaan lokalisasi/lokasi/tempat mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK) di desa/kelurahan:			<input type="checkbox"/>
				Ada - 1 Tidak ada - 2

XV. PENGGUNAAN DANA DESA

Blok ini akan terisi jika Blok III R 301, status pemerintahannya adalah Desa (Jika Blok III R301 berstatus UPT/SPT maka langsung ke R1601)

1501 Tuliskan program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di desa yang menggunakan **Dana Desa** selama **tahun 2015-2018**

No	Uraian Kegiatan	Penyelenggaraan pemerintahan - 1 Pembinaan kemasyarakatan - 2	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1502 Tuliskan program/kegiatan **pembangunan** di desa yang menggunakan **Dana Desa** selama **tahun 2015-2018**

No	Jenis pembangunan	Kode pembangunan [Diisi oleh PML]	Pembangunan baru - 1 Renovasi - 2	Tahun	Pelaksana [kode]	Penerima manfaat langsung [kode]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jalan <input type="text"/> m	0 2 0 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kode kolom (6) dan kolom (7):
Penduduk miskin - 1 Petani/nelayan - 2 Kelompok usaha masyarakat - 3 Sebagian besar warga - 4 Swasta/pengusaha - 5 Lainnya - 6

1503 Tuliskan program/kegiatan **pemberdayaan masyarakat** di desa yang menggunakan **Dana Desa** selama **tahun 2015-2018**

No	Jenis Pemberdayaan	Kode pemberdayaan [Diisi oleh PML]	Tahun	Pelaksana [kode]	Penerima manfaat langsung [kode]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kode kolom (5) dan kolom (6):
Penduduk miskin - 1 Petani/nelayan - 2 Kelompok usaha masyarakat - 3 Sebagian besar warga - 4 Swasta/pengusaha - 5 Lainnya - 6

1504	a. Permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan Dana Desa selama tahun 2017 :			
	1. Penyaluran tidak tepat waktu <i>Ya - 1 Tidak - 2</i> <input type="checkbox"/>	4. Tidak memahami peraturan <i>Ya - 7 Tidak - 8</i> <input type="checkbox"/>		
	2. Pendampingan tidak optimal <i>Ya - 3 Tidak - 4</i> <input type="checkbox"/>	5. Kesulitan mencari tenaga kerja yang sesuai <i>Ya - 1 Tidak - 2</i> <input type="checkbox"/>		
	3. Proses pencairan dana sulit <i>Ya - 5 Tidak - 6</i> <input type="checkbox"/>	6. Lainnya (.....tuliskan)		
	b. Jika ada permasalahan, permasalahan utama yang dihadapi (Pilih salah satu kode pada R1504a yang dijawab "Ya")			<input type="checkbox"/>
1505	a. Apakah Dana Desa tahun 2018 sudah cair? <i>Ya - 1 Belum - 2</i> → R1505c <input type="checkbox"/>			
	b. 1. Tahap I : Bulan, sebesar <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> persen		2. Tahap II : Bulan, sebesar <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> persen	
	c. Jika belum menerima Dana Desa , penyebabnya adalah:			
	1. Masih dalam proses	<i>Ya - 1 Tidak - 2</i>	<input type="checkbox"/>	
	2. Belum menyerahkan laporan penggunaan dana desa sebelumnya	<i>Ya - 3 Tidak - 4</i>	<input type="checkbox"/>	
	3. Aparat desa terbatas	<i>Ya - 5 Tidak - 6</i>	<input type="checkbox"/>	
4. Pembuatan APBDes atau RKPDesa terlambat	<i>Ya - 7 Tidak - 8</i>	<input type="checkbox"/>		
5. Kendala teknis di kabupaten/kota (seperti: peraturan pencairan)	<i>Ya - 1 Tidak - 2</i>	<input type="checkbox"/>		
6. Lainnya (.....tuliskan)				
XVI. PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN				
1601	Program/kegiatan pembangunan/pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan (selain yang bersumber dari Dana Desa) selama 2015-2017 :			
	Jenis program/kegiatan pembangunan/pemberdayaan masyarakat	Kegiatan: <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>	Jika ada program/kegiatan (kolom (2) berkode 1)	
		Sumber dana [kode]	Pelaksana [kode]	Penerima manfaat langsung [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)
a. Pembangunan				
	1. Sarana prasarana transportasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Sarana prasarana energi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. Sarana prasarana informasi dan komunikasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. Sarana prasarana sanitasi dan air bersih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. Sarana prasarana pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. Sarana prasarana perdagangan dan jasa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7. Sarana prasarana produksi pertanian dan industri kecil desa/kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8. Sarana prasarana rekreasi dan wisata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9. Sarana prasarana penanggulangan bencana dan pelestarian alam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10. Sarana prasarana penunjang pemerintahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Pemberdayaan				
	1. Pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan masyarakat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Pengelolaan lingkungan perumahan desa/kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. Pengelolaan transportasi desa/kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. Pengembangan energi terbarukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. Pengelolaan informasi dan komunikasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. Pengelolaan usaha produktif berbasis pertanian dan industri kecil desa non pertanian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7. Peningkatan kesadaran dalam pelestarian alam dan penanggulangan bencana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8. Peningkatan peran masyarakat untuk meningkatkan tata kelola desa/kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9. Peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat desa/kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10. (Khusus untuk Desa) Pendirian dan pengembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kode untuk Kolom (3): isian boleh lebih dari satu kode		Kode kolom (4) dan kolom (5): isian boleh lebih dari satu kode		
APBD Prov/Kab/Kota -1 Swadaya -4		Penduduk miskin -1 Sebagian besar warga -8		
Pendapatan Asli Desa -2 Lainnya -8		Petani/nelayan -2 Swasta/pengusaha -16		
		Kelompok usaha masyarakat -4 Lainnya -32		

XVII. KETERANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN					
1701	Keberadaan Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan				
	Pemerintah desa/kelurahan	Keberadaan Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada pemerintah desa/kelurahan (<i>kolom (2) berkode 1</i>)		
			Umur	Jenis kelamin Laki-laki - 1 Perempuan - 2	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Kepala Desa/Lurah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
*) Kode kolom (5): Tidak pernah sekolah - 1 SMP/Sederajat - 4 Diploma IV/S1 - 7 Tidak tamat SD/Sederajat - 2 SMU/Sederajat - 5 S2 - 8 Tamat SD/Sederajat - 3 Akademi/DIII - 6 S3 - 9					
1702	Jumlah aparatur pemerintahan:				
	a. Sekretariat Desa/Kelurahan (bendahara, dll.)	<input type="checkbox"/>	c. Pelaksana Kewilayahan (kadus, ketua RT, ketua RW, dll.)	<input type="checkbox"/>	
	b. Pelaksana Teknis (kaur, kasi, dll.)	<input type="checkbox"/>	d. Pegawai Desa/Kelurahan lainnya (hansip, dll.)	<input type="checkbox"/>	
XVIII. MODUL					
1801	Penduduk pada 1 Januari 2018:				
	a. Penduduk yang belum merekam e-KTP:	Ada, sebagian besar - 1	Ada, sebagian kecil - 2	Tidak ada - 3 <input type="checkbox"/>	
	b. Penduduk yang tidak tercatat di KK:	Ada, sebagian besar - 1	Ada, sebagian kecil - 2	Tidak ada - 3 <input type="checkbox"/>	
1802	a. Keberadaan permukiman liar di desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R1802c <input type="checkbox"/>				
	b. Jika ada permukiman liar, jumlah lokasi:			<input type="checkbox"/>	
	c. Jumlah fasilitas umum/fasilitas sosial yang ditinggali penduduk:				
	1. Pasar	<input type="checkbox"/>	4. Kolong Jembatan	<input type="checkbox"/>	
	2. Stasiun	<input type="checkbox"/>	5. Pelabuhan	<input type="checkbox"/>	
	3. Terminal	<input type="checkbox"/>			
1803	a. Keberadaan suku terasing/masyarakat hukum adat di desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R1804 <input type="checkbox"/>				
	b. Jika ada suku terasing/masyarakat hukum adat :				
	1. Perkiraan jumlah keluarga	<input type="checkbox"/>			
	2. Perkiraan jumlah orang	<input type="checkbox"/>			
1804	Keberadaan permukiman khusus:				
	a. Permukiman/perumahan mewah	<input type="checkbox"/>	f. Permukiman di pantai/laut/danau	<input type="checkbox"/>	
	b. Apartemen	<input type="checkbox"/>	g. Asrama/barak militer	<input type="checkbox"/>	
	c. Rumah susun	<input type="checkbox"/>	h. Penduduk yang tinggal di daerah perbatasan, terpencil, atau remote area	<input type="checkbox"/>	
	d. Sekolah berasrama (<i>boarding school</i>)	<input type="checkbox"/>	i. LP/Rutan	<input type="checkbox"/>	
	e. Kos-kosan	<input type="checkbox"/>			
XIX. CATATAN					

DATA

MENCERDASKAN BANGSA
Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI
BPS-Statistics of Jambi Province**

Jl.A. Yani No.4 Telanaipura, Jambi

Telp: (62-741) 60497

Homepage: <http://www.jambi.bps.go.id> Email: bps1500@bps.go.id

